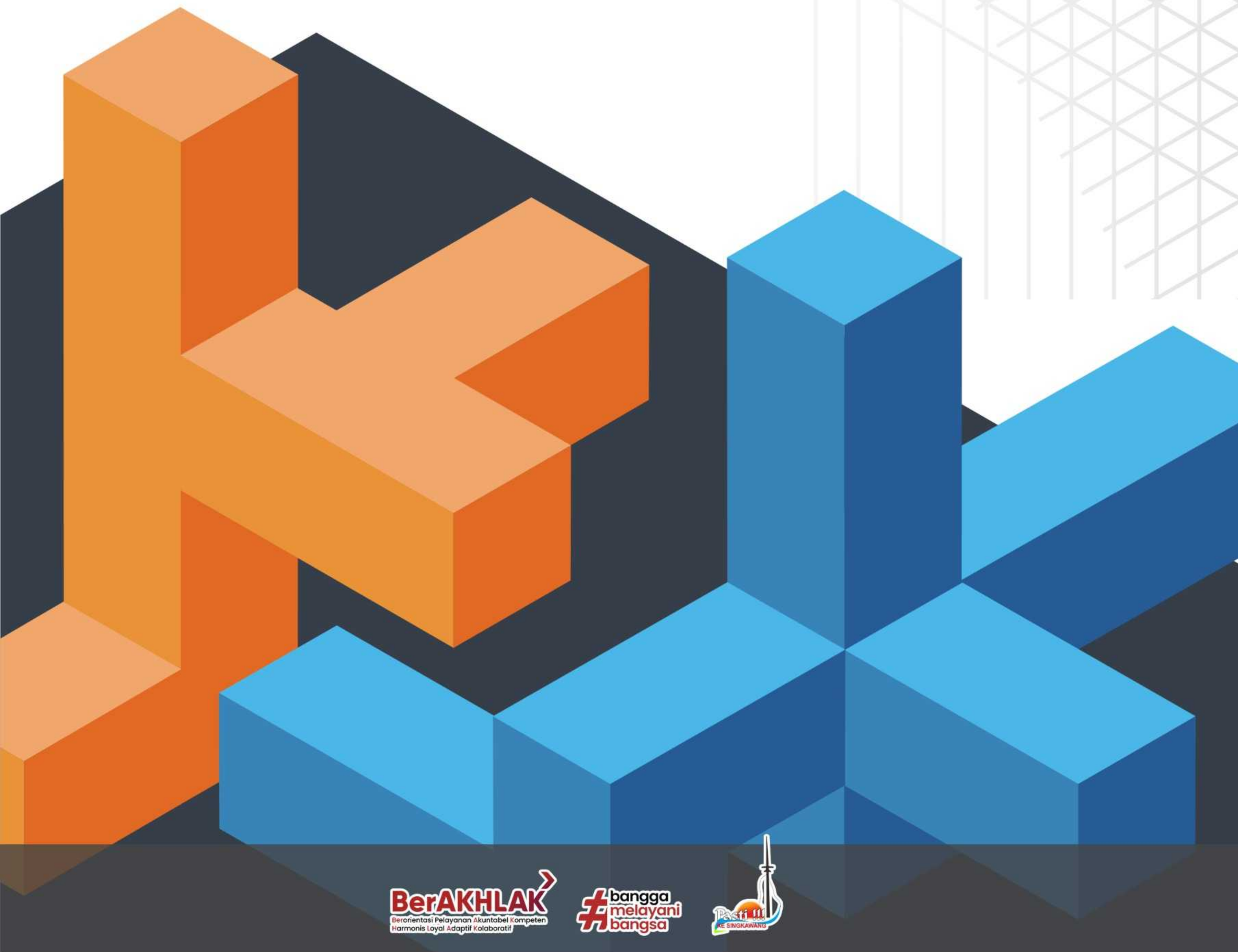




PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2023



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 dapat diselesaikan secara tuntas sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan LPPD ini merupakan tindak lanjut Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan oleh Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang sesuai surat Dirjen Otda Nomor 100.2.2.7/8697/OTDA Tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang selama Tahun 2023 kepada perangkat daerah, para *stakeholder* sebagai bahan evaluasi yang objektif dalam menilai kinerja Pemerintah Kota Singkawang pada semua urusan demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada para *stakeholder* dan segenap komponen masyarakat yang telah membantu dalam mewujudkan pembangunan di Kota Singkawang.



Semoga segala upaya yang telah dilakukan dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan selama ini selaras, serasi dan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Singkawang, 22 Maret 2024

Pj. Wali Kota Singkawang

Sumastro



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	35
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	143
BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	146
2.1 Capaian Kinerja Makro	146
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	147
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	147
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	170
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	283
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	287
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	371



BAB IV : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL	372
4.1 Urusan Pendidikan	372
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	372
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	373
4.1.3 Realisasi	374
4.1.4 Alokasi Anggaran	378
4.1.5 Dukungan Personil	379
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	380
4.2 Urusan Kesehatan	381
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	381
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	385
4.2.3 Realisasi	386
4.2.4 Alokasi Anggaran	388
4.2.5 Dukungan Personil	389
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	391
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	398
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	398
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	401
4.3.3 Realisasi	402



4.3.4 Alokasi Anggaran	404
4.3.5 Dukungan Personil	405
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	405
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	407
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	407
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	408
4.4.3 Realisasi	408
4.4.4 Alokasi Anggaran	410
4.4.5 Dukungan Personil	410
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	410
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	412
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	412
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	413
4.5.3 Realisasi	415
4.5.4 Alokasi Anggaran	429
4.5.5 Dukungan Personil	432
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	433
4.6 Urusan Sosial	437
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	437



4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	
oleh Daerah	439
4.6.3 Realisasi	442
4.6.4 Alokasi Anggaran	445
4.6.5 Dukungan Personil	446
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	447
4.7 Program dan Kegiatan	448
BAB V : PENUTUP	476



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kota Singkawang merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135/2094/SJ Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kota Singkawang. Peresmian pembentukannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, Kota Singkawang merupakan Ibu kota Kabupaten Sambas. Pada Tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kota Singkawang saat itu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bengkayang. Kemudian pada Tahun 2001, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dimekarkan lagi menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang.

Kota Singkawang sebagai daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan



pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, dalam lingkungan strategis globalisasi, Kota Singkawang sebagai daerah otonom diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman yang dimilikinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan itu untuk terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintah daerah yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan, maka Wali Kota Singkawang selaku Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, yang merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Singkawang selama 1 (satu) Tahun Anggaran, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)”.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Wali Kota wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur setelah berakhirnya Tahun Anggaran dalam rangka penilaian capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Singkawang.



b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi Daerah

Kota Singkawang memiliki wilayah datar dan sebagian besar merupakan dataran rendah antara 50 meter s/d 100 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya merupakan daerah hamparan dan berbukit serta sebelah Barat berada pada pesisir laut.

Kota Singkawang terletak di Bagian Utara Provinsi Kalimantan Barat, terletak di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, yaitu pada koordinat $0^{\circ} 44' 55,85''$ - $01^{\circ} 01' 21,51''$ Lintang Utara dan $108^{\circ} 51' 47,6''$ - $109^{\circ} 10' 19''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $550,18 \text{ Km}^2$ atau sekitar 0,37% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

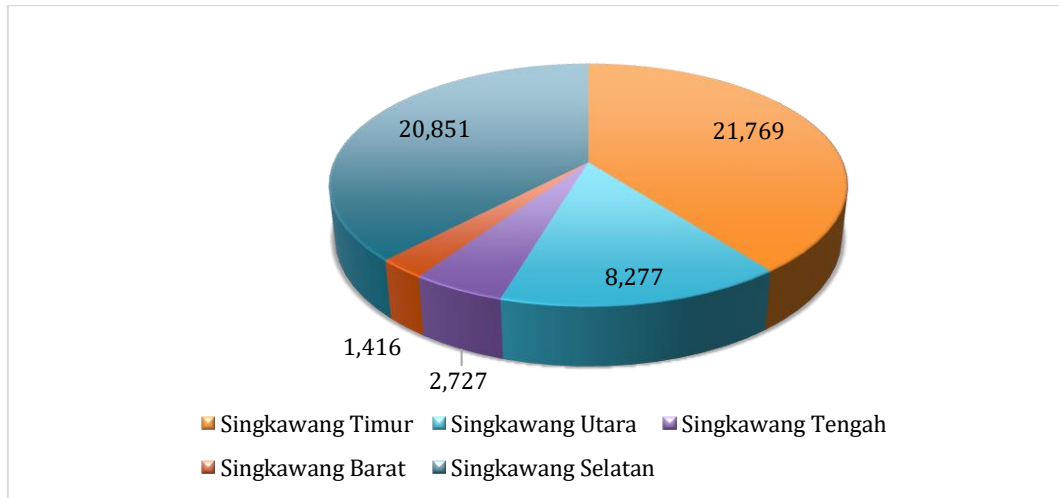
Dari letak geografis tersebut maka posisi wilayah Kota Singkawang mempunyai karakteristik yang terbuka dengan akses yang lebih luas baik terhadap daerah pedalaman (Wilayah Kabupaten Bengkayang maupun Kabupaten Sambas) maupun daerah pesisir pantai mulai dari wilayah Kabupaten Sambas hingga ibukota Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

2. Luas Wilayah

Kota Singkawang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 26 kelurahan dengan luas wilayah 55.018 Ha. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan (20.851 Ha atau 39,55 persen) dan terkecil adalah kecamatan Singkawang Barat (1.416 Ha atau 2,57 persen) dari wilayah kota.

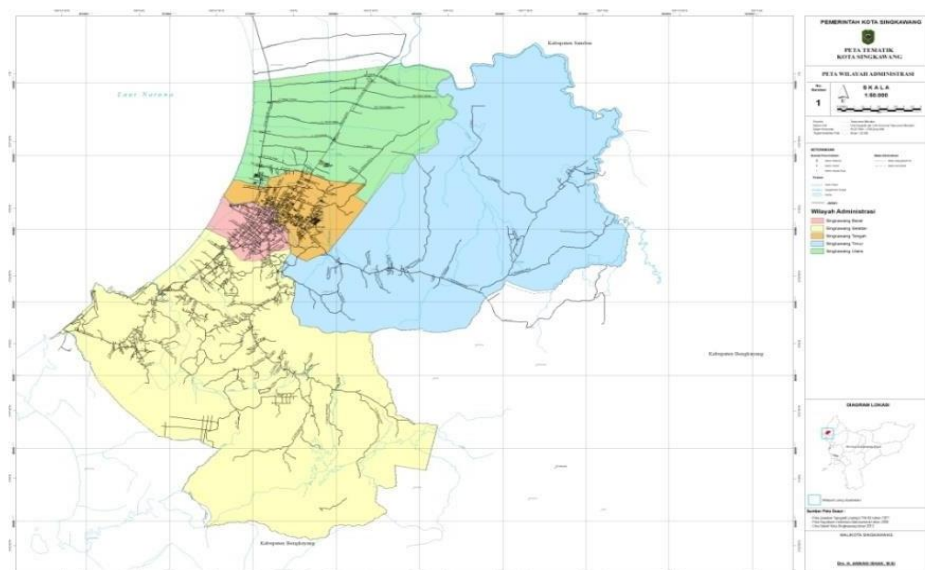


Gambar 1.1
Luas Wilayah Kota Singkawang (dalam Ha)



Sumber : Dinas PUPR Kota Singkawang, diolah, 2023

Gambar 1.2
Peta Administrasi Kota Singkawang



Sumber : Dinas PUPR Kota Singkawang, diolah, 2023



3. Topografis

Berdasarkan topografi, wilayah Kota Singkawang sebagian besar merupakan dataran rendah antara 50 meter s/d 100 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya merupakan daerah hamparan dan berbukit serta sebelah Barat berada pada pesisir laut. Wilayah Kota Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 31.904 hektar, tersebar di 5 kecamatan, sedangkan bukit dan gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan.

Tinggi wilayah di atas permukaan laut (dpl) menurut kecamatan di Kota Singkawang di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL)
menurut Kecamatan di Kota Singkawang

No.	Kecamatan	Tinggi (m)
(1)	(2)	(3)
1.	Singkawang Selatan	<500
2.	Singkawang Timur	>700
3.	Singkawang Utara	<500
4.	Singkawang Barat	<500
5.	Singkawang Tengah	<500

Sumber: BPS Kota Singkawang 2023

Dilihat dari tekstur tanah, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang terdiri dari jenis tanah halus yang meliputi areal 24.238 hektar (48,09 persen), berikutnya jenis tanah sedang 18.496 hektar (36,70 persen), jenis tanah kasar 3.168 hektar (6,29 persen), jenis tanah gambut 3.940 hektar



(7,82 persen), jenis tanah rawa 256 (0,51 persen) dan jenis tanah lainnya 302 hektar (0,60 persen).

Dari lima jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang sebagian besar merupakan tanah Alluvial (25.338 Ha), sedangkan yang terkecil adalah tanah Latosol (2.988 Ha). Beberapa jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

- **Organosol** yaitu tanah yang tersusun dari bahan organik/campuran bahan mineral dan bahan organik. Jenis tanah ini mudah mengerut tak balik dan bila kering pekat terhadap erosi serta mudah terbakar. Terdapat seluas 3.752 ha atau sekitar 7,44 persen dari total wilayah kota.
- **Alluvial** yaitu jenis tanah yang berwarna kelabu, coklat sampai hitam, mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan cocok digunakan untuk usaha budidaya pertanian, dan terbentuk dari endapan laut, sungai dan danau terdapat seluas 25.338 ha atau 50,27 persen dari total wilayah kota.
- **Podsol** yaitu tanah yang bersifat basa dengan tingkat kejenuhan yang rendah, berwarna kuning putih, pada umumnya bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan serta termasuk miskin unsur hara. Terdapat 14.276 ha atau 28,33 persen dari total wilayah kota.
- **Latosol** yaitu jenis tanah yang memiliki solusi tanah yang tebal antara 130-200 cm, berwarna coklat, merah sampai kekuning-kuningan. Tanah ini sangat peka terhadap erosi tetapi sangat potensial dikembangkan sebagai usaha pertanian. Terdapat seluas 2.988 ha atau 5,93 persen dari total wilayah kota.
- **PMK (Podsolid Merah Kuning)** yaitu jenis tanah ini berwarna kuning merah, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet dan ladang dengan luas 4.046 ha atau 8,03 persen dari total luas wilayah kota

Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan



sawah irigasi non teknis (12,92 persen). Dari 50.400 hektar luas wilayah Kota Singkawang, areal untuk pemukiman hanya 358 hektar (0,71 persen), sementara areal untuk industri merupakan yang areal yang paling kecil yaitu hanya sekitar 10 hektar (0,02 persen). Areal-areal yang lain adalah berupa padang/semak (10,73 persen), hutan belukar (6,51 persen), kebun campuran (5,22 persen), pertambangan (2,61 persen), dan lain-lain (0,50 persen).

Secara umum wilayah Kota Singkawang beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 22,75 °C sampai dengan 33,60 °C. Iklim tropis di wilayah Kota Singkawang termasuk klasifikasi iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata 2.599 mm/Tahun atau 216,58 mm/bulan. Jumlah rata-rata hari hujan 198 hari/Tahun atau rata-rata 17 hari hujan/bulan. Rata-rata kelembaban udara di Kota Singkawang adalah 85,25%. Curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan November sampai dengan Maret dan curah hujan terendah antara bulan April sampai dengan September. Kota Singkawang memiliki wilayah datar dan sebagian besar merupakan dataran rendah antara 50 meter s/d 100 meter di atas permukaan laut. Kota Singkawang yang terletak pada 0° LS dan 109° BT, wilayahnya merupakan daerah hamparan dan berbukit serta sebelah Barat berada pada pesisir laut

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, seperti yang tercantum dalam Propenas bahwa manusia Indonesia atau penduduk disebut sebagai modal dasar disamping modal dasar lainnya, apabila mereka dapat dibina serta dikerahkan secara efektif. Namun penduduk juga dapat menjadi beban pembangunan apabila tidak diseimbangkan dengan kualitas, baik kualitas pendidikan, kesehatan mental maupun fisik. Karena itu penduduk yang banyak bukan merupakan jaminan bagi tercapainya keberhasilan pembangunan suatu daerah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, jumlah penduduk Kota Singkawang s/d 31 Juni 2023 sebanyak 242.146 jiwa. Terdiri dari laki-laki berjumlah 123.755 jiwa atau 51% dan



perempuan berjumlah 118.391 jiwa atau 49 % dari total penduduk dengan rinciannya per-Kecamatan sebagai berikut:

TABEL 1.1
DATA AGREGAT PENDUDUK KOTA SINGKAWANG
BERDASARKAN JENIS KELAMIN PERIODE 31 DESEMBER 2023

KODE	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
61.72	KOTA SINGKAWANG	125.039	119.667	244.706
61.72.01	SINGKAWANG TENGAH	36.961	36.302	73.263
61.72.01.1001	ROBAN	17.269	16.712	33.981
61.72.01.1002	CONDONG	4.941	4.871	9.812
61.72.01.1003	SEKIP LAMA	4.951	5.014	9.965
61.72.01.1004	JAWA	2.215	2.285	4.500
61.72.01.1005	BUKIT BATU	3.871	3.792	7.663
61.72.01.1006	SUNGAI WIE	3.714	3.628	7.342
61.72.02	SINGKAWANG BARAT	27.466	26.556	54.022
61.72.02.1001	PASIRAN	17.008	16.316	33.324
61.72.02.1002	MELAYU	5.068	5.004	10.072
61.72.02.1003	TENGAH	986	944	1.930
61.72.02.1004	KUALA	4.404	4.292	8.696
61.72.03	SINGKAWANG TIMUR	12.852	11.739	24.591
61.72.03.1001	PAJINTAN	4.408	4.073	8.481
61.72.03.1002	NYARUMKOP	2.215	1.977	4.192
61.72.03.1003	MAYA SOPA	2.909	2.696	5.605
61.72.03.1004	BAGAK SAHWA	1.509	1.380	2.889
61.72.03.1005	SANGGAU KULOR	1.811	1.613	3.424
61.72.04	SINGKAWANG UTARA	17.814	17.359	35.173
61.72.04.1001	SUNGAI GARAM HILIR	3.154	3.139	6.293
61.72.04.1002	NARAM	1.991	1.965	3.956
61.72.04.1003	SUNGAI BULAN	2.181	2.172	4.353
61.72.04.1004	SUNGAI RASAU	1.657	1.615	3.272
61.72.04.1005	SETAPUK KECIL	1.952	1.899	3.851
61.72.04.1006	SETAPUK BESAR	4.287	4.100	8.387
61.72.04.1007	SEMELAGI KECIL	2.592	2.469	5.061
61.72.05	SINGKAWANG SELATAN	29.946	27.711	57.657
61.72.05.1001	SEDAU	19.222	17.839	37.061
61.72.05.1002	SAGATANI	1.929	1.771	3.700
61.72.05.1003	SIJANGKUNG	6.261	5.651	11.912
61.72.05.1004	PANGMILANG	2.534	2.450	4.984

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Kepadatan penduduk Kota Singkawang Tahun 2023 berdasarkan komposisi kepadatan penduduk Kota Singkawang Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK
PER KECAMATAN KOTA SINGKAWANG PER DESEMBER 2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK (orgHa)
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	(Ha)	
1	SINGKAWANG TENGAH	ROBAN	17.269	16.712	20,00	1.699
		CONDONG	4.941	4.871	2,00	4.906
		SEKIP LAMA	4.951	5.014	0,75	13.287
		JAWA	2.215	2.285	2,18	2.064
		BUKIT BATU	3.871	3.792	3,62	2.117
		SUNGAI WIE	3.714	3.628	3,02	2.431
		Sub Jumlah	36.961	36.302	31,57	2.321
2	SINGKAWANG BARAT	PASIRAN	17.008	16.316	7,20	4.628
		MELAYU	5.068	5.004	1,41	7.143
		TENGAH	986	944	0,18	10.722
		KUALA	4.404	4.292	6,25	1.391
		Sub Jumlah	27.466	26.556	15,04	3.592
3	SINGKAWANG TIMUR	PAJINTAN	4.408	4.073	17,91	474
		NYARUMKOP	2.215	1.977	24,73	170
		MAYA SOPA	2.909	2.696	70,64	79
		BAGAK SAHWA	1.509	1.380	22,61	128
		SANGGAU KULOR	1.811	1.613	30,38	113
		Sub Jumlah	12.852	11.739	166,27	148
4	SINGKAWANG UTARA	SUNGAI GARAM HILIR	3.154	3.139	4,24	1.484
		NARAM	1.991	1.965	9,54	415
		SUNGAI BULAN	2.181	2.172	6,36	684
		SUNGAI RASAU	1.657	1.615	6,36	514
		SETAPUK KECIL	1.952	1.899	8,48	454
		SETAPUK BESAR	4.287	4.100	14,45	580
		SEMELAGI KECIL	2.592	2.469	17,24	294
		Sub Jumlah	17.814	17.359	66,67	528
5	SINGKAWANG SELATAN	SEDAU	19.222	17.839	101,55	365
		SAGATANI	1.929	1.771	70,64	52
		SIJANGKUNG	6.261	5.651	33,91	351
		PANGMILANG	2.534	2.450	18,37	271
		Sub Jumlah	29.946	27.711	224,47	257
KOTA SINGKAWANG			97.573	119.667	504,02	6.845

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.3
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Umur Tunggal 0-15 Tahun

KODE	WILAYAH	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
6172	KOTA SINGKAWANG	3,065	3,726	4,003	4,317	4,344	4,588	4,431	4,462	4,563	4,780	4,659	4,977	4,642	4,667	4,542	4,493
617201	SINGKAWANG TENGAH	891	1,132	1,189	1,334	1,284	1,379	1,367	1,287	1,389	1,395	1,359	1,455	1,293	1,414	1,362	1,329
6172011001	ROBAN	396	563	559	599	609	649	620	571	637	628	639	674	610	640	630	605
6172011002	CONDONG	109	132	127	170	132	159	150	167	183	187	172	178	168	165	167	179
6172011003	SEKIP LAMA	124	136	161	181	172	195	185	194	187	189	178	217	157	235	183	179
6172011004	JAWA	48	51	74	83	78	77	82	70	76	96	79	73	96	70	100	93
6172011005	BUKIT BATU	116	142	149	172	154	160	195	155	156	156	147	165	126	160	149	145
6172011006	SUNGAI WIE	98	108	119	129	139	139	135	130	150	139	144	148	136	144	133	128
617202	SINGKAWANG BARAT	549	689	725	798	841	878	864	915	929	935	897	1,065	966	928	935	953
6172021001	PASIRAN	370	421	458	486	529	557	552	574	562	586	539	651	599	562	542	583
6172021002	MELAYU	71	101	100	125	127	137	133	161	159	152	155	192	167	176	176	169
6172021003	TENGAH	15	26	30	32	31	35	34	27	46	32	32	42	28	33	36	37
6172021004	KUALA	93	141	137	155	154	149	145	153	162	165	171	180	172	157	181	164
617203	SINGKAWANG TIMUR	344	422	432	439	441	517	462	453	469	510	535	510	522	488	483	496
6172031001	PAJINTAN	133	144	135	174	136	172	162	158	166	169	172	159	184	162	148	150
6172031002	NYARUMKOP	50	65	75	63	76	88	70	74	72	84	88	83	82	81	79	87
6172031003	MAYA SOPA	78	114	112	104	107	125	101	109	118	111	126	136	127	106	103	121
6172031004	BAGAK SAHWA	38	48	47	47	51	67	66	47	54	64	58	58	54	51	70	65
6172031005	SANGGAU KULOR	45	51	63	51	71	65	63	65	59	82	91	74	75	88	83	73
617204	SINGKAWANG UTARA	529	614	690	706	724	753	657	673	692	750	718	745	669	689	647	644
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	102	112	108	132	126	131	133	101	134	151	120	143	99	122	124	96
6172041002	NARAM	58	70	87	110	75	87	62	86	85	92	85	80	79	65	69	85
6172041003	SUNGAI BULAN	71	83	83	97	87	104	80	81	85	80	85	91	91	89	68	83
6172041004	SUNGAI RASAU	37	68	78	63	75	74	64	72	75	70	63	66	61	59	64	51
6172041005	SETAPUK KECIL	62	77	75	67	89	83	80	73	70	83	81	85	71	79	74	58
6172041006	SETAPUK BESAR	121	125	162	139	163	158	148	160	148	170	187	154	164	175	152	169
6172041007	SEMELAGI KECIL	78	79	97	98	109	116	90	100	95	104	97	126	104	100	96	102
617205	SINGKAWANG SELATAN	752	869	967	1,040	1,054	1,061	1,081	1,134	1,084	1,190	1,150	1,202	1,192	1,148	1,115	1,071
6172051001	SEDAU	493	568	617	649	674	649	683	724	682	730	719	781	763	693	712	676
6172051002	SAGATANI	54	56	64	73	66	90	74	78	75	94	75	80	66	90	68	67
6172051003	SIJANGKUNG	144	176	195	226	200	228	232	228	222	258	247	246	268	252	230	242
6172051004	PANGMILANG	61	69	91	92	114	94	92	104	105	108	109	95	95	113	105	86

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.4
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Umur Tunggal 16- 31 Tahun

KODE	WILAYAH	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
6172	KOTA SINGKAWANG	3,835	3,892	3,706	4,051	4,267	4,487	4,267	4,428	4,209	4,058	4,158	4,134	4,329	4,163	4,070	3,980
617201	SINGKAWANG TENGAH	1,165	1,184	1,065	1,194	1,255	1,315	1,307	1,300	1,303	1,234	1,242	1,310	1,244	1,223	1,102	1,157
6172011001	ROBAN	530	546	500	544	606	627	605	586	612	547	611	649	599	600	566	557
6172011002	CONDONG	150	158	153	149	173	167	175	195	180	169	154	163	159	138	128	139
6172011003	SEKIP LAMA	165	157	130	154	173	171	183	173	162	177	166	160	168	158	119	128
6172011004	JAWA	86	69	81	82	63	69	74	58	83	85	63	75	60	64	63	75
6172011005	BUKIT BATU	120	126	101	117	132	153	134	142	142	116	124	135	132	144	118	143
6172011006	SUNGAI WIE	114	128	100	148	108	128	136	146	124	140	124	128	126	119	108	115
617202	SINGKAWANG BARAT	826	837	798	895	911	948	931	969	875	902	930	919	960	975	933	872
6172021001	PASIRAN	517	511	486	536	560	599	563	586	565	541	596	605	624	645	614	550
6172021002	MELAYU	155	158	157	172	169	144	162	188	143	164	148	143	157	155	170	164
6172021003	TENGAH	28	29	30	35	33	33	46	30	33	34	30	26	33	25	31	24
6172021004	KUALA	126	139	125	152	149	172	160	165	134	163	156	145	146	150	118	134
617203	SINGKAWANG TIMUR	391	393	386	391	433	452	444	484	430	390	388	391	410	399	424	401
6172031001	PAJINTAN	124	120	118	142	140	146	154	188	161	131	144	151	151	157	164	183
6172031002	NYARUMKOP	70	72	76	59	87	79	96	71	75	65	83	60	59	60	69	43
6172031003	MAYA SOPA	93	101	87	89	103	99	85	103	100	94	80	84	88	98	77	77
6172031004	BAGAK SAHWA	37	42	47	45	46	64	44	55	35	46	37	34	54	42	48	32
6172031005	SANGGAU KULOR	67	58	58	56	57	64	65	67	59	54	44	62	58	42	66	66
617204	SINGKAWANG UTARA	531	544	509	575	579	669	615	575	607	541	594	537	593	579	558	587
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	101	97	87	106	96	101	100	98	104	87	101	98	105	99	106	110
6172041002	NARAM	55	67	59	48	70	63	72	56	54	67	80	62	72	70	61	89
6172041003	SUNGAI BULAN	75	59	65	65	69	84	64	74	58	76	66	66	82	95	93	78
6172041004	SUNGAI RASAU	45	34	44	51	54	59	64	48	65	56	47	51	65	58	57	45
6172041005	SETAPUK KECIL	44	57	44	69	57	75	59	55	74	53	78	52	72	72	50	80
6172041006	SETAPUK BESAR	128	158	121	134	158	198	165	160	171	129	122	122	118	105	109	111
6172041007	SEMELAGI KECIL	83	72	89	102	75	89	91	84	81	73	100	86	79	80	82	74
617205	SINGKAWANG SELATAN	922	934	948	996	1,089	1,103	970	1,100	994	991	1,004	977	1,122	987	1,053	963
6172051001	SEDAU	587	591	593	613	702	706	622	681	617	653	657	633	743	636	688	643
6172051002	SAGATANI	52	64	59	69	79	78	71	76	77	59	68	76	74	67	54	56
6172051003	SUANGKUNG	198	195	216	208	201	226	191	245	200	190	193	190	222	214	242	192
6172051004	PANGMILANG	85	84	80	106	107	93	86	98	100	89	86	78	83	70	69	72

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.5
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Umur Tunggal 32-47 Tahun

KODE	WILAYAH	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
6172	KOTA SINGKAWANG	3,892	4,267	4,055	3,854	3,826	3,756	3,949	3,679	3,640	3,695	3,432	3,906	3,258	3,025	2,851	2,933
617201	SINGKAWANG TENGAH	1,119	1,181	1,117	1,111	1,120	1,131	1,178	1,081	1,043	1,065	1,030	1,149	1,006	949	872	957
617201001	ROBAN	533	556	527	532	555	496	526	493	454	465	462	539	442	436	398	415
617201002	CONDONG	146	159	160	148	145	149	151	147	127	142	135	155	146	133	114	149
617201003	SEKIP LAMA	149	128	140	148	149	161	173	153	159	157	149	154	122	127	137	116
617201004	JAWA	46	67	72	59	63	85	78	68	59	73	65	64	78	47	48	58
617201005	BUKIT BATU	140	162	119	125	105	120	127	121	128	122	101	113	101	99	95	105
617201006	SUNGAI WIE	105	109	99	99	103	120	123	99	116	106	118	124	117	107	80	114
617202	SINGKAWANG BARAT	843	971	944	912	847	866	861	821	851	851	782	876	688	627	588	647
617202001	PASIRAN	526	627	584	568	497	549	524	509	488	500	472	524	412	389	366	410
617202002	MELAYU	150	154	176	171	187	173	165	149	180	173	157	176	161	124	108	112
617202003	TENGAH	27	28	29	27	37	24	28	28	27	30	29	33	25	23	27	28
617202004	KUALA	140	162	155	146	126	120	144	135	156	148	124	143	90	91	87	97
617203	SINGKAWANG TIMUR	424	416	425	356	388	360	398	369	335	391	328	411	338	294	297	284
617203001	PAJINTAN	182	170	164	121	134	127	128	115	124	126	132	123	119	85	81	88
617203002	NYARUMKOP	60	69	64	74	62	53	68	72	60	63	48	68	50	47	55	49
617203003	MAYA SOPA	72	78	96	80	81	87	99	83	77	89	68	104	82	71	76	73
617203004	BAGAK SAHWA	58	49	58	46	57	36	52	38	38	54	33	59	37	47	44	36
617203005	SANGGAU KULOR	52	50	43	35	54	57	51	61	36	59	47	57	50	44	41	38
617204	SINGKAWANG UTARA	579	625	618	541	538	513	577	543	533	546	511	574	466	474	446	439
617204001	SUNGAI GARAM HILIR	115	129	120	102	117	109	124	96	93	95	96	95	72	76	66	65
617204002	NARAM	74	84	74	70	89	60	61	67	62	68	62	57	44	52	41	41
617204003	SUNGAI BULAN	75	92	82	66	65	66	62	71	75	55	69	72	53	58	56	56
617204004	SUNGAI RASAU	50	51	65	47	45	51	46	52	38	54	49	53	40	43	42	33
617204005	SETAPUK KECIL	68	78	87	64	57	53	62	66	61	52	49	59	49	52	38	40
617204006	SETAPUK BESAR	119	120	102	107	97	108	129	120	129	142	130	142	132	129	130	134
617204007	SEMELAGI KECIL	78	71	88	85	68	66	93	71	75	80	56	96	76	64	73	70
617205	SINGKAWANG SELATAN	927	1,074	951	934	933	886	935	865	878	842	781	896	760	681	648	606
617205001	SEDAU	596	713	620	609	614	568	602	559	571	553	530	570	471	420	401	377
617205002	SAGATANI	55	68	63	68	51	60	59	61	47	51	41	49	53	53	45	42
617205003	SIJANGKUNG	196	218	189	196	190	184	202	187	180	170	152	203	163	139	124	113
617205004	PANGMILANG	80	75	79	61	78	74	72	58	80	68	58	74	73	69	78	74

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.6
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Umur Tunggal 48-63 Tahun

KODE	WILAYAH	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
6172	KOTA SINGKAWANG	3,061	2,713	2,537	2,563	2,122	2,483	2,372	2,272	1,912	1,830	2,005	1,664	1,474	2,044	1,634	1,878
617201	SINGKAWANG TENGAH	959	846	798	852	694	791	785	730	602	651	649	609	521	621	490	543
6172011001	ROBAN	393	377	326	401	332	393	345	346	284	301	313	295	244	313	233	258
6172011002	CONDONG	135	106	132	118	91	95	116	104	77	103	96	81	80	89	78	81
6172011003	SEKIP LAMA	149	129	122	128	104	111	110	99	86	88	98	90	85	74	71	58
6172011004	JAWA	60	58	64	51	50	55	48	38	42	44	43	43	36	45	35	49
6172011005	BUKIT BATU	100	92	66	74	54	60	71	60	63	55	50	40	38	47	23	52
6172011006	SUNGAI WIE	122	84	88	80	63	77	95	83	50	60	49	60	38	53	50	45
617202	SINGKAWANG BARAT	650	603	553	568	479	549	553	547	474	405	468	389	349	580	478	467
6172021001	PASIRAN	406	362	331	352	292	329	351	347	295	257	269	235	208	355	273	302
6172021002	MELAYU	119	122	106	110	93	104	108	95	87	77	93	77	65	126	112	94
6172021003	TENGAH	35	30	24	23	19	29	21	15	24	12	20	14	24	14	16	9
6172021004	KUALA	90	89	92	83	75	87	73	90	68	59	86	63	52	85	77	62
617203	SINGKAWANG TIMUR	314	278	218	234	187	215	230	222	181	169	185	164	128	195	135	176
6172031001	PAJINTAN	97	95	64	69	53	68	73	71	65	63	39	55	42	84	52	60
6172031002	NYARUMKOP	63	44	40	51	45	39	50	39	36	32	42	35	27	33	27	35
6172031003	MAYA SOPA	74	68	58	54	34	54	53	45	39	31	52	39	27	37	20	37
6172031004	BAGAK SAHWA	37	33	24	29	27	20	30	34	14	21	35	17	19	18	17	19
6172031005	SANGGAU KULOR	43	38	32	31	28	34	24	33	27	22	17	18	13	23	19	25
617204	SINGKAWANG UTARA	444	407	380	354	301	334	301	305	272	244	275	205	221	229	169	227
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	78	66	57	63	49	63	53	49	58	55	53	37	39	53	39	37
6172041002	NARAM	35	38	37	28	27	29	26	33	23	27	27	25	16	26	14	28
6172041003	SUNGAI BULAN	53	43	42	44	41	46	39	37	33	27	38	30	21	22	27	22
6172041004	SUNGAI RASAU	41	44	37	41	31	38	28	31	28	22	15	19	17	25	16	28
6172041005	SETAPUK KECIL	45	39	49	34	36	33	39	35	20	28	35	21	28	25	22	17
6172041006	SETAPUK BESAR	127	122	95	103	83	81	80	83	65	51	73	46	63	50	33	60
6172041007	SEMELAGI KECIL	65	55	63	41	34	44	36	37	45	34	34	27	37	28	18	35
617205	SINGKAWANG SELATAN	694	579	588	555	461	594	503	468	383	361	428	297	255	419	362	465
6172051001	SEDAU	449	368	367	350	295	377	302	295	254	239	287	185	158	290	244	321
6172051002	SAGATANI	58	28	34	35	22	35	41	37	22	20	27	19	19	16	11	14
6172051003	SIJANGKUNG	115	124	128	108	99	116	87	94	75	68	74	60	51	90	85	103
6172051004	PANGMILANG	72	59	59	62	45	66	73	42	32	34	40	33	27	23	22	27

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.7
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Umur Tunggal 64-79 Tahun

KODE	WILAYAH	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
6172	KOTA SINGKAWANG	1,486	1,430	1,224	1,276	1,144	1,056	880	878	699	787	546	579	494	450	518	404
617201	SINGKAWANG TENGAH	475	438	382	360	324	336	262	247	198	201	147	157	123	111	114	112
6172011001	ROBAN	203	245	199	180	138	150	128	108	88	86	66	59	66	39	40	50
6172011002	CONDONG	71	52	66	51	63	65	35	41	39	41	37	35	26	21	27	21
6172011003	SEKIP LAMA	66	56	35	48	56	59	38	42	24	24	8	31	12	20	19	19
6172011004	JAWA	38	31	22	23	18	21	21	15	15	17	14	9	7	9	8	4
6172011005	BUKIT BATU	41	24	27	25	21	19	12	14	11	17	8	12	3	16	9	7
6172011006	SUNGAI WIE	56	30	33	33	28	22	28	27	21	16	14	11	9	6	11	11
617202	SINGKAWANG BARAT	377	376	307	369	320	278	230	250	227	188	192	183	173	147	177	141
6172021001	PASIRAN	226	223	166	235	209	165	133	132	138	109	108	127	111	80	102	83
6172021002	MELAYU	90	86	75	77	71	63	57	65	49	43	57	44	48	46	50	33
6172021003	TENGAH	12	16	10	8	7	13	12	14	2	6	3	1	1	3	6	5
6172021004	KUALA	49	51	56	49	33	37	28	39	38	30	24	11	13	18	19	20
617203	SINGKAWANG TIMUR	152	142	118	128	94	85	81	92	62	76	36	44	31	41	53	25
6172031001	PAJINTAN	53	42	39	42	33	29	27	31	32	27	17	20	14	19	19	9
6172031002	NYARUMKOP	28	29	19	35	19	15	18	17	4	13	3	9	1	3	8	2
6172031003	MAYA SOPA	39	35	28	22	15	26	17	17	8	18	8	6	11	8	17	4
6172031004	BAGAK SAHWA	18	15	18	9	18	8	16	9	8	6	1	4	3	4	4	4
6172031005	SANGGAU KULOR	14	21	14	20	9	7	3	18	10	12	7	5	2	7	5	6
617204	SINGKAWANG UTARA	184	186	159	152	131	128	104	111	64	129	67	75	54	46	76	39
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	49	37	26	31	18	20	17	21	18	13	13	14	8	8	10	8
6172041002	NARAM	18	16	18	15	12	16	9	8	5	14	5	9	8	5	10	3
6172041003	SUNGAI BULAN	16	23	14	11	17	6	10	9	5	15	5	9	8	3	8	8
6172041004	SUNGAI RASAU	13	17	13	16	11	14	6	12	5	13	7	7	5	7	3	1
6172041005	SETAPUK KECIL	28	16	15	19	16	17	10	17	8	8	5	8	4	1	7	4
6172041006	SETAPUK BESAR	35	55	42	42	35	29	32	33	19	38	17	16	12	12	28	10
6172041007	SEMELAGI KECIL	25	22	31	18	22	26	20	11	4	28	15	12	9	10	10	5
617205	SINGKAWANG SELATAN	298	288	258	267	275	229	203	178	148	193	104	120	113	105	98	87
6172051001	SEDAU	196	204	178	173	177	152	143	114	106	145	80	85	75	78	72	52
6172051002	SAGATANI	16	14	12	13	15	7	10	6	8	8	2	6	5	2	3	7
6172051003	SUANGKUNG	72	43	52	63	62	49	39	47	26	31	16	28	29	23	16	25
6172051004	PANGMILANG	14	27	16	18	21	21	11	11	8	9	6	1	4	2	7	3

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.8
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Umur Tunggal 80-95 Tahun

KODE	WILAYAH	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
6172	KOTA SINGKAWANG	312	301	237	269	269	148	129	93	100	51	36	35	26	25	4	11
617201	SINGKAWANG TENGAH	87	88	71	80	80	46	36	22	25	10	15	9	7	7	2	4
6172011001	ROBAN	35	36	30	35	35	20	15	9	14	5	6	3	2	3	1	1
6172011002	CONDONG	27	21	14	20	20	12	9	4	3	2	5	1	4	0	1	0
6172011003	SEKIP LAMA	9	13	9	8	8	6	6	4	3	2	1	1	1	0	0	0
6172011004	JAWA	6	6	7	4	4	2	3	1	1	1	0	2	0	1	0	1
6172011005	BUKIT BATU	5	5	5	7	7	3	2	2	3	0	2	1	0	2	0	1
6172011006	SUNGAI WIE	5	7	6	6	6	3	1	2	1	0	1	1	0	1	0	1
617202	SINGKAWANG BARAT	105	100	82	71	71	40	50	43	34	15	11	8	5	8	1	4
6172021001	PASIRAN	63	63	58	49	49	21	25	26	14	11	6	5	2	7	1	3
6172021002	MELAYU	26	18	16	14	14	16	14	14	11	4	4	3	3	0	0	1
6172021003	TENGAH	1	3	3	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021004	KUALA	15	16	5	8	8	2	8	2	9	0	1	0	0	1	0	0
617203	SINGKAWANG TIMUR	23	34	18	18	18	11	10	4	11	3	1	2	2	2	1	0
6172031001	PAJINTAN	14	6	9	6	6	5	4	1	5	1	1	0	2	0	0	0
6172031002	NYARUMKOP	2	7	3	2	2	0	2	3	1	0	0	1	0	1	0	0
6172031003	MAYA SOPA	5	11	1	5	5	1	1	0	4	1	0	1	0	0	0	0
6172031004	BAGAK SAHWA	1	4	0	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0
6172031005	SANGGAU KULOR	1	6	5	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
617204	SINGKAWANG UTARA	35	28	21	30	30	13	7	5	8	7	3	5	0	3	0	2
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	4	3	6	5	5	1	2	1	0	3	0	3	0	0	0	0
6172041002	NARAM	2	4	2	3	3	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1
6172041003	SUNGAI BULAN	3	5	5	0	0	3	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0
6172041004	SUNGAI RASAU	2	4	1	6	6	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
6172041005	SETAPUK KECIL	6	1	2	6	6	4	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0
6172041006	SETAPUK BESAR	12	6	1	8	8	4	0	2	1	2	1	1	0	1	0	1
6172041007	SEMELAGI KECIL	6	5	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
617205	SINGKAWANG SELATAN	62	51	45	70	70	38	26	19	22	16	6	11	12	5	0	1
6172051001	SEDAU	40	39	32	57	57	22	17	13	15	12	5	9	7	3	0	0
6172051002	SAGATANI	5	1	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
6172051003	SUANGKUNG	15	10	11	11	11	11	7	4	5	3	0	2	4	1	0	1
6172051004	PANGMILANG	0	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.9
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Umur Tunggak 96-111 Tahun

KODE	WILAYAH	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
6172	KOTA SINGKAWANG	8	4	7	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
617201	SINGKAWANG TENGAH	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
617201001	ROBAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
617201002	CONDONG	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617201003	SEKIP LAMA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617201004	JAWA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617201005	BUKIT BATU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617201006	SUNGAI WIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617202	SINGKAWANG BARAT	2	1	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021001	PASIRAN	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021002	MELAYU	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021003	TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021004	KUALA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617203	SINGKAWANG TIMUR	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031001	PAJINTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031002	NYARUMKOP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031003	MAYA SOPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031004	BAGAK SAHWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031005	SANGGAU KULOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617204	SINGKAWANG UTARA	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041002	NARAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041003	SUNGAI BULAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041004	SUNGAI RASAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041005	SETAPUK KECIL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041006	SETAPUK BESAR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041007	SEMELAGI KECIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617205	SINGKAWANG SELATAN	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6172051001	SEDAU	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6172051002	SAGATANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172051003	SUJANGKUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172051004	PANGMILANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.10
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Umur Pekerja

KODE	WILAYAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	MENGURUS RUMAH TANGGA	PELAJAR/MAHASISWA	PENSIUNAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	KEPOLISIAN RI (POLRI)	PERDAGANGAN	PETANI/PEKEBUN	PETERNAK
6172	KOTA SINGKAWANG	75,780	48,144	38,518	2,161	5,507	1,375	866	162	9,096	18
617201	SINGKAWANG TENGAH	22,212	13,994	11,900	1,250	2,948	702	455	44	707	1
6172011001	ROBAN	10,506	6,608	5,364	546	1,241	309	189	15	329	0
6172011002	CONDONG	2,795	1,913	1,649	137	248	29	52	16	51	0
6172011003	SEKIP LAMA	2,984	1,838	1,639	230	524	94	76	5	93	7,483
6172011004	JAWA	1,249	751	829	147	230	12	31	2	33	0
6172011005	BUKIT BATU	2,544	1,549	1,150	71	276	227	42	3	98	0
6172011006	SUNGAI WIE	2,134	1,335	1,269	119	429	31	65	3	103	0
617202	SINGKAWANG BARAT	15,213	9,979	9,170	461	933	90	140	66	418	2
6172021001	PASIRAN	9,463	5,935	5,685	305	577	70	88	36	228	2
6172021002	MELAYU	2,607	1,968	1,757	47	78	5	17	27	24	0
6172021003	TENGAH	528	354	334	43	99	9	8	2	7	0
6172021004	KUALA	2,615	1,722	1,394	66	179	6	27	1	159	0
617203	SINGKAWANG TIMUR	8,386	5,138	3,500	99	296	229	28	10	3,058	0
6172031001	PAJINTAN	2,834	1,745	1,219	35	92	202	14	3	387	0
6172031002	NYARUMKOP	1,411	868	639	28	98	15	3	3	635	0
6172031003	MAYA SOPA	1,938	1,315	695	8	20	0	1	1	1,205	1
6172031004	BAGAK SAHWA	930	515	473	22	78	6	7	3	399	1
6172031005	SANGGAU KULOR	1,273	695	474	6	8	6	3	0	432	0
617204	SINGKAWANG UTARA	11,254	7,243	4,895	190	839	99	123	15	2,290	2
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	1,908	1,080	1,042	87	369	23	57	2	91	1
6172041002	NARAM	1,319	757	547	29	126	24	28	1	106	0
6172041003	SUNGAI BULAN	1,343	868	681	32	140	29	22	1	187	0
6172041004	SUNGAI RASAU	1,059	720	433	12	50	11	4	2	134	1
6172041005	SETAPUK KECIL	1,285	858	458	13	60	3	6	1	189	0
6172041006	SETAPUK BESAR	2,679	1,762	1,070	10	62	7	5	7	1,057	0
6172041007	SEMELAGI KECIL	1,661	1,198	664	7	32	2	1	1	526	0
617205	SINGKAWANG SELATAN	18,715	11,790	9,053	161	491	255	120	27	2,623	11
6172051001	SEDAU	11,923	7,620	5,757	133	380	244	49	15	722	7
6172051002	SAGATANI	1,257	770	590	2	4	1	0	0	707	0
6172051003	SIJANGKUNG	3,875	2,348	1,961	16	72	4	70	12	512	3
6172051004	PANGMILANG	1,660	1,052	745	10	35	6	1	0	682	1

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.11
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Pekerjaan

KODE	WILAYAH	NELAYAN/ PERIKANAN	INDUSTRI	KONSTRUKSI	TRANSPORTASI	KARYAWAN SWASTA	KARYAWAN BUMN	KARYAWAN BUMD	KARYAWAN HONORER	BURUH HARIAN LEPAS	BURUH TANI/ PERKEBUNAN
6172	KOTA SINGKAWANG	701	7	25	15	4,347	389	102	747	3,019	248
617201	SINGKAWANG TENGAH	84	1	14	4	1,126	232	72	361	604	32
6172011001	ROBAN	15	0	4	1	453	87	29	136	306	18
6172011002	CONDONG	12	0	1	1	180	22	6	39	73	3
6172011003	SEKIP LAMA	6	0	3	2	166	39	14	61	81	4
6172011004	JAWA	14	0	0	0	93	16	5	24	33	0
6172011005	BUKIT BATU	10	0	1	0	107	29	11	50	39	5
6172011006	SUNGAI WIE	27	1	5	0	127	39	7	51	72	2
617202	SINGKAWANG BARAT	260	3	4	5	1,349	62	13	91	670	14
6172021001	PASIRAN	24	0	2	2	783	38	8	50	467	10
6172021002	MELAYU	27	0	2	2	336	7	2	6	47	2
6172021003	TENGAH	10	0	0	0	24	8	2	14	5	0
6172021004	KUALA	199	3	0	1	206	9	1	21	151	2
617203	SINGKAWANG TIMUR	5	0	2	1	306	9	6	60	146	94
6172031001	PAJINTAN	2	0	0	0	150	3	3	17	55	8
6172031002	NYARUMKOP	2	0	0	0	51	1	1	16	15	5
6172031003	MAYA SOPA	1	0	1	0	37	2	1	8	42	74
6172031004	BAGAK SAHWA	0	0	0	1	39	2	0	15	20	5
6172031005	SANGGAU KULOR	0	0	1	0	29	1	1	4	14	2
617204	SINGKAWANG UTARA	172	3	5	2	541	71	9	162	983	60
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	31	1	1	0	142	26	4	41	52	3
6172041002	NARAM	22	0	0	0	64	16	1	45	64	4
6172041003	SUNGAI BULAN	7	0	0	0	83	9	0	35	42	7
6172041004	SUNGAI RASAU	7	1	1	0	47	10	1	15	62	4
6172041005	SETAPUK KECIL	8	0	0	0	58	6	2	8	65	2
6172041006	SETAPUK BESAR	90	0	2	1	101	4	0	14	636	36
6172041007	SEMELAGI KECIL	7	1	1	1	46	0	0	4	62	4
617205	SINGKAWANG SELATAN	180	0	0	3	1,025	15	2	73	616	48
6172051001	SEDAU	178	0	0	3	685	13	2	49	338	24
6172051002	SAGATANI	1	0	0	0	15	0	0	1	8	2
6172051003	SIJANGKUNG	0	0	0	0	255	1	0	9	212	13
6172051004	PANGMILANG	1	0	0	0	70	1	0	14	58	9

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.12
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Pekerjaan

KODE	WILAYAH	BURUH NELAYAN/PERIKA NAN	BURUH PETERNAKAN	PEMBANTU RUMAH TANGGA	TUKANG CUKUR	TUKANG LISTRIK	TUKANG BATU	TUKANG KAYU	TUKANG SOL SEPATU	TUKANG LAS/PANDAI BESI	TUKANG JAHIT	TUKANG GIGI	PENATA RIAS	PENATA BUSANA
6172	KOTA SINGKAWANG	19	3	31	9	4	4	40	2	9	32	2	3	0
617201	SINGKAWANG TENGAH	0	0	13	3	1	1	19	1	2	9	1	1	0
6172011001	ROBAN	0	0	6	1	1	1	2	0	2	4	0	1	0
6172011002	CONDONG	0	0	2	1	0	0	4	0	0	1	1	0	0
6172011003	SEKIP LAMA	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
6172011004	JAWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
6172011005	BUKIT BATU	0	0	1	242	0	0	1	1	0	2	0	0	0
6172011006	SUNGAI WIE	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
617202	SINGKAWANG BARAT	260	0	6	1	1	1	8	0	2	13	1	1	0
6172021001	PASIRAN	24	0	4	1	0	1	4	0	1	8	0	1	0
6172021002	MELAYU	27	0	1	0	0	0	1	0	1	3	1	0	0
6172021003	TENGAH	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021004	KUALA	199	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
617203	SINGKAWANG TIMUR	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
6172031001	PAJINTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031002	NYARUMKOP	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031003	MAYA SOPA	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6172031004	BAGAK SAHWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031005	SANGGAU KULOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617204	SINGKAWANG UTARA	4	0	8	4	1	0	7	1	2	2	0	0	0
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6172041002	NARAM	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041003	SUNGAI BULAN	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6172041004	SUNGAI RASAU	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
6172041005	SETAPUK KECIL	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6172041006	SETAPUK BESAR	2	0	6	3	1	0	0	1	1	1	0	0	0
6172041007	SEMELAGI KECIL	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
617205	SINGKAWANG SELATAN	9	3	1	1	0	2	6	0	2	8	0	1	0
6172051001	SEDAU	8	1	1	1	0	2	6	0	1	5	0	1	0
6172051002	SAGATANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172051003	SUJANGKUNG	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
6172051004	PANGMILANG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.13
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Pekerjaan

KODE	WILAYAH	PENATA RAMBUT	MEKANIK	SENIMAN	TABIB	PARAJI	PERANCANG BUSANA	PENTERJEMAH	IMAM MASJID	PENDETA	PASTOR	WARTAWAN	USTADZ/ MUBALIGH	JURU MASAK	PROMOTOR ACARA
6172	KOTA SINGKAWANG	2	50	7	1	0	0	1	0	64	7	5	4	2	0
617201	SINGKAWANG TENGAH	0	11	3	0	0	0	1	0	15	0	1	3	2	0
6172011001	ROBAN	0	4	0	0	0	0	1	0	11	0	1	3	2	0
6172011002	CONDONG	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6172011003	SEKIP LAMA	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6172011004	JAWA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6172011005	BUKIT BATU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172011006	SUNGAI WIE	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
617202	SINGKAWANG BARAT	1	5	2	0	0	0	0	0	14	3	2	0	0	0
6172021001	PASIRAN	0	3	2	0	0	0	0	0	13	3	1	0	0	0
6172021002	MELAYU	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021003	TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021004	KUALA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
617203	SINGKAWANG TIMUR	0	19	1	1	0	0	0	0	12	4	2	0	0	0
6172031001	PAJINTAN	0	17	1	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0
6172031002	NYARUMKOP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
6172031003	MAYA SOPA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0
6172031004	BAGAK SAHWA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031005	SANGGAU KULOR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
617204	SINGKAWANG UTARA	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6172041002	NARAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041003	SUNGAI BULAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041004	SUNGAI RASAU	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041005	SETAPUK KECIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041006	SETAPUK BESAR	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
6172041007	SEMELAGI KECIL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617205	SINGKAWANG SELATAN	1	11	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
6172051001	SEDAU	1	6	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
6172051002	SAGATANI	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6172051003	SIJANGKUNG	0	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
6172051004	PANGMILANG	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.14
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Pekerjaan

KODE	WILAYAH	ANGGOTA DPR RI	ANGGOTA DPD RI	ANGGOTA BPK	PRESIDEN	WAKIL PRESIDEN	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	DUTA BESAR	GUBERNUR	WAKIL GUBERNUR	BUPATI	WAKIL BUPATI
6172	KOTA SINGKAWANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617201	SINGKAWANG TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172011001	ROBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172011002	CONDONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172011003	SEKIP LAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172011004	JAWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172011005	BUKIT BATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172011006	SUNGAI WIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617202	SINGKAWANG BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021001	PASIRAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021002	MELAYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021003	TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172021004	KUALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617203	SINGKAWANG TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031001	PAJINTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031002	NYARUMKOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031003	MAYA SOPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031004	BAGAK SAHWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172031005	SANGGAU KULOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617204	SINGKAWANG UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041002	NARAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041003	SUNGAI BULAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041004	SUNGAI RASAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041005	SETAPUK KECIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041006	SETAPUK BESAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172041007	SEMELAGI KECIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617205	SINGKAWANG SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172051001	SEDAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172051002	SAGATANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172051003	SIJANGKUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6172051004	PANGMILANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.15
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Pekerjaan

KODE	WILAYAH	WALIKOTA	WAKIL WALIKOTA	ANGGOTA DPRD PROP	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	DOSEN	GURU	PILOT	PENGACARA	NOTARIS	ARSITEK	AKUNTAN	KONSULTAN	DOKTER
6172	KOTA SINGKAWANG	0	0	1	29	50	653	0	18	19	1	0	9	105
617201	SINGKAWANG TENGAH	0	0	0	9	25	274	0	8	9	0	0	3	44
6172011001	ROBAN	0	0	0	6	7	118	0	2	2	0	0	0	21
6172011002	CONDONG	0	0	0	1	4	28	0	2	1	0	0	0	8
6172011003	SEKIP LAMA	0	0	0	2	8	41	0	2	1	0	0	0	5
6172011004	JAWA	0	0	0	0	3	19	0	1	3	0	0	0	3
6172011005	BUKIT BATU	0	0	0	0	0	37	0	1	1	0	0	1	2
6172011006	SUNGAI WIE	0	0	0	0	3	31	0	0	1	0	0	2	5
617202	SINGKAWANG BARAT	0	0	0	10	9	149	0	5	8	0	0	3	51
6172021001	PASIRAN	0	0	0	4	5	105	0	3	2	0	0	2	38
6172021002	MELAYU	0	0	1	5	2	14	0	1	6	0	0	0	9
6172021003	TENGAH	0	0	0	1	1	13	0	0	0	0	0	0	2
6172021004	KUALA	0	0	0	0	1	17	0	1	0	0	0	1	2
617203	SINGKAWANG TIMUR	0	0	0	1	2	55	0	2	0	0	0	0	0
6172031001	PAJINTAN	0	0	0	0	2	12	0	1	0	0	0	0	0
6172031002	NYARUMKOP	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
6172031003	MAYA SOPA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6172031004	BAGAK SAHWA	0	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0
6172031005	SANGGAU KULOR	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
617204	SINGKAWANG UTARA	0	0	0	4	13	86	0	1	1	1	0	2	4
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	0	0	0	1	2	18	0	1	0	0	0	1	1
6172041002	NARAM	0	0	0	0	6	24	0	0	1	0	0	0	1
6172041003	SUNGAI BULAN	0	0	0	1	0	22	0	0	0	1	0	0	0
6172041004	SUNGAI RASAU	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2
6172041005	SETAPUK KECIL	0	0	0	0	2	5	0	0	1	0	0	0	0
6172041006	SETAPUK BESAR	0	0	0	1	2	12	0	0	0	0	0	1	0
6172041007	SEMELAGI KECIL	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
617205	SINGKAWANG SELATAN	0	0	0	4	1	89	0	2	0	0	0	1	6
6172051001	SEDAU	0	0	0	2	1	56	0	2	0	0	0	1	6
6172051002	SAGATANI	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
6172051003	SIJANGKUNG	0	0	0	2	0	22	0	0	0	0	0	0	0
6172051004	PANGMILANG	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.16
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Pekerjaan

KODE	WILAYAH	BIDAN	PERAWAT	APOTEKER	PSIKIATER/ PSIKOLOG	PENYIAR TELEVISI	PENYIAR RADIO	PELAUT	PENELITI	SOPIR	PIALANG	PARANORM AL	PEDAGANG	PERANGKAT DESA	KEPALA DESA
6172	KOTA SINGKAWANG	60	163	17	0	0	0	8	2	127	0	1	519	1	0
617201	SINGKAWANG TENGAH	28	73	8	0	0	0	1	2	39	0	0	222	1	0
6172011001	ROBAN	13	28	1	0	0	0	0	1	16	0	0	36	0	0
6172011002	CONDONG	4	8	3	0	0	0	0	1	9	0	0	145	0	0
6172011003	SEKIP LAMA	2	11	0	0	0	0	0	0	3	0	0	12	1	0
6172011004	JAWA	1	4	2	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0	0
6172011005	BUKIT BATU	5	10	1	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0	0
6172011006	SUNGAI WIE	3	12	1	0	0	0	1	0	3	0	0	11	0	0
617202	SINGKAWANG BARAT	14	32	2	0	0	0	0	0	25	0	0	174	0	0
6172021001	PASIRAN	10	22	2	0	0	0	0	0	14	0	0	78	0	0
6172021002	MELAYU	4	2	0	0	0	0	0	0	6	0	0	76	0	0
6172021003	TENGAH	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0
6172021004	KUALA	0	5	0	0	0	0	4	0	4	0	0	15	0	0
617203	SINGKAWANG TIMUR	8	27	0	0	0	0	0	0	13	0	0	10	0	0
6172031001	PAJINTAN	3	11	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0
6172031002	NYARUMKOP	3	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0
6172031003	MAYA SOPA	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
6172031004	BAGAK SAHWA	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
6172031005	SANGGAU KULOR	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
617204	SINGKAWANG UTARA	3	18	6	0	0	0	2	0	0	0	0	80	0	0
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
6172041002	NARAM	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
6172041003	SUNGAI BULAN	0	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0
6172041004	SUNGAI RASAU	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0
6172041005	SETAPUK KECIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
6172041006	SETAPUK BESAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0
6172041007	SEMELAGI KECIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
617205	SINGKAWANG SELATAN	7	13	1	0	0	0	1	0	24	0	1	33	0	0
6172051001	SEDAU	4	10	1	0	0	0	1	0	15	0	0	16	0	0
6172051002	SAGATANI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
6172051003	SIJANGKUNG	2	1	0	0	0	0	0	0	6	0	1	14	0	0
6172051004	PANGMILANG	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.17
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Pekerjaan

KODE	WILAYAH	BIARAWAN/ BIARAWATI	WIRASWASTA	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA	ARTIS	ATLIT	CHEFF	MANAJER	TENAGA TATA USAHA	OPERAT OR	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	TEKNISI	ASISTEN AHLI	PEKERJAAN LAINNYA	JUMLAH
6172	KOTA SINGKAWANG	21	51,357	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	244,706
617201	SINGKAWANG TENGAH	0	15,683	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	73,263
6172011001	ROBAN	0	7,533	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,981
6172011002	CONDONG	0	2,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,812
6172011003	SEKIP LAMA	0	2,001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17,447
6172011004	JAWA	0	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
6172011005	BUKIT BATU	0	1,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,904
6172011006	SUNGAI WIE	0	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,342
617202	SINGKAWANG BARAT	20	14,502	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	54,273
6172021001	PASIRAN	20	9,200	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,347
6172021002	MELAYU	0	2,976	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,099
6172021003	TENGAH	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,940
6172021004	KUALA	0	1,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,890
617203	SINGKAWANG TIMUR	1	3,047	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24,588
6172031001	PAJINTAN	1	1,648	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,481
6172031002	NYARUMKOP	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,192
6172031003	MAYA SOPA	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,605
6172031004	BAGAK SAHWA	0	352	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,889
6172031005	SANGGAU KULOR	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424
617204	SINGKAWANG UTARA	0	5,927	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	35,145
6172041001	SUNGAI GARAM HILIR	0	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,291
6172041002	NARAM	0	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,955
6172041003	SUNGAI BULAN	0	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,351
6172041004	SUNGAI RASAU	0	674	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,271
6172041005	SETAPUK KECIL	0	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,848
6172041006	SETAPUK BESAR	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,373
6172041007	SEMELAGI KECIL	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,056
617205	SINGKAWANG SELATAN	0	12,198	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,657
6172051001	SEDAU	0	8,760	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,061
6172051002	SAGATANI	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700
6172051003	SIJANGKUNG	0	2,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,912
6172051004	PANGMILANG	0	619	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



Tabel 1.18
Penduduk Kota Singkawang
Menurut Pendidikan

KODE	WILAYAH	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SD/SEDERAJAT	SLTP/ SEDERAJAT	SLTA/ SEDERAJAT	DIPLOMA I/II	AKADEMI /DIPLOMA.III /S.MUDA	DIPLOMA IV/STRATA I	STRATA II	STRATA III	JUMLAH
61.72	KOTA SINGKAWANG	74,252	35,536	52,916	27,505	40,916	759	3,180	9,127	499	16	244,706
61.72.01	SINGKAWANG TENGAH	21,168	8,743	12,477	7,934	16,194	394	1,580	4,543	223	7	73,263
61.72.01.1001	ROBAN	10,123	4,255	6,115	3,667	6,974	174	669	1,924	77	3	33,981
61.72.01.1002	CONDONG	2,640	1,183	1,649	1,249	2,417	32	161	456	25	0	9,812
61.72.01.1003	SEKIP LAMA	2,799	1,113	1,444	1,030	2,463	71	227	772	45	1	9,965
61.72.01.1004	JAWA	1,156	474	593	511	1,157	42	127	409	30	1	4,500
61.72.01.1005	BUKIT BATU	2,403	802	1,421	728	1,633	33	194	434	15	0	7,663
61.72.01.1006	SUNGAI WIE	2,047	916	1,255	749	1,550	42	202	548	31	2	7,342
61.72.02	SINGKAWANG BARAT	15,045	7,660	11,651	6,958	10,009	120	575	1,838	163	3	54,022
61.72.02.1001	PASIRAN	9,419	5,090	7,204	4,175	5,684	84	338	1,206	124	0	33,324
61.72.02.1002	MELAYU	2,550	1,211	2,229	1,492	2,253	6	84	225	19	3	10,072
61.72.02.1003	TENGAH	486	192	196	219	617	8	57	148	7	0	1,930
61.72.02.1004	KUALA	2,590	1,167	2,022	1,072	1,455	22	96	259	13	0	8,696
61.72.03	SINGKAWANG TIMUR	8,182	4,923	4,924	2,608	3,118	78	248	488	21	1	24,591
61.72.03.1001	PAJINTAN	2,771	1,544	1,802	929	1,137	22	103	163	9	1	8,481
61.72.03.1002	NYARUMKOP	1,311	1,039	575	409	594	32	53	169	10	0	4,192
61.72.03.1003	MAYA SOPA	1,999	1,330	1,116	526	552	7	25	50	0	0	5,605
61.72.03.1004	BAGAK SAHWA	892	386	556	348	547	15	61	83	1	0	2,889
61.72.03.1005	SANGGAU KULOR	1,209	624	875	396	288	2	6	23	1	0	3,424
61.72.04	SINGKAWANG UTARA	10,934	4,982	8,383	3,625	5,295	97	463	1,328	64	2	35,173
61.72.04.1001	SUNGAI GARAM HILIR	1,825	763	1,045	649	1,294	32	186	467	30	2	6,293
61.72.04.1002	NARAM	1,278	465	643	425	794	11	86	243	11	0	3,956
61.72.04.1003	SUNGAI BULAN	1,302	573	873	427	851	13	69	236	9	0	4,353
61.72.04.1004	SUNGAI RASAU	1,041	461	727	356	539	10	33	103	2	0	3,272
61.72.04.1005	SETAPUK KECIL	1,269	470	988	439	539	11	32	100	3	0	3,851
61.72.04.1006	SETAPUK BESAR	2,621	1,346	2,673	753	814	17	34	121	8	0	8,387
61.72.04.1007	SEMELAGI KECIL	1,598	904	1,434	576	464	3	23	58	1	0	5,061
61.72.05	SINGKAWANG SELATAN	18,923	9,228	15,481	6,380	6,300	70	314	930	28	3	57,657
61.72.05.1001	SEDAU	12,150	5,730	10,162	3,955	4,117	48	237	637	23	2	37,061
61.72.05.1002	SAGATANI	1,186	614	1,177	380	302	6	11	24	0	0	3,700
61.72.05.1003	SIJANGKUNG	3,981	2,104	3,080	1,324	1,177	11	42	191	2	0	11,912
61.72.05.1004	PANGMILANG	1,606	780	1,062	721	704	5	24	78	3	1	4,984

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2023



d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Sampai dengan Tahun 2023, Kota Singkawang secara administratif pemerintahan terbagi kedalam 5 Kecamatan dan 26 Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Singkawang Tengah, terdiri atas:
 - a. Kelurahan Roban
 - b. Kelurahan Condong
 - c. Kelurahan Sekip Lama
 - d. Kelurahan Jawa
 - e. Kelurahan Bukit Batu
 - f. Kelurahan Sungai Wie
2. Kecamatan Singkawang Barat, terdiri atas :
 - a. Kelurahan Pasiran
 - b. Kelurahan Melayu
 - c. Kelurahan Tengah
 - d. Kelurahan Kuala
3. Kecamatan Singkawang Selatan, terdiri atas :
 - a. Kelurahan Sedau
 - b. Kelurahan Sagatani
 - c. Kelurahan Sijangkung
 - d. Kelurahan Pangmilang
4. Kecamatan Singkawang Utara, terdiri atas :
 - a. Kelurahan Sungai Garam Hilir
 - b. Kelurahan Naram
 - c. Kelurahan Sungai Bulan
 - d. Kelurahan Sungai Rasau
 - e. Kelurahan Setapuk Kecil
 - f. Kelurahan Setapuk Besar
 - g. Kelurahan Semelagi Kecil
5. Kecamatan Singkawang Timur, terdiri atas :
 - a. Kelurahan Pajintan



- b. Kelurahan Nyarumkop
- c. Kelurahan Mayasopa
- d. Kelurahan Bagak Sahwa
- e. Kelurahan Sanggau Kulor

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Untuk mewujudkan perangkat daerah yang dapat memenuhi asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang meliputi 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 15 (Lima Belas) Dinas, 3 (tiga) Badan, dan 5 (lima) Kecamatan serta 26 (Dua Puluh Enam) kelurahan sebagai perangkat kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe B;
2. Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah Tipe B;
4. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
 - d. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe B;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A;
 - g. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Tipe A;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;



-
- j. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
 - l. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Tipe B;
 - m. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B; dan
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.
5. Badan Daerah, terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe B;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A; dan
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C.
6. Kecamatan, terdiri dari:
- a. Kecamatan Singkawang Tengah Tipe A;
 - b. Kecamatan Singkawang Barat Tipe A;
 - c. Kecamatan Singkawang Selatan Tipe A;
 - d. Kecamatan Singkawang Utara Tipe A; dan
 - e. Kecamatan Singkawang Timur Tipe A.

Beberapa perangkat daerah yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih tetap dipertahankan sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah diundangkan. Adapun perangkat daerah dimaksud yaitu:

1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang;
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan, yang dibentuk



berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang

Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Kota Singkawang didukung aparatur yang berjumlah 3.039 orang, jumlah tersebut belum termasuk tenaga honorer. Adapun komposisi pegawai menurut Golongan secara rinci yaitu:



TABEL 1.9
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SINGKAWANG
BERDASARKAN GOLONGAN DAN JABATAN

GOL	ESELON												FUNGSIONAL						PELAKSANA		JUMLAH		TOTAL	
	II.a (JPT P)		II.b (JPT P)		III.a (ADMINISTRATOR)		III.b (ADMINISTRATOR)		IV.a (PENGAWAS)		IV.b (PENGAWAS)		GURU		KESEHATAN		LAINNYA							
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P	L	P	L	P	L	P		
GOL IV/d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GOL IV/c	0	0	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	16	0	0	0	0	0	17	21	38
GOL IV/b	0	0	5	1	5	21	0	1	0	0	0	0	1	4	4	14	5	3	1	0	21	44	65	
GOL IV/a	0	0	0	0	5	1	38	13	5	1	0	0	61	216	13	25	14	10	1	0	137	266	403	
JUMLAH GOL IV	1	0	19	4	10	22	38	14	5	1	0	0	62	222	20	55	19	13	2	0	176	331	507	
GOL III/d	0	0	0	0	0	0	12	0	53	33	10	19	20	87	42	234	67	49	15	27	219	449	668	
GOL III/c	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	20	27	60	151	16	109	17	9	17	21	141	320	461	
GOL III/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	9	51	107	18	49	48	12	75	70	219	247	466	



GOL III/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	31	81	9	42	24	7	17 1	13 7	239	267	506
JUMLAH GOL III	0	0	0	0	0	0	12	0	64	36	61	55	16 2	42 6	85	434	15 6	77	27 8	25 5	818	128 3	2101
GOL II/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	32	5	1	37	13	54	49	103
GOL II/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	16	89	1	0	80	69	99	160	259
GOL II/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15	5	17	5	22
GOL II/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	6	26	6	32
JUMLAH GOL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	50	121	6	1	15 7	93	196	220	416
GOL I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7
GOL I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7
GOL I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	sis 0	1	0	1	0	1
GOL I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	15
TOTAL	1	0	1 9	4	10	22	50	14	69	37	61	55	23 0	65 3	13 2	610	18 1	91	45 2	34 8	120 5	183 4	3039

Sumber Data : BKPSDM Kota Singkawang Tahun 2023



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Pendapatan

TABEL 1.20
REALISASI ANGGARAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	248.064.107.514,00	247.530.971.315,63	90,41
Pajak Daerah	75.650.000.000,00	76.787.987.940,95	101,50
Retribusi Daerah	6.097.846.000,00	6.526.785.235,00	107,03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.864.741.812,00	9.880.607.349,00	100,16
Lain-lain PAD Yang Sah	156.451.519.702,00	154.335.590.790,68	98,65
Pendapatan Transfer	717.826.095.615,00	722.190.174.523,67	100,61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645.136.892.712,00	646.539.409.400,00	100,22
Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.689.202.903,00	75.650.765.123,67	104,07,87
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	13.565.042.391,39	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	13.565.042.391,39	-

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah (BKAD) Kota Singkawang Tahun 2023



2. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja

TABEL 1.21
REALISASI ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%
Belanja Daerah	1.064.150.252.736,00	1.012.394.419.299,21	95,14
Belanja Operasi	846.156.873.869,00	803.019.985.708,62	94,90
Belanja Pegawai	386.322.353.171,00	368.005.038.728,00	95,26
Belanja Barang dan Jasa	395.307.605.130,00	371.235.628.223,62	93,91
Belanja Hibah	61.842.295.568,00	61.270.454.757,00	99,08
Belanja Bantuan Sosial	2.684.620.000,00	2.508.864.000,00	93,45
Belanja Modal	216.493.378.867,00	209.373.433.590,59	96,71
Belanja Modal Tanah	12.332.554.637,00	10.588.976.550,00	85,86
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.445.187.599,00	35.775.036.842,70	95,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.482.412.225,00	51.876.971.446,00	97,00



Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	89.627.774.742,00	88.044.974.216,89	98,23
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.605.449.664,00	23.087.474.535,00	97,81
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.000.000,00	0,07

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah (BKAD) Kota Singkawang Tahun 2023

3. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Pembiayaan

TABEL 1.22
REALISASI ANGGARAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%
Penerimaan Pembiayaan	136.038.037.975,00	136.038.037.974,97	100
Pengeluaran Pembiayaan	37.777.988.368,00	37.777.988.368,00	100

Sumber Data : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Singkawang Tahun 2023



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1. Permasalahan Pembangunan

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan perubahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan struktur pada perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang khususnya pada Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dimekarkan menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan struktur perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dokumen Perubahan RPD Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang dipimpin oleh pejabat daerah dikarenakan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah periode 2017-2022 pada Tahun 2022, sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Penyusunan dokumen Perubahan RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025; Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022; RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026; Isu-isu strategis yang berkembang; Kebijakan nasional; dan Regulasi yang berlaku.

Pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dengan berpedoman pada uraian diatas dan sejalan dengan Instruksi Menteri tersebut Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan adaptasi dengan melakukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalbar sampai Tahun 2025; hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Tahun 2017-2022; isu-isu strategis yang berkembang; kebijakan nasional.

Terkait dengan uraian di atas dan berdasarkan hasil analisa dan telaahan terhadap data dan informasi yang ada,



maka permasalahan pembangunan daerah di Kota Singkawang meliputi:

a. Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan masih berhadapan dengan dengan masalah pokok yaitu belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah. Penyebab utamanya adalah berkaitan dengan menurunnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD. Pada tingkat PAUD, akar masalah yang paling menonjol adalah standardisasi pelaksanaan sekolah PAUD yang belum maksimal. Selama ini, pelaksanaan pendidikan tingkat PAUD sebagian besar dilaksanakan oleh pihak non pemerintah. Pada saat yang sama, proses penyediaan sarana dan prasarana serta standardisasi pendidikan oleh Dinas belum maksimal.

Tabel 1.23

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah	Belum optimalnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD	Belum maksimalnya koordinasi dengan sekolah-sekolah PAUD non-pemerintah
		Standardisasi penyelenggaraan PAUD belum terlaksana sesuai standar nasional.
		Kurangnya dorongan pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya ketersediaan alat peraga pendidikan tingkat PAUD (alat permainan edukatif,
		Belum optimalnya gedung sekolah PAUD yang memadai
	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Belum optimalnya penerapan pembelajaran berbasis digital
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD dan SMP	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD
		Masih adanya sarana pendidikan tingkat SMP yang perlu diperbaharui
		Belum optimalnya upaya pengintegrasian data siswa antara sekolah dan dinas
	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	Cakupan ketersediaan sekolah kesetaraan belum merata
		Belum optimalnya diversifikasi kompetensi pada sekolah penyetaraan

b. Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik



di level daerah maupun nasional. Upaya pembangunan dalam bidang kesehatan di Kota Singkawang masih menyisakan beberapa permasalahan umum seperti kematian ibu, kematian bayi, penanganan gizi buruk dan penanganan stunting. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kota Singkawang Tahun 2023.

Tabel 1.24

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Masih adanya balita dengan status gizi buruk dan stunting	Belum optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap pemenuhan gizi anak
	Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI)	Deteksi dini hipertensi dalam kehamilan belum optimal
		Rendahnya sosialisasi kepada ibu hamil
		Sistem rujukan dan jaringan rujukan belum optimal
	Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 1.000	Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 1.000
		Rendahnya konseling gizi ibu hamil, anemia dan KEK
		Masih adanya Bayi Berat Lahir Rendah
		Sistem rujukan dan jaringan rujukan belum optimal
	Masih adanya temuan penyakit menular (TBC, dll)	Rendahnya koordinasi lintas sektor
		Belum optimalnya pemenuhan gizi
		Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri masih perlu ditingkatkan



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pola hidup sehat masyarakat
	Masih tingginya angka prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Diare, polio dll)	Belum optimalnya pola hidup sehat masyarakat
		Belum optimalnya deteksi dini penyakit tidak menular
	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas Kesehatan	Masih kurangnya ketersediaan dan kompetensi tenaga Kesehatan
		Belum optimalnya peran swasta dalam pembangunan Kesehatan
		Rendahnya Rasio Posyandu per 100 Balita
		Rendahnya mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Singkawang masih dihadapkan pada 3 (tiga) permasalahan pokok berkaitan dengan kualitas infrastruktur dasar, air bersih, dan tata ruang. Kualitas infrastruktur dasar belum optimal sehingga masih memerlukan intervensi untuk jaringan irigasi, dan drainase yang diperlukan untuk penanganan/pengendalian banjir. Begitu juga pembangunan maupun peningkatan jalan sebagai salah satu pendongkrak perekonomian masyarakat. Masyarakat Kota Singkawang juga masih dihadapkan pada terbatasnya akses pada air bersih di beberapa wilayah. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka ditemukan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya jaringan air bersih dan belum optimalnya identifikasi sumber air.



Tabel 1.25

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan	Masih adanya jalan dengan kualitas rendah
	Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
	Belum optimalnya kualitas jaringan drainase/irigasi	belum adanya masterplan pembangunan drainase/irigasi
		belum tersedianya data yang valid terkait kondisi drainase
Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air baku	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air minum	Belum optimalnya pembangunan jaringan air bersih
Masih adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Masih kurangnya pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kota
Belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak	Belum optimalnya ketersediaan sanitasi layak	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi sehat dan layak

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni dan masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Data pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan bahwa adanya peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan tingkat



capaian sebesar 97,91%. Namun untuk kawasan kumuh di Kota Singkawang, data menunjukkan dari total kawasan kumuh hanya tertangani sekitar 50,08 % pada Tahun 2023. Tantangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain:

Tabel 1.26

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasaranan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU) di kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.	Terbatasnya akses prasaranan dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana, Utilitas Umum (PSU)	Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, adanya beerapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh baru)
		Belum optimalnya fasilitasi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Masih kurangnya akses terhadap sanitasi layak
		Masih kurangnya akses terhadap air bersih
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Kota Singkawang, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama serta penanggulangan bencana. Pada aspek persentase penegakan produk hukum di Kota Singkawang, terjadi



peningkatan setiap tahunnya. Upaya peningkatan penegakan produk hukum selama ini terkendala pada belum optimalnya sinergi kewenangan dan koordinasi antar instansi terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Ketenteraman Ketertiban Umum di Kota Singkawang pada Tahun 2023.

Tabel 1.27

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya penegakan produk hukum (Reklame dan PKL)	Belum adanya sinergi kewenangan antar Perangkat Daerah	Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
Belum optimalnya kualitas penanganan bencana	Belum optimalnya upaya efektivitas pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana	Belum optimalnya pengembangan sistim informasi kebencanaan
		Belum memadainya kapasitas Pendidikan dan pelatihan SDM Kebencanaan
		Belum memadainya ketersediaan peralatan dan logistik Kebencanaan

f. Sosial

Urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Urusan kesejahteraan sosial dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan sosial yang terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum Kota Singkawang sudah melaksanakan fungsi pelayanan sosial, namun upaya tersebut masih



perlu untuk ditingkatkan. Dilihat dari persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 4,83% pada Tahun 2001 menjadi 4,67% pada Tahun 2022. Begitu juga mengenai jumlah penduduk miskin menurun dari 11,16 ribu pada Tahun 2018 menjadi 10,82 ribu orang.

Jenis PPKS paling banyak di Daerah diantaranya keluarga miskin, wanita korban kekerasan, tuna tubuh, lanjut usia terlantar, anak terlantar, balita terlantar dan sebagainya. Artinya masih perlu upaya peningkatan cakupan pelayanan PPKS untuk periode selanjutnya.

Tabel 1.28

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan sosial pada PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Belum optimalnya pengelolaan data PPKS	Validitas DTKS yang masih belum optimal
		Belum optimalnya peranan stakeholder di tingkat kelurahan dalam verifikasi dan validasi data
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial non pemerintah
		belum tersedianya akses informasi satu data PPKS
		belum tersedianya data kemiskinan versi daerah
	belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dan linjamsos dasar secara menyeluruh terhadap PPKS	pelayanan administrasi kependudukan bagi PPKS/PSKS yang belum terakses dengan baik
		kurangnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan bagi PPKS
		belum terpenuhinya kebutuhan dasar pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS antara lain pangan, sandang, alat bantu dan aksesibilitas



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		lainnya
		terbatasnya SDM dan Sarpas dalam melakukan rehabilitasi sosial
		keterbatasan LKS yang memberikan pelayanan Rehsos
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam rehsos
		belum terpenuhinya pelayanan bimbingan mental, fisik, spritual dan sosial terhadap PPKS maupun Keluarga PPKS
		terbatasnya pelayanan pengadauan dan data PPKS
		belum optimalnya penjangkauan, kedarutan dan penelusuran keluarga PPKS
		belum adanya kerjasama secara formal antara pemerintah daerah dengan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		belum optimalnya penanganan kebencanaan bagi masyarakat
		terbatasnya SDM dan Sarpas dalam melakukan penangan kebencanaan
		belum terpenuhinya kebutuhan dasar penanganan kebencanaan antara lain pangan, sandang, alat bantu dan aksesibilitas



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		lainnya
		Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam penanganan kebencanaan
		belum optimal penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
		kurang pelatihan kewirausahaan bagi PPKS
	belum optimalnya pemberdayaan sosial PPKS/PPKS	belum tersedianya modal usaha bagi PPKS
belum optimalnya peran PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	kurangnya pengembangan kapasitas PSKS	Belum sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya dalam pemberdayaan sosial
		minimnya pengetahuan PSKS dalam menangani permasalahan sosial
		Minimnya ketrampilan dan keahlian dalam penanganan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		kurangnya PSKS dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		minimnya perekrutan tenaga terampil (pekerja sosial profesional)
		belum terkoordinasinya atau tercatat secara administrasi para pengiat masalah kesejahteraan sosial



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kurangnya penghargaan bagi mereka pengiat masalah kesejahteraan sosial
	Belum optimalnya pengumpulan sumbangan dalam daerah untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang tata cara pengumpulan sumbangan untuk kesejahteraan sosial
		Belum tersedianya aturan daerah tentang pengumpulan sumbangan
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghargai jasa-jasa para pahlawan	Kurangnya situs-situs yang memberikan informasi mengenai para pahlawan
Belum Optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Singkawang masih belum optimal khususnya dalam serapan tenaga kerja. Data pada Tahun 2022 berdasarkan Singkawang Dalam BPS menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Singkawang sebesar 68,86%. Hal tersebut dari 100 penduduk Kota Singkawang yang berumur 15 tahun ke atas, terdapat 68 sampai 69 orang tersedia untuk melakukan produksi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kota Singkawang pada Tahun 2022 sebesar 8,63%.

Adapun kualifikasi tenaga kerja yang sedang bekerja pada Tahun 2022 didominasi oleh lulusan setara SD sebesar 43,97%, SMP 11,52%, SMK/SMA 29,33%, dan sarjana/diploma 15,18 %. Hal tersebut menunjukkan masih adanya tantangan untuk menyerap penduduk usia kerja agar mampu bekerja serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Maka dari itu, ada beberapa tantangan urusan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan yaitu:

Tabel 1.29

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya serapan tenaga kerja	masih adanya kesenjangan kualifikasi/kompentensi pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia	Belum tersedianya data yang telah divalidasi dan verifikasi tentang ketersediaan tenaga kerja serta kebutuhan lapangan kerja belum adanya kerja sama (MOU) dengan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas penyediaan Instruktur dan penempatan kerja bagi yang sudah mengikuti pelatihan



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya fasilitasi bursa kerja bagi pencari kerja

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender dalam program pembangunan nasional. Isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Selain itu, urusan ini memiliki fokus untuk menghapuskan diskriminasi gender serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pembangunan daerah yang memperhatikan isu gender adalah Partisipasi angkatan kerja perempuan, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Selain fokus pemberdayaan perempuan, upaya penanganan kekerasan terhadap anak juga masih perlu ditingkatkan.

Tabel 1.30

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Belum Adanya RAD KLA	Belum optimalnya data gender dan anak
	belum optimalnya pelibatan Lembaga partisipasi anak	Partisipasi anak belum menjadi arus utama dalam pembangunan.
		Belum optimalnya perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan komprehensif



c. Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kota Singkawang masih perlu untuk dioptimalkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya daerah rawan pangan meskipun dari sisi cadangan pangan tercukupi. Hal lain adalah keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata, belum optimalnya penganekaragaman pangan lokal yang disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.31
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Masih adanya daerah rawan pangan	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
		Perlunya data ketersediaan pangan yang akurat
	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata	Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
		Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu
	Belum optimalnya penganekaragaman dan keamanan pangan lokal	Belum optimalnya promosi keanekaragaman pangan lokal kepada masyarakat, pengusaha warung makan dan lembaga umum
		Kurangnya pengelolaan lahan pekarangan untuk diversifikasi tanaman pangan
		Sarana dan prasarana untuk menguji keamanan pangan belum memadai



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum terlaksananya sertifikasi uji mutu komoditas beras

d. Pertanahan

Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan. Adapun detail pemetaan permasalahan pada bidang urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.32

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan pertanahan	Masih belum optimalnya pengelolaan ijin lokasi	Belum tersedianya data base pertanahan
		Belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan wali kota tentang ijin membuka tanah negara
	Belum optimalnya redistribusi tanah	Belum tersedianya regulasi, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan
	Masih adanya konflik tanah	Belum Optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum tuntasnya inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong
		Belum selesainya (belum tuntas) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang
		Belum tersedianya data base pertanahan

e. Lingkungan Hidup

Terciptanya kemajuan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu cita-cita pembangunan. Kualitas lingkungan hidup di Kota Singkawang adalah 66,69 pada Tahun 2023. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan lingkungan hidup adalah masih rendahnya Indeks Kualitas Lahan yang mencapai 38,59 atau berada pada kriteria kurang pada tahun 2023. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

Tabel 1.33

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas lingkungan (air, udara, lahan)	Belum maksimalnya pengurangan dan penanganan sampah	Belum maksimalnya upaya pengurangan sampah di masyarakat
		Belum seimbangnya jumlah sarpras yang tersedia dengan jumlah permintaan pelayanan masyarakat



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum maksimalnya pengendalian limbah B3	Kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha / kegiatan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan
		Belum seimbangny jumlah sapras yang tersedia dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan
		Tingginya biaya pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga
		Sulitnya proses perijinan pengelolaan limbah B3
	Lambatnya proses perijinan LH	Kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha / kegiatan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan
		Belum seimbangny jumlah sapras yang tersedia dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan
		Tingginya biaya pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga
		Sulitnya proses perijinan pengelolaan limbah B3
	Lambatnya proses perizinan LH	Perijinan LH yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
		Belum maksimalnya sosialisasi dan Bimtek terhadap pelaku usaha
		Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses perijinan LH
	Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan yang terantum dalam dokumen lingkungan	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menidaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan
		Penegakan hukum lingkungan belum terpadu



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		antar bidang urusan
	Masih adanya Pencemaran air	Pembuangan limbah cair langsung ke badan sungai
		Masih terdapatnya pembuangan sampah dibadan sungai
		Masih banyaknya aktifitas PETI di hulu sungai
	Masih adanya Pencemaran udara	Masih terdapatnya kebakaran hutan dan lahan
	Masih adanya Pencemaran Tanah	Masih adanya pembuangan limbah B3 cair ke permukaan tanah atau ke badan air
	Kerusakan lingkungan (lahan dan hutan)	Masih banyaknya galian tanah, pasir, batu dan emas tanpa ijin
		Masih terdapatnya kebakaran hutan dan lahan
Perubahan iklim	Alih fungsi lahan	Berkurangnya tutupan lahan
		Belum taatnya terhadap RTRW kota
		Belum maksimalnya penyediaan sarpras RTH

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat erat kaitannya dengan penyediaan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Secara umum, kualitas data kependudukan di Kota Singkawang masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk



melakukan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian. Selain itu, adanya pemekaran kecamatan di Kota Singkawang juga menjadi tantangan tersendiri.

Tabel 1.34

**Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan belum secara maksimal di manfaatkan oleh instansi/lembaga pengguna
		Keterlambatan pelayanan dalam penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dari masyarakat, antara lain pelaporan kelahiran, kematian dan perubahan biodata sehingga kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi rendah

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan lain yang perlu menjadi fokus pembangunan adalah terkait pengendalian penduduk dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, kelahiran anak dan menekan angka kematian ibu. Beberapa permasalahan terkait



pengendalian penduduk dan KB di Kota Singkawang adalah terkait partisipasi penduduk dalam program KB yang masih belum optimal walaupun laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang sudah semakin menurun sejak sepuluh tahun sebelumnya. Adapun pada Tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,61% dan pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,55%. Berikut adalah rumusan masalah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.

Tabel 1.35

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Penyelenggaraan program KB	Angka putus pakai (Drop Out) kontrasepsinya masih tinggi	Pemakaian kontrasepsi jangka panjang masih rendah
	Masih tingginya unmet need (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	Persepsi masyarakat terhadap KB masih kurang baik
	Peserta KB aktif belum optimal	Data pencatatan belum optimal
		Masih adanya ketidakpahaman masyarakat tentang KB

h. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dalam upaya menciptakan kenyamanan dan keselamatan transportasi. berkurangnya jumlah barang dan kapal yang masuk ke Singkawang akibat alur yang dangkal sehingga kapal hanya mengandalkan kondisi air laut pasang, hal tersebut merupakan faktor menurunnya minat kapal - kapal yang bersandar di Singkawang. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan perhubungan adalah sebagai berikut:



Tabel 1.36

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kenyamanan dan Keselamatan transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat	Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (terutama PJU)
		Belum memadainya pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan
	Belum memadainya transportasi umum	Belum optimalnya kualitas prasarana lalu lintas
		Semakin menurunnya armada yang melayani trayek angkutan

i. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum maksimal karena pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan baik. Selain karena sarana pengelolaan jaringan yang belum memadai juga disebabkan oleh jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Beberapa persoalan berkaitan dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi berkaitan dengan jaringan fiber optik yang rawan terkena gangguan karena masih menggunakan jalur atas. Selain itu, jaringan fiber optik juga belum mencakup semua desa sehingga pengintegrasian data masih terfragmentasi.

Tabel 1.37

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi informasi yang	Sarana pengelolaan Jaringan komunikasi belum optimal	Fiber optik masih menggunakan jalur atas sehingga berisiko terkena gangguan



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
terintegrasi		Data fiber optik masih terbatas dan tersebar di masing-masing internal Perangkat Daerah

j. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor yang dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Kondisi capaian kinerja dalam urusan koperasi dan UMKM belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi kelembagaan koperasi yang masih memerlukan penataan serta pengembangan UMKM yang ada di Kota Singkawang yang masih terhambat akibat sulitnya perizinan dan juga akses permodalan. Tantangan atau permasalahan kedepan yang dihadapi untuk memperbaiki sektor Koperasi dan UMKM di Kota Singkawang antara lain:

Tabel 1.38

Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kapasitas pertumbuhan koperasi baru	Belum optimalnya pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi	Jumlah tenaga pendamping yang terbatas
		Belum optimalnya kualitas SDM koperasi
		Minimnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi
		Terdapat permasalahan internal koperasi
	Belum optimalnya intervensi pemerintah	Belum adanya regulasi khusus yang mengatur pembagian sektor-sektor usaha koperasi



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemulihan usaha koperasi	Terbatasnya jumlah bantuan pendanaan bagi koperasi yang berada dalam kondisi darurat tertentu
Belum optimalnya kapasitas kesehatan koperasi	Belum optimalnya pelaporan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi	Belum optimalnya kualitas SDM koperasi dalam penyusunan pelaporan
		Belum optimalnya program pelaporan yang terintegrasi
Belum optimalnya kapasitas UMKM yang memiliki izin	Belum optimalnya pendampingan bagi UMKM yang akan mengurus izin usaha berbasis resiko	Kurangnya jumlah pendamping UMKM
		Kurang optimalnya sosialisasi pengurusan NPWP
		Belum tersedianya program pendampingan pengurusan NIB di tingkat kelurahan
	Belum optimalnya data UMKM	Belum optimalnya proses pengumpulan, verifikasi dan pembaharuan dan usaha kecil

k. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal pada periode Tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 jumlah investasi meningkat sebesar 206,33%. Urusan penanaman modal menjadi prioritas pembangunan Kota Singkawang pada beberapa tahun ke depan, karena merupakan salah satu faktor untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Singkawang, yaitu:

Tabel 1.39

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya fluktuasi realisasi investasi dan jumlah investor	Masih perlunya penciptaan iklim investasi yang kondusif	Belum optimalnya penyediaan ruang untuk investasi dengan tetap menjaga kelestarian



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		lingkungan
		Belum optimalnya penyediaan dan akses peta potensi investasi
Masih perlunya penguatan kelembagaan perizinan satu pintu	Masih perlunya penguatan tim teknis perizinan	Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah
	Masih perlunya peningkatan kemudahan perizinan berbasis aplikasi	Masih perlunya peningkatan aplikasi perizinan dan pemantauan proses perizinan

I. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Singkawang. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan urusan kepemudaan adalah belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan yang disebabkan oleh pengembangan pemuda yang belum optimal. Selain itu, pengembangan pemuda belum diarahkan pada tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat lokal secara real.

Dari sisi keolahragaan, prestasi olahraga Kota Singkawang secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan karena persebarannya yang kurang merata dan masih terbatas pada jenis olahraga tertentu. Di samping itu, pengembangan SDM belum optimal karena pembibitan atlet belum terstruktur dengan baik serta belum adanya event-event olahraga reguler sebagai sarana pembibitan.



Tabel 1.40
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Pengembangan kapasitas pemuda belum optimal	Belum optimalnya pendataan organisasi kepemudaan
		Pengembangan pemuda belum diarahkan secara tematik dan peningkatan keterampilan, misalnya pada isu-isu tertentu yang sifatnya inovatif
		Diversifikasi peran organisasi kepemudaan belum optimal
	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana, Pengembangan SDM keolahragaan	Persebaran fasilitas olahraga tidak merata
		Sarana keolahragaan masih terbatas pada olahraga tertentu, seperti sepak bola dan voli
		Pembibitan atlet masih belum terstruktur
		Tidak adanya kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan

m. Statistik

Pelaksanaan urusan statistik di Kota Singkawang masih belum optimal. Hingga saat ini, fungsi statistik melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti tercantum pada tabel di bawah ini, masalah terbesar pelaksanaan urusan Statistik adalah belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi. Penyebab utama dari masalah pokok tersebut yaitu belum optimalnya kapasitas kelembagaan baik dari sisi kewenangan maupun SDM.



Tabel 1.41

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi	Belum optimalnya Kapasitas kelembagaan statistik	Adanya tumpang tindih kewenangan dengan BPS terutama Seksi Statistik
		Kurangnya kompetensi SDM pengelola statistik
		Belum optimalnya standar pelayanan pengelolaan data statistik sektoral

n. Persandian

Di Kota Singkawang, pelaksanaan urusan persandian juga belum menunjukkan progress yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya layanan persandian akibat dari prosedur penggunaan persandian yang masih minim.

Tabel 1.42

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan persandian	Prosedur penggunaan persandian (seperti tanda tangan elektronik, tata naskah dinas, tanda tangan, kearsipan) belum optimal	Kurangnya SDM yang memadai dibidang persandian
		Masih perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman terkait urgensi persandian

o. Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan, minimnya upaya menjadikan budaya lokal sebagai katalisator pembangunan daerah menjadi masalah pokok.



Hal ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan kebudayaan sebagai bahan pengembangan sektor pariwisata. Upaya ini belum tercapai karena situs-situs kebudayaan belum dijadikan sebagai objek pembangunan pariwisata.

Tabel 1.43

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlu ditingkatkannya budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya	Masih perlu ditingkatkannya fasilitas terhadap kelompok kesenian
		Masih perlunya revitalisasi nilai tradisi
		Belum optimalnya inventarisasi benda cagar budaya
		Belum optimalnya upaya menjadikan cagar budaya sebagai sarana edukasi

p. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Secara umum, kinerja layanan perpustakaan di Kota Singkawang sudah cukup baik.

Namun, layanan tersebut perlu ditingkatkan dengan mengembangkan perpustakaan berbasis inklusif yakni perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca tetapi memiliki fungsi lain seperti sebagai



tempat diskusi, tempat pelatihan, mini studi dan sebagainya, sehingga semakin memperluas sarana proses belajar masyarakat. Dalam mewujudkan perpustakaan inklusif diperlukan berbagai upaya diantaranya pembangunan sarana prasarana, perluasan layanan, peningkatan kapasitas SDM pengelola dan sebagainya. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Perpustakaan di Kota Singkawang.

Tabel 1.44

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan Literasi	Belum optimalnya cakupan layanan perpustakaan yang inklusif	Perluasan fungsi perpustakaan tidak hanya untuk membaca tetapi ada ruang diskusi, mini studio, tempat pelatihan dan sebagainya
		Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan

q. Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti terkait terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kinerja layanan kearsipan dapat dilihat dari indikator cakupan pengelolaan arsip daerah dan persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Secara umum, kedua indikator tersebut masih belum menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut dikarenakan belum semua Perangkat Daerah mengirimkan arsipnya untuk dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sarana prasana kearsipan pada level daerah dan satuan kerja masih terbatas, serta SDM pengelola arsip masih kurang. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kearsipan di Kota Singkawang.



Tabel 1.45

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sistem kearsipan Daerah	Belum optimalnya pengelolaan depot arsip daerah	Terbatasnya ketersediaan depot arsip daerah
		Belum semua dan Perpustakaan memiliki depot arsip yang baik
		Belum ada berita acara dalam penghapusan arsip sehingga banyak arsip menumpuk (belum ada SOP)
		Belum optimalnya sistem perawatan dan pemeliharaan arsip
		Masih kurangnya tenaga arsiparis

r. Perikanan dan Kelautan

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor peternakan dan perikanan. Susu dan ikan lele merupakan beberapa produk unggulan yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor peternakan dan perikanan bisa menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dukungan serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang peternakan dan perikanan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk hasil ternak dan optimalisasi pemasaran produk hasil ternak.



Tabel 1.46

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perikanan dan Kelautan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslaah
Belum optimalnya pemasaran perikanan di dalam daerah	Tingkat konsumsi ikan masih rendah	Kesadaran masyarakat tentang gizi/protein hewani belum optimal
		belum optimalnya pengelolaan harga ikan lokal
Belum optimalnya tingkat produksi perikanan dan daya saing produk ikan	Kurangnya ketersediaan bibit ikan	Kapasitas produksi BBI belum optimal
		Kapasitas produksi dari UPR belum optimal
	Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan	Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik
		Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan
	Skala Usaha Pembudidaya Ikan	Pembudidaya ikan di Singkawang didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar.
		Sebagian besar kualitas SDM pembudidaya ikan masih terbatas
	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas	Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pembudidaya skala kecil
		Tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi
	Akses pemasaran terbatas	Daya saing produk olahan ikan masih relatif rendah
		Belum optimalnya pemanfaatan system penjualan online
	Teknologi dan sistem produksi	Akses terhadap teknologi Terbatas



Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslaah
		Umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan/atau sistem semi-intensif.
		Infrastruktur pendukung masih terbatas
	Adanya penurunan kualitas sumber daya perairan umum	Ikan lebih mudah terkena Penyakit
		Kematian ikan mendadak dalam jumlah besar akibat perubahan musim
		Terjadi konflik kepentingan dengan pengguna lain

s. Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Kota Singkawang. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.47

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	Belum optimalnya Pembinaan perindustrian	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perindustrian
		Masih adanya industri kecil yang belum terdata
		Kompetensi IKM yang masih perlu ditingkatkan

t. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial di Kota Singkawang terutama di wilayah utara Kalimantan Barat. Tingginya



potensi tersebut belum diimbangi oleh dua penyebab yaitu minimnya sarana dan prasarana wilayah dan juga belum optimalnya dukungan SDM.

Tabel 1.48
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya potensi kepariwisataan Singkawang	Belum optimalnya pengembangan atraksi, amenitas, akomodasi pariwisata	Paket wisata belum terdiversifikasi
		Destinasi wisata yang belum tersebar
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata
		Belum banyaknya akomodasi pariwisata yang sesuai kebutuhan wisatawan
		Belum optimalnya upaya menarik wisatawan lokal
	Belum optimalnya pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata	Belum optimalnya kompetensi SDM masyarakat

u. Pertanian

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan peternakan. Beberapa keunggulan sektor pertanian dan peternakan adalah pada komoditas ayam potong dan telur. Sektor pertanian di Kota Singkawang merupakan penyumbang PDRB terbesar keempat setelah sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi dengan capaian rata-rata 12-13%.

Optimalisasi serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang pertanian dan peternakan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk hasil pertanian dan peternakan dan optimalisasi pemasaran produk hasil ternak.



Tabel 1.49

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kesejahteraan petani	Belum optimalnya kualitas hasil pertanian	Belum optimalnya kapasitas SDM petani
		Belum optimalnya peran kelembagaan petani
		Semakin menurunnya jumlah petani
		Ketersedian sarana prasarana pertanian yang masih kurang
	Belum optimalnya produktivitas lahan pertanian	Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah
		Belum optimalnya ketersediaan sumber daya air pertanian
		Belum optimalnya penggunaan pupuk berimbang
		Belum optimalnya kepatuhan penerapan pola tanam petani
	Belum optimalnya pemasaran dan diversifikasi produk pertanian	Perlunya peningkatan minat petani dalam mengolah produk hasil pertanian
		Belum optimalnya fasilitasi akses pasar
Belum optimalnya produksi, produktivitas ternak, dan daya saing produk hasil ternak	Keterbatasan ketersediaan bibit ternak unggul	Tingkat pengetahuan peternak dalam usaha perbibitan dan manajemen reproduksi ternak masih kurang
		Modal usaha perbibitan ternak yang besar
		Belum berkembangnya kawasan peternakan berupa kluster perbibitan ternak
		Keterbatasan jumlah sarana prasarana Inseminasi Buatan



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Keterbatasan ketersediaan pakan ternak	Keterbatasan lahan dan persaingan penggunaan lahan dengan tanaman pangan
		Belum optimalnya ketersediaan pakan
	Tingkat pengetahuan dan SDM Peternak belum optimal	Tingkat pendidikan yang rendah dan sebagian pelaku usaha peternakan dalam katagori usia non produktif
		Kurangnya minat generasi muda dalam usaha peternakan
	Skala usaha peternakan belum optimal	Belum optimalnya pendataan kelompok peternak
		Keterbatasan akses modal
		Belum berkembangnya kelembagaan korporasi peternak
		Belum optimalnya peran kelembagaan asosiasi peternak
		Belum optimalnya kemitraan usaha peternakan
	Tingginya risiko kerugian usaha akibat kematian ternak	Kota Singkawang merupakan daerah endemik penyakit hewan menular strategis (PHMS)
		Kurangnya pengetahuan peternak dalam penerapan cara budidaya ternak yang baik
		Kurangnya tingkat kesadaran peternak dalam program asuransi ternak
	Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana dan pemanfaatan alat mesin peternakan	Keterbatasan ketersediaan air untuk budidaya ternak
		Belum optimalnya pemanfaatan alat mesin peternakan
		Keterbatasan akses pemasaran produk hasil



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ternak

v. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran penyaluran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan perbaikan layanan urusan perdagangan. Selama 2018-2023, kinerja urusan perdagangan cukup baik pada pengelolaan retribusi pasar daerah serta perbaikan sarana prasarana perdagangan (pasar, toko, kios, fasilitas pasar). Namun, untuk masalah ekspor barang dan pembinaan usaha perdagangan masih perlu dioptimalkan.

Tabel 1.50

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Kontribusi perdagangan terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya pembinaan usaha perdagangan	Belum optimalnya pendataan potensi perdagangan
		Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perdagangan
		Perlu peningkatan kapasitas SDM perdagangan
		Fasilitasi izin usaha perdagangan belum optimal
		Masih perlunya peningkatan upaya promosi usaha Perdagangan
	Belum optimalnya pengelolaan UPT	Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana pasar
		Belum optimalnya peningkatan retribusi pasar



i. Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan menentukan efektivitas proses pembangunan dan membawa dampak signifikan bagi penerapan akuntabilitas kinerja di Kota Singkawang. Capaian fungsi perencanaan belum optimal untuk mendukung SAKIP yang masih berpredikat “B” hingga Tahun 2023. Orientasi pembangunan berbasis kinerja outcome/impact perlu ditingkatkan, serta belum terbangunnya manajemen kinerja yang baik berupa pembagian indikator kinerja yang saling mendukung dan terkait antara Wali Kota dengan kepala Perangkat Daerah dan struktur di bawahnya. Beberapa kinerja perencanaan masih berorientasi output berupa ketersediaan dokumen perencanaan. Pemetaan permasalahan dalam fungsi perencanaan sebagai berikut:

Tabel 1.51

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja	Pembagian dan sinergi target kinerja antara kepala daerah dengan perangkat daerah belum terbangun
	Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik
		Belum terintegrasinya SIPD dengan evaluasi dan penatausahaan keuangan Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja outcome



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya implelementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	Belum terbangunnya instrumen pengendalian implementasi, misalnya perencanaan berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang perencanaan dalam mengawal perencanaan Sektoral

b. Keuangan

Kinerja keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan bahwa sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2023 PAD Kota Singkawang meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,83% per tahun, dimana penerimaan retribusi juga telah mengalami peningkatan dengan rata-rata 6,19% per tahun.

Unsur penunjang pemerintahan keuangan juga memiliki isu atau permasalahan urgen berupa upaya mempertahankan capaian akuntabilitas keuangan yang telah mendapatkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 1.52

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pendapatan Daerah	Masih adanya potensi pendapatan yang tidak terealisasi	Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak
		Masih adanya objek pajak yang belum membayar pajak sesuai ketentuan
		Menurunnya pendapatan dari komponen retribusi



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi pelanggar pajak
	Masih adanya potensi penurunan pendapatan	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah penghasil pendapatan daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan objek retribusi

e. Kepegawaian

Kepegawaian merupakan urusan krusial dalam upaya peningkatan tatakelola pemerintahan. Di Kota Singkawang, masalah pokok dari urusan kepegawaian, yaitu belum optimalnya kualitas kepegawaian yang disebabkan oleh manajemen kepegawaian yang belum maksimal. Beberapa persoalan mikro yang teridentifikasi antara lain tidak meratanya distribusi pegawai antara Perangkat Daerah, kurangnya SDM di beberapa posisi, serta proses mutasi yang seringkali tidak berjalan lancar.

Tabel 1.53

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas kepegawaian	Manajemen kepegawaian belum optimal	Tidak meratanya distribusi pegawai antar Perangkat Daerah
		Kurangnya SDM di beberapa posisi

f. Pendidikan dan Pelatihan

Belum optimalnya manajemen ASN, juga terkait belum optimalnya peningkatan kompetensi aparatur. Hal ini antara lain disebabkan oleh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masih terpusat, serta skala prioritas pelaksanaan diklat yang berubah. Pemetaan masalah terkait pendidikan dan pelatihan di Kota Singkawang sebagai berikut:



Tabel 1.54

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kompetensi ASN	Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN	Belum optimalnya fasilitas diklat yang dimiliki BKPSDM
		Belum Optimalnya Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Diklat

g. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan merupakan aspek krusial yang menjadi basis pengambilan kebijakan. Namun demikian, tujuan tersebut belum bisa terwujud karena minimnya ketersediaan hasil penelitian yang bisa dijadikan basis perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas untuk melakukan riset oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan. Pada saat yang sama penelitian juga dilaksanakan secara terbagi- bagi/terpecah-pecah di tingkat Perangkat Daerah dengan koordinasi yang lemah.

Tabel 1.55

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Kurangnya pengembangan penelitian dan inovasi	Belum dijadikannya hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan	Masih minimnya kegiatan penelitian karena tidak adanya SDM fungsional peneliti
		Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih tersebar di tingkat Perangkat Daerah
		Belum optimalnya koordinasi kelitbangan



	Belum optimalnya inovasi daerah	Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi masyarakat

h. Pengawasan

Capaian fungsi pengawasan di Kota Singkawang telah memenuhi target nasional, yakni Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang berada di Level III. Capaian tersebut diperkuat dengan peningkatan integritas aparatur yang ditandai dengan transparansi kegiatan dan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan fungsi pengawasan di masa depan, yaitu:

Tabel 1.56

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Indeks Integritas masih rendah	Belum ada OPD yang meraih predikat WBK/WBBM	Belum intensif memberikan bimbingan pembangunan Zona Integritas
Sebagian besar perangkat daerah belum melakukan manajemen risiko	Masih rendahnya budaya sadar risiko	Belum optimalnya internalisasi budaya sadar risiko
Rekomendasi hasil pengawasan belum seluruhnya ditindaklanjuti	Komitmen Pimpinan PD dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan masih rendah	Pergantian Pejabat pengampu rekomendasi hasil pengawasan
Indeks RB masih belum optimal	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sebatas pemenuhan dokumen	1. Komitmen Pimpinan OPD dalam pelaksanaan RB masih rendah 2. Penguatan dan Penajaman program RB pada level PD belum optimal 3. Belum adanya reward dan punishment



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di OPD

1. Sekretariat DPRD

DPRD merupakan mitra Wali Kota yang berkedudukan sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD diantaranya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Secara umum, kinerja capaian Sekretariat DPRD Kota Singkawang cukup baik yakni sudah mencapai target yang ditentukan. Namun, dalam pelaksanaan tugas fasilitasi masih mengalami beberapa kendala seperti manajemen internal di sekretariat DPRD, kinerja anggota Dewan serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Sekretariat DPRD di Kota Singkawang.

Tabel 1.57

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Fasilitasi dan tugas anggota DPRD	Belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam proses pelayanan anggota DPRD	Manajemen pembagian tugas yang kurang efektif
		Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur serta kemampuan personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
		Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas anggota dewan berbasis kebutuhan daerah



2. Sekretariat Daerah

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kebijakan Wali Kota. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Daerah. Beberapa capaian kinerja yang menandai kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal, antara lain terkait Nilai Reformasi Birokrasi dan penerapan SAKIP. Adapun koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik telah menghasilkan nilai IKM yang meningkat setiap tahun. Tantangan yang masih dihadapi fungsi Sekretariat Daerah, yaitu:

Tabel 1.58

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih kurang optimalnya rumusan dan implementasi kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	Belum terlaksananya program revitalisasi pasar	kebutuhan regulasi yang optimal dalam pengelolaan pasar
		kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
Belum optimalnya administrasi tata pemerintahan, kebijakan kesejahteraan rakyat dan pengkoordinasian serta fasilitasi kebijakan daerah	Belum optimalnya rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat	Belum optimalnya Kebijakan Bansos yang sesuai dengan kebutuhan
	Belum optimalnya produk hukum dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan daerah	Kurangnya penegakan hukum dalam implementasi produk hukum daerah
Belum optimalnya kualitas pelayanan aparatur	Belum optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat	pengendalian dan pengukuran keberhasilan kebijakan



3. Kewilayahan

Fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan, salah satunya dalam rangka menopang kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 1.59

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas Pelayanan
Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan	Belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan	Belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan

4. Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum terkait pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik, sehingga terkait upaya membangun kohesivitas sosial dan peningkatan demokrasi dan kehidupan politik yang kondusif di daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kota Singkawang memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:



Tabel 1.60

**Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pemerintahan Umum
dan Kesatuan Bangsa**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya potensi konflik	Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan dini gangguan stabilitas wilayah	Minimnya SDM untuk deteksi dan kewaspadaan dini
		Belum optimalnya pendataan dan peran Ormas
		Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme yang belum efektif

4.1. Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika isu strategis baik internal maupun eksternal diidentifikasi dengan baik, maka dapat diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

4.1.1. Isu Sustainable Development Goals (SDG's)

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep pembangunan yang diarahkan untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu strategis internasional yang relevan. Pencapaian target pembangunan daerah yang ditujukan untuk pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan konsep pembangunan yang mentransformasikan dan menyentuh aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang biasanya diukur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi antara lain:



-
- a) Mengakhiri kelaparan dan kemiskinan;
 - b) Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
 - c) Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan pertumbuhan dengan pembangunan berkelanjutan;
 - d) Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
 - e) Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Sementara itu, kesepakatan Global Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan langkah untuk melanjutkan berbagai program yang telah dilaksanakan dalam agenda MDG's. Indikator target yang ingin dicapai dalam kesepakatan tersebut, adalah tetap terjaganya iklim yang kondusi. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan program-program prioritas yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, merupakan implementasi dari konsepsi pembangunan berkelanjutan.

4.1.2. Isu Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahana Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.



-
3. **Penyederhanaan Regulasi:** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
 4. **Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
 5. **Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5 (lima) Arah Presiden diinstrumentasikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan masing-masing agenda pembangunan memiliki lingkungan dan isu strategis:



Tabel 1.61 Tujuh Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan: Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	• Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumberdaya air, sumber daya energi, serta kehutanan • Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital	• Keberlanjutan dan ketersediaan SDA sebagai modal utama pembangunan makin berkurang. • Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani- nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan SDA • Transformasi struktural berjalan lambat, yaitu Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis moneter • Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, yaitu Indonesia memiliki keunggulan dalam hal harga, namun tertinggal dalam infrastruktur serta kesiapan dan pemanfaatan oleh masyarakat dan institusi pemerintahan.
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi	• Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan	• Tingginya angka kemiskinan di wilayah timur Indonesia (18%)



No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	kesenjangan dan menjamin pemerataan: Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	unggulandaerah - Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang - Penguatan kemampuan SDM dan lptek berbasis keunggulan wilayah - Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata - Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	- Masih adanya ketimpangan pendapatan dengan rasio gini perdesaan 0,317 dan perkotaan 0,392 - Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia, terutama Pulau Jawa - Terbatasnya sarana prasarana, aksesibilitas, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing: Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif	- Pengendalian penduduk dan penguatan tatakelola kependudukan - Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial - Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	- Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan bonus demografi, jika tidak dikelola baik dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan - Kesejahteraan penduduk meningkat, namun jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin



No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	dan merata diseluruh wilayah	• Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas • Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan Pemuda • Pengentasan kemiskinan • Peningkatan produktivitas dan daya saing	saat terjadi guncangan masih cukup tinggi • Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk • Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal, kesenjangan gender masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif, serta peranan partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal, serta sebagian memiliki perilaku beresiko • Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat • Produktivitas dan daya saing yang masih perlu ditingkatkan. Peringkat SDM Indonesia 65 dari 130 negara
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan: Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan	• Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila • Pemajuan dan pelestarian kebudayaan • Moderasi beragama	• Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa • Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia • Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti



No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas	- Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama - Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan - Belum optimalnya peran keluarga - Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar: bertujuan mendukung Aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar - Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi - Pembangunan infrastruktur perkotaan - Pembangunan energi dan ketenagalistrikan - Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital	- Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau - Belum optimalnya peningkatan akses air minum yang layak dan aman - Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi yang layak dan aman - Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan yang masih menghadapi tantangan tingkat layanan penyediaan, kuantitas dan kualitas air, dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin air baku - Keselamatan dan keamanan transportasi yang masih menghadapi permasalahan



No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			tingginya angka kematian akibat kecelakaan • Ketahanan kebencanaan infrastruktur • Waduk multiguna dan modernisasi irigasi yang menghadapi tantangan kapasitas tampungan air masih rendah karena terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya • Infrastruktur ekonomi yang menghadapi tantangan pada aspek konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan Darat • Infrastruktur perkotaan yang masih menghadapi tantangan: transportasi perkotaan; energi dan ketenagalistrikan perkotaan; infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan; serta penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, terjangkau di perkotaan. Energi dan ketenagalistrikan yang menghadapi tantangan keberlanjutan penyediaan, akses dan keterjangkauan, serta kecukupan penyediaan



No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			Transformasi digital memiliki tantangan penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim: Pembangunannasional perlumemperhatikan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim	- Peningkatan kualitas lingkungan hidup - Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim - Pembangunan rendah karbon	- Tren IKLH nasional menunjukkan kualitas air semakin memburuk, kualitas udara secara absout menurun, dan tutupan lahan mengalami perbaikan - Indonesia memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi - Penurunan emisi gas rumah kaca yang mendekati target
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik: Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan	- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan berkualitas - Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan - Perbaikan sistem	- Dinamika geopolitik global, antara lain depolarisasi pusat gravitasi politik internasional, instabilitas kawasan Timur Tengah, dinamika kebijakan luar negeri negara adi daya, melemahnya tata kelola global dan menguatnya uniteralisme - Tantangan nasional berupa demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi



No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	negara	peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber • Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi • Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri • Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan	dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman kedaulatan negara, dan kecenderungan meningkatnya kejahatan Trans nasional



4.2.3 Isu-isu Strategis RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026

Isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari isu strategis pada lingkup internal dan isu strategis pada lingkup global. Adapun isu-isu strategis pada lingkup internal Pemerintah Kalimantan Barat, adalah :

a. Kekuatan Daerah

- 1) Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Uranium, Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;
- 2) Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
- 3) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah;
- 4) Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial;
- 5) Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (tropical rainforest) yang cukup luas yang memiliki berbagai biodiversity endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta memiliki peran sebagai paru-paru dunia;



b. Kelemahan Daerah

- 1) Terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- 2) Lemahnya daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri;
- 3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih terbatas;
- 4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
- 5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
- 6) Prasarana wilayah yang dimiliki belum mendorong peningkatan investasi;
- 7) Investasi belum optimal dalam mendukung perekonomian daerah;
- 8) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan lahan;
- 9) Belum optimalnya pelayanan akses dan pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
- 11) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
- 12) Panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan belum optimalnya



konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat

Sedangkan identifikasi Isu-isu strategis pada lingkungan eksternal Pemerintah Kalimantan Barat, antara lain :

a. Peluang daerah

- 1) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Kalimantan Barat merupakan provinsi yang mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, sehingga memiliki peluang sebagai berikut :
 - a) Interaksi sosial ekonomi yang didukung dengan bis antar kota-antar negara yang semakin meningkat.
 - b) Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.
 - c) Terbukanya pintu gerbang internasional yang meliputi: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong-Tebedu, PLBN Aruk–Biawak, PLBN Badau- Lubuk Antu dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jagoi Babang-Serikin
- 3) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- 4) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
- 5) Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, tujuan pengembangan Wilayah Pulau adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan



Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:

- (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa,
- (b) penyediaan infrastruktur wilayah,
- (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

b. Ancaman Daerah

- 1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kalimantan Barat, yaitu:
Perlambatan ekonomi pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia belum pulih sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian daerah;
 - a) Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
 - b) Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;
- 2) Kurangnya koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah dalam rangka pengawasan perairan teritorial Kalimantan Barat, sehingga masih terjadi Illegal Fishing, Unreported Fishing and Unregulated Fishing di wilayah perairan Kalimantan Barat;
- 3) Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi ilegal trading, trafficking, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
- 4) Pengelolaan daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar



negara belum optimal.

4.2.4. Penetapan Isu Strategis Kota Singkawang

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pembangunan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter dengan permasalahannya yaitu Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan indikator masih adanya Masih adanya balita dengan status gizi buruk dan stunting, Masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 1.000, masih adanya temuan penyakit menular (TBC, Covid 19 dll) serta Masih adanya angka prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Diare, polio dll).

Sesuai RPJPD Kota Singkawang tahap 4, ditargetkan pencapaian pembangunan urusan kesehatan yaitu:

- Peningkatan kualitas maupun jangkauan cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita.
- Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan.
- Membaiknya indikator-indikator pembangunan kesehatan (AKBayi = 17 per 1.000 kh ; AKBalita = 20 per 1.000 kh ; AKIbu = 250 per 100.000 kh; AHHidup = 77 thn ; % Balita Gizi Buruk = 0,5%).

Adapun dari dimensi pendidikan, permasalahan yang dapat ditemukan adalah menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK)



PAUD, SD/MI/Paket A serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SD/MI/Paket A.

Sesuai RPJPD Kota Singkawang tahap 4, ditargetkan untuk pencapaian urusan pendidikan yaitu:

- Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah).
- Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar.
- Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Membaiknya indikator-indikator pembangunan pendidikan (APK SD/MI = 100,0% ; APM SD/MI = 100,0% ; APK SMP/MTs = 100,0% ; APM SMP/MTs = 99,0% ; APK SMA/SMK/MA = 90,0% ; APM SMA/SMK/MA = 80,0% ; AMH usia 15-24 thn = 100,0%; IPM = 80,0).

2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Strategis Yang Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 hingga mencapai -2,43 dari 4,53 pada Tahun 2019 yang salah satu faktor terbesarnya adalah terjadinya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada menurunnya perekonomian hampir disemua sector khususnya sektor perdagangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Berdasarkan RPJPD Kota Singkawang, sampai akhir Tahun 2025



perekonomian Kota Singkawang ditargetkan tumbuh sebesar 6,29% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,28% per tahun. Adapun prioritas Pembangunan ekonomi pada tahap akhir diprioritaskan pada beberapa hal sebagai berikut:

- Peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa berskala luas.
- Perencanaan pengembangan sektor/bidang usaha skala menengah/besar yang dipandang strategis untuk dipromosikan kepada investor luar.
- Pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah berskala nasional dan internasional.
- Pengembangan kawasan perdagangan dan bisnis terpadu di daerah.

3. Peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan

Sesuai RPJPD Kota Singkawang pada Tahap ke-4, pembangunan infrastruktur ditargetkan dapat mencapai pembangunan berbagai bidang sebagai berikut:

- Bidang Transportasi:
pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang ± 350 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 30 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang ± 85 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan ± 15 unit. Peningkatan infrastruktur dan fungsi Bandar Udara Singkawang. Peningkatan Status dan Pelayanan Pelabuhan Laut Singkawang.
- Bidang Sumber Daya Air:
Bidang Sumber Air (Daerah Irigasi & Daerah Rawa) : perbaikan tanggul 22.500 M', perbaikan pintu air 12 unit, pembuatan pintu air



30 unit, perbaikan saluran 75.000 M', pembuatan saluran 40.000 M', pembuatan Jalan Usaha Tani 1.400 M', perbaikan bangunan pelengkap 20 unit, perbaikan bangunan bendung 18 unit, pembuatan bangunan bendung 5 unit dan normalisasi sungai 12.000 M'.

- Bidang Informasi dan Telekomunikasi :
semakin berkembang dan memasyarakatnya pengguna pelayanan informasi dan telekomunikasi.
- Bidang Sumber daya air : peningkatan pelayan air bersih.
- Bidang Energi Listrik :
kebutuhan akan energi listrik untuk wilayah Kota Singkawang terpenuhi dan sistem manajemen dan tingkat keandalan pelayanan kepada konsumen semakin baik.

4. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mencapai target akhir RPJPD Kota Singkawang khususnya Tahap ke-4 yaitu untuk Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Adapun target pembangunan jangka panjang Kota Singkawang yaitu:

- Terwujudnya prototipe sebuah civil society yang kuat di Kota Singkawang;
- Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah sepenuhnya didasarkan pada semangat dan prinsip-prinsip good governance.

6. Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel

Adapun target pembangunan jangka panjang Kota Singkawang yaitu:



Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

7. Lemahnya penegakkan implementasi produk hukum dapat dilihat dari masih tingginya angka kriminalitas sehingga Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Kondusif, Toleran Dan Berbudaya belum optimal.



Tabel 1.42 Rumusan Isu Strategis RPD

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Agenda Nasional	Isu Strategis Provinsi	RPJPD		Rumusan Isu Strategis
			Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	RPD 2023 - 2026
1	2	3	4	5	6
TPB Pilar Pembangunan Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Pendidikan dan Kesehatan.	Terwujudnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.	Terkendalinya tingkat pertumbuhan penduduk.	Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter;
				meningkatnya pemerataan kesehatan serta peningkatan kualitas dan cakupan program layanan kesehatan.	
				meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dapat terwujud.	Belum optimalnya derajat Kesehatan masyarakat; (masih tingginya



				tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang semakin membaik serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan	kasus stunting) Belum optimalnya kualitas Pendidikan (masih minimnya penyelenggaraan Pendidikan inklusif)
				peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM	
				meningkatnya pemerataan pendidikan dalam kerangka penuntasan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan kualitas lulusan	
TPB Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Ekonomi	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan	Terwujudnya perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh meluasnya kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi strategis.	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Strategis Yang Berwawasan



		produktivitas pertanian.	melalui peningkatan investasi, yang berbasis pada peningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.		Lingkungan
				Meningkatnya kegiatan dan peran usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi dalam berbagai kegiatan perdagangan dan jasa dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran.	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian sektor industri, UMKM, perdagangan pariwisata, ekonomi kreatif dan pertanian
		Peranan perindustrian, perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian belum optimal.		Meningkatnya kemampuan pengelolaan pariwisata yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat.	untuk memperluas lapangan kerja dan pengentasa kemiskinan
				Meningkatnya kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.	
				Meningkatnya kegiatan industri pengolahan hasil	



				pertanian (agroindustri) berbasis pada hasil produk agribisnis lokal, dan pengembangan klaster (IKM). Dihasilkannya komoditas unggulan yang memiliki aksesibilitas pasar yang kuat dan berdaya saing, serta mampu mendorong kegiatan industri pengolahan dan perdagangan.	
TPB Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Ekonomi	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi	Terwujudnya infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan tata guna tanah untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa serta	Meningkatkan sistem manajemen dan prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap sebagai faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketertiban dengan	- Belum optimalnya sistem manajemen dan prasaranan transportasi



		masuknya investasi.	mengembangkan kepariwisataan.	melibatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.	
				Merealisasikan rencana pembangunan bandar udara sebagai salah satu pelayanan kepada masyarakat dan investor untuk transportasi ke dalam dan luar propinsi maupun mancanegara dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat bisnis, industri jasa, pariwisata dan agropolitan.	- Belum selesainya proses pembangunan Bandar udara Singkawang Belum adanya terminal tipe A sebagai sarana pendukung transportasi antar negara
				Mengoptimalkan fungsi terminal sesuai dengan status terminal, yaitu terminal dalam kota, terminal antar kota dan terminal antar negara.	



	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		Menjaga dan meningkatkan kualitas air serta pengembangan sistem distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan dengan pengelolaan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.	Belum terjaganya kualitas air baku Belum terpenuhinya pemenuhan air bersih pada masyarakat kota Singkawang
			Kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan SDA masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan	Menurunnya kualitas lingkungan hidup



				kecenderungannya terus menurun dan ketersediaan SDA semakin menipis.	
TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran.	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik.	- Belum optimalnya Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel - Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik
				Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan membangun sinergisitas antar lembaga dan antar daerah.	
		Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan	Menegakan supremasi hukum dan kepastian hukum masyarakat serta peraturan daerah.	



		informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah.	ekosistem.		
		Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relatif rendah sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing daerah.		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif.	Belum optimalnya Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu
				Menata dan meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah, kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.	Belum optimalnya Penguatan kelembagaan dan



					peningkatan kapasitas kinerja aparatur
				Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.	Belum optimalnya pengawasan internal berbasis resiko
			Terwujudnya budaya politik yang demokratis, dan keamanan serta ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum.	Mewujudkan situasi kondusif di daerah melalui peningkatan peran penyidik PNS dalam penegakan Perda.	Lemahnya Penegakkan Implementasi Produk hukum
				Mengembangkan budaya hukum di masyarakat.	Belum maksimalnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan
				Melakukan proses legal drafting untuk menginventarisir, merancang, menetapkan,	



				dan mengimpelementasikan Perda serta mengevaluasi Perda-Perda yang sudah tidak relevan.	politik
				Meningkatkan sistem koordinasi antar komponen masyarakat guna mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di Kota Singkawang.	
				Membangun struktur dan kultur politik masyarakat Kota Singkawang yang demokratis.	
				Meningkatkan peran dan fungsi institusi politik dan komunikasi politik baik yang berada pada suprastruktur politik, infrastruktur politik dan antara komponen masyarakat yang ada di	



				Kota Singkawang.	
				Meningkatkan semangat nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan kesadaran bela negara.	
				Meningkatkan pemahaman masyarakat Kota Singkawang tentang multikulturalisme budaya dan politik, sehingga terimplementasikannya budaya politik yang demokratis, menjunjung tinggi hukum dan etika politik.	
				Mengembangkan iklim dan proses politik yang demokratis di Kota Singkawang sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat bisa berpartisipasi dan melakukan kontrol yang	



				efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	
				Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang bertumpu pada ke-bhineka Tunggal ika-an.	
				Meningkatkan kemandirian dan fungsi partai politik dalam menyerap, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengembangkan sikap bijaksana dan menjunjung tinggi etika demokrasi.	
				Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumberdaya manusia	



				anggota partai politik dan anggota DPRD.	
				Mendorong terlaksananya penegakan supremasi hukum agar lebih menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, serta menghargai dan menjunjung tinggi HAM.	
				Meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, serta zat adiktif.	
				Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.	



b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan RPD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005-2025.

Dalam RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005- 2025, dengan visi **“Singkawang Maju, Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri”**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, inovatif berbudaya dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan investasi, yang berbasis padapeningkatan kegiatan jasa, perdagangan, dan agroindustri.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan dengan mempehatikan keseimbangan ekosistem.
7. Mewujudkan infrastruktur yang memadai, penataan ruang dan pertanahan untuk meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa sekaligus mengembangkan kepariwisataan.



8. Mewujudkan budaya politik yang demokratis, serta keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum

Pada Perubahan RPD Tahun 2023–2026 Kota Singkawang yang tertuang dalam RPJPD Kota Singkawang, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada bidang.

Tabel 1.63

No	Prioritas Daerah	Uraian
1.	Perokonomian Daerah	▪ Peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa berskala luas. ▪ Perencanaan pengembangan sektor/bidang usaha skala menengah/besar yang dipandang strategis untuk dipromosikan kepada investor luar. ▪ Pengembangan kegiatan penanaman modal di daerah berskala nasional dan internasional. ▪ Pengembangan kawasan perdagangan dan bisnis terpadu di daerah.
2.	Pembangunan Pendidikan	▪ Peningkatan kemampuan akademik dan profesionalisme diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. ▪ Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah). ▪ Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan memenuhi standar. ▪ Peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. ▪ Membaiknya indikator-indikator pembangunan pendidikan (APK SD/MI = 100,0% ; APM SD/MI = 100,0% ; APK SMP/MTs = 100,0% ; APM SMP/MTs = 99,0% ; APK SMA/SMK/MA = 90,0% ; APM SMA/SMK/MA = 80,0% ; AMH usia 15-24 thn = 100,0% ; IPM = 80,0).
3.	Pembangunan	▪ Peningkatan kualitas maupun jangkauan



No	Prioritas Daerah	Uraian
	Kesehatan	cakupan program yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan peningkatan status gizi balita. ▪ Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dan manajemen kesehatan. ▪ Membaiknya indikator-indikator pembangunan kesehatan (AKBayi = 17 per 1.000 kh ; AKBalita = 20 per 1.000 kh ; AKIbu = 250 per 100.000 kh ; AHHidup = 77 thn ; % Balita Gizi Buruk = 0,5%).
4.	Pembangunan Fertilitas dan Keluarga Berencana	▪ Pemantapan dan pengembangan Program KIE dalam menunjang Kesehatan Reproduksi dan partisipasi Pria ber KB (jumlah peserta KB Aktif meningkat menjadi 95,0%). ▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas Kader KB dalam rangka mendorong terwujudnya keluarga berkualitas tinggi.
5.	Pembangunan Ketenagakerjaan	▪ Penurunan angka pengangguran terbuka menjadi 1,8% melalui pembangunan berorientasi padat karya. ▪ Perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan.
6.	Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan penduduk dan keluarga miskin, fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan lainnya sehingga jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 9,0% dan jumlah keluarga berstatus KS I (keluarga miskin) berkurang menjadi 7,7%.
7.	Sarana dan Prasarana	▪ Bidang Transportasi ; pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan target sepanjang $\pm$ 350 Km, pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan sebanyak 30 unit, pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang $\pm$ 85 Km, pembangunan dan peningkatan jembatan $\pm$ 15 unit. Peningkatan infrastruktur dan fungsi Bandar Udara Singkawang. Peningkatan Status dan Pelayanan Pelabuhan Laut Singkawang. ▪ Bidang Sumber Daya Air: Bidang Sumber Air (Daerah Irigasi & Daerah Rawa) : perbaikan



No	Prioritas Daerah	Uraian
		tanggul 22.500 M', perbaikan pintu air 12 unit, pembuatan pintu air 30 unit, perbaikan saluran 75.000 M', pembuatan saluran 40.000 M', pembuatan Jalan Usaha Tani 1.400 M', perbaikan bangunan pelengkap 20 unit, perbaikan bangunan bendung 18 unit, pembuatan bangunan bendung 5 unit dan normalisasi sungai 12.000 M'. ▪ Bidang Informasi dan Telekomunikasi : semakin berkembang dan memasyarakatnya pengguna pelayanan informasi dan telekomunikasi. ▪ Bidang Sumber daya air : peningkatan pelayan air bersih. ▪ Bidang Energi Listrik : kebutuhan akan energi listrik untuk wilayah Kota Singkawang terpenuhi dan sistem manajemen dan tingkat keandalan pelayanan kepada konsumen semakin baik.
8.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
9.	Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;	▪ Menjadikan Kota Singkawang sebagai kota jasa dan tujuan wisata utama yang paling aman dan tertib di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya. ▪ Mengimplementasikan Perda dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan relevansi Perda-Perda yang ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan politik dan hukum yang ada.
10.	Politik dan Pemerintahan	▪ Terwujudnya prototipe sebuah <i>civil society</i> yang kuat di Kota Singkawang. ▪ Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah sepenuhnya didasarkan pada semangat dan prinsip-prinsip <i>good governance</i>.



No	Prioritas Daerah	Uraian
11.	Wilayah dan Tata Ruang	▪ Evaluasi dan revisi tata ruang di semua wilayah disesuaikan perkembangan dan kebutuhan tata ruang kota. ▪ Berkembang pesatnya kawasan baru dan tumbuhnya pusat-pusat industri sebagai fasilitas vital perdagangan regional sesuai dengan RTRK Kota Singkawang.
12.	Budaya dan Agama	▪ Terbangunnya secara signifikan tingkat kesolehan individu dan kesolehan sosial dalam kehidupan masyarakat. ▪ Kearifan lokal menjadi identitas sosial dan budaya, dan terwujudnya <i>civil society</i>.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

TABEL 1.64
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

NO	Program Pembangunan Daerah (RPDP 2023 - 2026)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5	Program Pengelolaan Pendidikan
6	Program Pengembangan Kurikulum
7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
8	Program Pengembangan Kebudayaan
9	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
10	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan



12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
13	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
14	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
15	Program Perlindungan Perempuan
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
17	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
18	Program Perlindungan Khusus Anak
19	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
20	Program Pengendalian Penduduk
21	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
22	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
23	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
24	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
25	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
26	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
27	Program Pengembangan UMKM
28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
29	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
30	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
31	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
32	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
33	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
34	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
35	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
36	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
37	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
38	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan



	Kemandirian Pangan
39	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
40	Program Penyuluhan Pertanian
41	Program Perizinan Usaha Pertanian
42	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
43	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
44	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
45	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
46	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
47	Program Penanganan Kerawanan Pangan
48	Program Pengawasan Keamanan Pangan
49	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
50	Program Pemasaran Pariwisata
51	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
52	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
53	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
54	Program Promosi Penanaman Modal
55	Program Pelayanan Penanaman Modal
56	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
57	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
58	Program Penempatan Tenaga Kerja
59	Program Hubungan Industrial
60	Program Perencanaan Tenaga Kerja
61	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
62	Program Pemberdayaan Sosial
63	Program Rehabilitasi Sosial



64	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
65	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
66	Program Penanganan Bencana
67	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
68	Program Pengembangan Perumahan
69	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
70	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
71	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
72	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
73	Program Kawasan Permukiman
74	Program Penyelenggaraan Jalan
75	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
76	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
77	Program Pengembangan Permukiman
78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
79	Program Penataan Bangunan Gedung
80	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
81	Program Pengelolaan Penerbangan
82	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
83	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
84	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
85	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
86	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
87	Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
88	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
89	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah



	Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
90	Program Pengelolaan Persampahan
91	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
92	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
93	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
94	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
95	Program Penetapan Tanah Ulayat
96	Program Program Pengelolaan Tanah Kosong
97	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
98	Program Penatagunaan Tanah
99	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
100	Program Perekonomian Dan Pembangunan
101	Program Pendaftaran Penduduk
102	Program Pencatatan Sipil
103	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
104	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
105	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
106	Program Pembinaan Perpustakaan
107	Program Pengelolaan Arsip
108	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
109	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
110	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
111	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
113	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
114	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
115	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi



116	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
117	Program Kepegawaian Daerah
118	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
119	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
120	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
121	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
122	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
123	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
124	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
125	Program Penyelenggaraan Pengawasan
126	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
127	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
128	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
129	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
130	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
131	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
132	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
133	Program Penanggulangan Bencana
134	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

A. PENDIDIKAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan;
8. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
9. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
10. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
12. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
13. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan.

B. KESEHATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah;



8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peningkatan Pelayanan BLUD;
11. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota;
12. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
14. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota;
15. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
16. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota;
17. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
18. Penerbitan Sertifikat Produk Industri Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
19. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);
20. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
21. Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
22. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;



23. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota;
10. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;
15. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;



16. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
17. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah
Kabupaten/Kota;
18. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;
19. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil konstruksi;
20. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota;
21. Pengawasan Tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
22. Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci
Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
23. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah
Kabupaten/Kota;
24. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota.

D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah;
7. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program kabupaten/Kota;
8. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota;



9. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
10. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10(Sepuluh) Ha;
11. Pencagahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah kabupaten/Kota;
12. Penyelenggaraan PSU Perumahan;

E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penataan Organisasi;
9. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;
12. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peralatan Proteksi Kebakaran;
14. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
15. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;



16. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
17. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
18. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
19. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

F. SOSIAL

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
12. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
13. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
14. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
15. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;



17. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
18. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Basional Kabupaten/Kota.

2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN

A. DASAR TENAGA KERJA

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
2. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah;
4. Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
6. Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Pelembagaan Pengurustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
4. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;



5. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Perlembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
10. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
11. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. PANGAN

1. Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan;
3. Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksabaa Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi;
5. Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
6. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.



D. PERTANAHAN

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
5. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
6. Penerbitan Izin Membuka Tanah;
7. Penerbitan Izin Membuka Tanah;
8. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

E. LINGKUNGAN HIDUP

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
11. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
12. Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
13. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
14. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;



15. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
16. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
18. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota;
19. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota;
20. Pengelolaan Sampah;
21. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta;
22. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

F. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;
3. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

G. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
9. Penataan Pendaftaran Penduduk;
10. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
11. Pelayanan Pencatatan Sipil;
12. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
13. Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan;
14. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Penyusunan Profil Kependudukan.

H. PERHUBUNGAN

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
9. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota;
10. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parker;
12. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
14. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;



15. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota;
16. Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan;
17. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
18. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Kota) Daerah Kabupateb/Kota;
19. Penetapan Tariff Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
20. Penetapan Lintas Penyebrangan Dan Perstujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyebrangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
21. Pembangun, Penerbitan Izin Pembangunan Dna Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
22. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter.

I. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keungan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;



10. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Penyelenggaraan Statistik Sektoran Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
14. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

J. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;



12. Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;
13. Pengmebangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

K. PENANAMAN MODAL

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
11. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenang Daerah Kabupaten/Kota;
12. Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pengendalia Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.



L. KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAAGA

1. Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader;
2. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
5. Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

M.KEBUDAYAAN

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
4. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
5. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
6. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

N. PERPUSTAKAAN

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

O. KEARSIPAN

1. Pengelolaan Arsip Dinams Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
3. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun;
4. Autentikasi Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota.

3. URUSAN PILIHAN

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
5. Pengawasn Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6. Penerbitan Tanda Daftar Usahas Pengelolaan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil;
7. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industry Pengelolaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 8.



B. PARIWISATA

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
9. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
10. Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
11. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
12. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

C. PERTANIAN

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
10. Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;



11. Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
12. Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pengembangan Prasarana Pertanian;
14. Pembangunan Prasarana Pertanian;
15. Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum;
16. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
17. Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medic Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
19. Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
20. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
21. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
22. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
23. Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
24. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

D. PERDAGANGAN

1. Penerbitan Tanda Daftar Gudang;
2. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Di Tempat;



3. Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
4. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya;
5. Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
6. Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan Metrology Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan;
8. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

E. INDUSTRI

1. Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industry Kabupaten/Kota;
2. Penerbitan Izin Usaha Industry (Iui), Izin Perluasan Usaha Industry (Ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Kewenangan Kabupaten/Kota;

4. URUSAN PENUNJANG

A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Perencanaan, Penganggaean, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;



9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Penataan Organisasi;
11. Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan;
12. Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan;
14. Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah;
16. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
17. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam);
18. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan.

B. KEUANGAN

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
10. Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;



11. Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah;
12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Penataan Organisasi;
10. Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN;
11. Mutasi Dan Promosi ASN;
12. Pengembangan Kompetensi ASN;
13. Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

D. PEMERINTAHAN UMUM

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;



5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
9. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik;
10. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
11. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
12. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 dengan maksud mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan mutu pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan



Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM adalah salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini, SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di mana penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, Kota Singkawang telah menetapkan haluan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kebijakan Umum APBD Kota Singkawang Tahun 2023 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari Tahun Pertama Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2023, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023. KUA-PPAS juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2022 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kota Singkawang Tahun 2023, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2021 dapat semakin mengarah pada



meningkatnya kepuasan dan kesejahteraan masyarakat serta pada pencapaian misi dan visi Kota Singkawang.

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, untuk dipedomani seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

TABEL 2.1
CAPAIN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,66	74,13	0,638
2	Angka Kemiskinan	4,67	4,7	0,642
3	Angka Pengangguran	8,63	8,51	-1,39
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,97	5,06	1,811
5	Pertumbuhan Per-Kapita	49,23	52,41	6,459
6	Ketimpangan Pendapatan	0,291	0,274	-5,842

Sumber Data : Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	36,456%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91,183%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		3. Tingkat partisipasi warga negara	80,419%	Dinas Pendidikan dan	-



		usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		Kebudayaan	
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	60.998%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2.	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	5,4637%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	85,714%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	80,384%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	81,902%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-



		persalinan			
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84,836%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	33,251%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73,727%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	10,394%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	43,249%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan	5,9017%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-



		kesehatan sesuai standar			
		11.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32,809%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		12.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	67,943%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		13.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	83,237%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		14.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	85,091%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
3.	Pekerjaan Umum	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	8,6262%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-



		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	13,103%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data tidak dapat ditampilkan karena Dinas PUPR tidak melaksanakan pengelolaan infrastruktur pengamanan pantai disebabkan keterbatasan anggaran.
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	65,062%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		5. Persentase jumlah rumah tangga	94,334%	Dinas Pekerjaan Umum	-



		yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		dan Penataan Ruang	
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	53,022%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR belum melakukan pendataan karena sejak LPJK dibubarkan Lembaga yang menerbitkan sertifikat kompetensi (SKK) hanya berada di Jakarta sehingga sulit untuk mendapatkan data, serta Dinas PUPR tidak memiliki akses ke sistem OSS.
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4.	Perumahan	1. Hunian untuk Penyediaan dan	100%	Dinas Perumahan	-



	Rakyat	rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	
		2. Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	50%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	-
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	50,075%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	-
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,7953%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	-
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	12,888%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	-
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Polisi Pamong Praja	-
		2. Persentase Perda dan Perkada	100%	Polisi Pamong Praja	-



	Perlindungan Masyarakat	yang ditegakkan			
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	119,2%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.0632%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Polisi Pamong Praja	-
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	17,15%	Polisi Pamong Praja	SatPol PP tidak memiliki regu pemadam kebakaran.
6.	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas	20,906%	Dinas Sosial PPPA	-



		terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial PPPA	-
7.	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas PMTK tidak memiliki Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2022 sehingga berdampak pada tidak dapat ditentukannya jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana



					Tenaga Kerja Daerah (RTKD)
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,6147%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	-
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	152,93%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	-
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	12,664%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	-
		5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	42,5%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	-
8.	Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	100%	Dinas Sosial PPPA	-



	Dan Perlindungan Anak	2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100%	Dinas Sosial PPPA	-
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	22,338%	Dinas Sosial PPPA	-
9.	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	41,8%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
10.	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 bahwa Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi izin lokasi. Izin lokasi menjadi kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan



					Ruang (KKPR)
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 bahwa Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi izin lokasi. Izin lokasi menjadi kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan	0	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan belum adanya perolehan data Objek dan Subjek



		Tanah Absentee			Tanah Landereform
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	-
11.	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	66,69%	Dinas Lingkungan Hidup	-
		2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	95,696%	Dinas Lingkungan Hidup	-
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	49,057%	Dinas Lingkungan Hidup	-
12.	Administrasi Kependudukan	1. Perekaman KTP Elektronik	95,85%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-



	Dan Pencatatan Sipil	2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	62,559%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		3. Kepemilikan akta kelahiran	95,752%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	62,069%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
13.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	Dinas Sosial PPPA	Tidak ada wilayah yang berstatus desa di Kota Singkawang
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100%	Dinas Sosial PPPA	Tidak ada wilayah yang berstatus desa di Kota Singkawang
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	2,45%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Perhitungan TFR Tahun 2022 belum tersedia untuk Kota Singkawang karena



	Berencana				BKKBN Pusat belum menyampaikan perhitungan TFR.
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	53,648%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	20,915%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
15.	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1%	Dinas Perhubungan	-
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.28	Dinas Perhubungan	-
16.	Komunikasi Dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan	70,833%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-



		terintegrasi			
		3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	73,647%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
17.	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	42,169%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	46,245%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
18.	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	206,33%	Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja	-
19.	Kepemudaan Dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam	25,143%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-



		kegiatan ekonomi mandiri			
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	28,839%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	22%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
20.	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
21.	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi	41,395%	Dinas Komunikasi dan	-



		pemerintah		Informatika	
22.	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	91,275%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
23.	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	60,1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	67,99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
24.	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	58,594%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan	83,33%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas terkait tidak melaksanakan pendataan keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan



		bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
25.	Kelautan Dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	75,925%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
26.	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	399,07%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	64,079%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
		3. Tingkat Hunian Akomodasi	22,779%	Dinas Pariwisata,	-



				Pemuda dan Olahraga	
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,938%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	9,8915%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
27.	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	414,82 Ton/Ha	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	26,179%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	-
28.	Kehutanan	-	1	Bagian Pemerintahan	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang
29.	Energi Dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	0	Bagian Pemerintahan	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang
30.	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang	100%	Dinas Perdagangan,	-



		memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Perindustrian dan Koperasi	
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	28,126%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
		3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98,658%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
31.	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	18,247%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk	100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	-



		turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		Koperasi	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	10,893%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Data tidak tersedia karena tidak ada data IUI Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Data tidak tersedia karena belum ada penerbitan IPUI oleh instansi terkait.
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Data tidak tersedia karena belum ada penerbitan IUKI dan IPKI oleh instansi terkait.



		Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota			
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Data Industri di Kota Singkawang tidak masuk dalam SIINas, tetapi masuk dalam SIIDa
32.	Transmigrasi		1	Bagian Pemerintahan	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak ada, karena Lembaga PAUD sudah mendapat BOP dari Pemerintah Pusat
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak ada, karena Lembaga PAUD sudah mendapat BOP dari Pemerintah Pusat



		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	429	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-



		sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah			
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggaran tidak mencukupi untuk menampung anggaran perlengkapan peserta didik dimaksud.
		10. Jumlah peserta didik jenjang	0	Dinas	Anggaran tidak mencukupi



		sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Pendidikan dan Kebudayaan	untuk menampung anggaran perlengkapan peserta didik dimaksud.
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18.610	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.016	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah	1.154	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-



		dasar (Negeri dan Swasta)			
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	557	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	973	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	378	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		18. Jumlah kebutuhan minimal	120	Dinas	-



		tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Pendidikan dan Kebudayaan	
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	357	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	210	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	653	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		22. Jumlah pendidik pada	340	Dinas	-



		jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Pendidikan dan Kebudayaan	
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-



		tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	183	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Lembaga PKBM sudah mendapat Bantuan Operasional



		peserta didik dari Pemerintah Daerah			Penyelenggaraan (BOP) dari pemerintah pusat, tetapi jumlah pagu dana BOP Kesetaraan dari pemerintah pusat tidak semuanya memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan lembaga PKBM.
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan terbatas jumlahnya terutama untuk Paket A dan Paket B yang dikenakan biaya yaitu siswa yang berumur 21



					tahun keatas. Untuk penyelenggaraan Paket C semua pembiayaan dibebankan kepada siswa
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1,	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-



		sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
2.	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	7	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	346704	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-



		4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	5082	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10617	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1443	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16974	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1440	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	96708	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-



		10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	2543	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	77060	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	3560	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	130606	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	180	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	41784	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-



				Berencana	
		16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1920	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		17. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	54945	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	60	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	63130	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		21. Jumlah dukungan logistik	150	Dinas Kesehatan	-



		kesehatan yang tersedia		dan Keluarga Berencana	
		22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	30	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	25297	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	47689	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-
		26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	102	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	-



3.	Pekerjaan Umum	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	2046.67 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	130315Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	118100 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	901289 Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		5. Rencana Tata Pengaturan air	1	Dinas Pekerjaan	-



		dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/ kota		Umum dan Penataan Ruang	
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	11495,22 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
		8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	60,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum terdata
		9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	62,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum terdata
		10. Persentase panjang jaringan	70,17	Dinas Pekerjaan	Belum terdata



		irigasi tersier dalam kondisi baik		Umum dan Penataan Ruang	
		11. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen perencanaan dibawah kewenangan di bawah Perumda Air Gunung Poteng
		12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR tidak memiliki JAKSTRADA
		13. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Izin ada pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bukan Tusi PUPR
		15. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan	Data dalam proses pengumpulan



		pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Penataan Ruang	
		16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum ada pelayanan yang menggunakan SPALD S
		17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum ada pelayanan yang menggunakan SPALD T
		18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum ada pelayanan yang menggunakan SPALD S dan SPALD T
		19. Jumlah rumah yang sudah	0	Dinas Pekerjaan	Belum ada pelayanan yang



	menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Umum dan Penataan Ruang	menggunakan SPALD S
20.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum ada pelayanan yang menggunakan SPALD S
21.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum ada pelayanan yang menggunakan SPALD S
22.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
23.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rumah yang lumpur tinjanya diolah belum ada
24.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rumah yang memiliki sambungan dan air limbahnya di oleh IPALD



					belum ada
		25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		26. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada sarana pengangkutan lumpur tinja
		27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum terdata
		28. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		29. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum terdata
		30. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal	1,44%	Dinas Pekerjaan Umum dan	



		dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		Penataan Ruang	
		31. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	1414	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bukan TUSI PUPR
		32. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		33. Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih dalam proses di Bag. Hukum karena ada perubahan aturan yang perlu diperbaiki
		34. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bukan TUSI PUPR
		35. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh	0	Dinas Pekerjaan Umum dan	Bukan TUSI PUPR



		Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		Penataan Ruang	
		36. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	68 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		37. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	5 unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	444,045 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		39. Panjang jalan yang dibangun	0 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		40. Panjang jembatan yg	0,0346 m	Dinas Pekerjaan	



		dibangun		Umum dan Penataan Ruang	
		41. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	5,75 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		42. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		43. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	6,68 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		44. Panjang jembatan yang direhabilitasi	0 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		45. Panjang jalan yang dipelihara	5,06 m	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		46. Panjang	416,55 m	Dinas Pekerjaan	



		jembatan yang dipelihara		Umum dan Penataan Ruang	
		47. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		48. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih di wilayah kabupaten/kota	452	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		49. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten/kota	452	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		50. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi



		dengan data termutakhir			
		51. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tisi Jasa konstruksi
		52. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tisi Jasa konstruksi
		53. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tisi Jasa konstruksi



	berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			
	54. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tisi Jasa konstruksi
	55. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tisi Jasa konstruksi
	56. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tisi Jasa konstruksi



		kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya			
		57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tuisi Jasa konstruksi
		58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan	Belum melakukan pendataan karena tidak



		terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Penataan Ruang	memiliki tusi Jasa konstruksi
		59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi



		jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa



		kab/kota			konstruksi
		65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		66. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi



		69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi
		71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum melakukan pendataan karena tidak memiliki tusi Jasa konstruksi



4.	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	-	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum terdata
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	6	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Tidak terdapat surat ketetapan kejadian bencana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	6 KK	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	6	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Tidak ada kegiatannya dan belum terdata
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	0 KK	Dinas Perumahan.	



		sesuai dengan rencana aksi		Permukiman dan Pertanahan	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Tidak ada kegiatannya dan belum terdata
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Tidak ada kegiatannya dan belum terdata
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	6	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Tidak ada kegiatannya dan belum terdata



		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Tidak ada kegiatannya dan belum terdata
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Tidak ada kegiatannya dan belum terdata
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Tidak ada kegiatannya dan belum terdata
		13. Jumlah rumah tangga	1	Dinas	Tidak ada kegiatannya dan



		penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	belum terdata
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Tidak ada kegiatannya dan belum terdata
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Tidak ada kegiatannya dan belum terdata
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	13,28 Ha	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	



		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	8 unit	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	6,18 Ha	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	
		19. Jumlah rumah di kab/kota	52182 unit	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	
		20. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	208 unit	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	415 unit	Dinas Perumahan.	



				Permukiman dan Pertanahan	
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum tersedia atau terdata dikarenakan belum adanya data base inventarisasi dokumen data tersebut
		23. Rasio rumah dan KK	1,423	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	0 unit	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	10	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum terdata dikarenakan belum selesainya proses pendataan



		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	939	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum terdata dikarenakan belum selesainya proses pendataan
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	939	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum terdata dikarenakan belum selesainya proses pendataan
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi on site / off site)	939	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum terdata dikarenakan belum selesainya proses pendataan
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	4	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum terdata dikarenakan belum selesainya proses pendataan
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	771	Dinas Perumahan.	Belum terdata dikarenakan belum selesainya proses



				Permukiman dan Pertanahan	pendataan
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	6	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum terdata dikarenakan belum selesainya proses pendataan
		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	6	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum terdata dikarenakan belum selesainya proses pendataan
		33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	6	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum terdata dikarenakan belum selesainya proses pendataan
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	82	Satuan Polisi Pamong Praja	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih	1408 orang	Satuan Polisi	



Masyarakat	dan dikukuhkan		Pamong Praja	
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	6	Satuan Polisi Pamong Praja	
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Satuan Polisi Pamong Praja	
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	7	Satuan Polisi Pamong Praja	
	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	857	Satuan Polisi Pamong Praja	
	7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	8. Persentase jumlah penduduk di	0%	Badan	



		kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		Penanggulangan Bencana Daerah	
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		10. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Kota Singkawang belum ada dokumen Renkon
		11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan	0%	Badan Penanggulangan	



		darurat bencana		Bencana Daerah	
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	0 Layanan	Satuan Polisi Pamong Praja	
		20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di	-	Satuan Polisi Pamong Praja	



		kantor kecamatan			
		21. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	Satuan Polisi Pamong Praja	
		22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	-	Satuan Polisi Pamong Praja	
		23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	-	Satuan Polisi Pamong Praja	
		24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud	1	Satuan Polisi Pamong Praja	



		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			
		25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	-	Satuan Polisi Pamong Praja	
		26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	3	Satuan Polisi Pamong Praja	
6.	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3	Dinas Sosial PPPA	
		2. Jumlah data penyandang	1545	Dinas Sosial	



		disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		PPPA	
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Dinas Sosial PPPA	
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	323	Dinas Sosial PPPA	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Dinas Sosial PPPA	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	212	Dinas Sosial PPPA	



		menerima paket permakanan sesuai standar gizi			
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial PPPA	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial PPPA	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	24	Dinas Sosial PPPA	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/	0	Dinas Sosial PPPA	



	shelter			
	11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial PPPA	
	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial PPPA	
	13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial PPPA	
	14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	81	Dinas Sosial PPPA	
	15. Jumlah penyandang	20	Dinas Sosial	



		disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		PPPA	
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	40	Dinas Sosial PPPA	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen	0	Dinas Sosial PPPA	



		kependudukan			
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	5	Dinas Sosial PPPA	
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	4	Dinas Sosial PPPA	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	4	Dinas Sosial PPPA	



	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	44	Dinas Sosial PPPA	
	22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	441	Dinas Sosial PPPA	
	23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	441	Dinas Sosial PPPA	
	24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2	Dinas Sosial PPPA	
	25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial PPPA	
	26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	169	Dinas Sosial PPPA	
	27. Jumlah pekerja sosial	81	Dinas Sosial	



		professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		PPPA	
7.	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Belum dilaksanakan sehubungan terbatasnya pagu anggaran
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Belum dilaksanakan sehubungan terbatasnya pagu anggaran
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Belum dilaksanakan sehubungan terbatasnya pagu anggaran
		4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0%	Dinas Penanaman Modal dan	



				Tenaga Kerja	
		5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		7. Persentase LPK yang terakreditasi	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Belum dilaksanakan sehubungan terbatasnya pagu anggaran
		8. Persentase LPK yang memiliki perizinan	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Belum dilaksanakan sehubungan terbatasnya pagu anggaran
		9. Jumlah penganggur yang dilatih	0 orang	Dinas	



				Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	0%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		11. Persentase penyerapan lulusan	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Tidak ada yang bekerja di Tahun 2020
		12. Lulusan bersertifikat kompetensi	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		13. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang	-	Dinas Penanaman Modal dan	Belum dilaksanakan sehubungan terbatasnya pagu anggaran



		diberikan pelatihan		Tenaga Kerja	
		14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Belum dilaksanakan sehubungan terbatasnya pagu anggaran
		15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Belum dilaksanakan sehubungan terbatasnya pagu anggaran
		16. Data tingkat produktivitas total	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Belum dilaksanakan sehubungan terbatasnya pagu anggaran
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	0%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	



		18. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai	-	Dinas Penanaman Modal dan	



		peserta BPJS Ketenagakerjaan		Tenaga Kerja	
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		23. Jumlah mogok kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		24. Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		26. Jumlah perselisihan antar	0	Dinas	



		Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		27. Jumlah perselisihan PHK	- Kasus	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	- Orang	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0 Kasus	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang	0	Dinas Penanaman Modal dan	



		diberdayakan		Tenaga Kerja	
		31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Tidak ada (Perusahaan belum melaporkan lowongan kerja kepada Dinas terkait)
		33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	



		35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Tidak ada tenaga fungsional pengantar kerja sehingga proses pengantar terkendala (tidak terdaftar)
		36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar	-	Dinas Penanaman	Tidak ada(Belum memahami pelaksanaan penempatan secara



		Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		Modal dan Tenaga Kerja	SISNAKER terhubung belum mengikuti Bimtek)
		40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		42. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	%	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang	%	Dinas Penanaman Modal dan	



		mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		Tenaga Kerja	
		44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Tidak ada (Belum dilakukan pendataan)
		45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Belum terbentuk (Baru proses koordinasi dan konsultasi ke UPT BP2PMI)
8.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	1	Dinas Sosial PPPA	
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	4	Dinas Sosial PPPA	



	3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3	Dinas Sosial PPPA	
	4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	Dinas Sosial PPPA	
	5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	24%	Dinas Sosial PPPA	
	6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	108	Dinas Sosial PPPA	
	7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh	7	Dinas Sosial PPPA	



		pemkab/kota (APBD kab/kota)			
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	33	Dinas Sosial PPPA	
		9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	190	Dinas Sosial PPPA	
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	Dinas Sosial PPPA	
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	10	Dinas Sosial PPPA	
		12. Jumlah kebijakan/program	1	Dinas Sosial	



		pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		PPPA	
		13. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	Dinas Sosial PPPA	
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	26%	Dinas Sosial PPPA	
9.	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tidak ada pergudangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Sngkawang
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	10928	Dinas Pertanian, Ketahanan	Tidak adanya pangan pokok yang disalurkan



				Pangan dan Perikanan	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal tidak ada
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	0	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tidak ada kegiatan/anggaran mengenai kegiatan



				Perikanan	tersebut, akan tetapi PD terkait tetap melaksanakan untuk mengatasi kerawanan pangan berupa pemberian bibit sayuran, bibit cabe dan lain-lain
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tidak ada kegiatan/anggaran mengenai kegiatan tersebut, akan tetapi PD terkait tetap melaksanakan untuk mengatasi kerawanan pangan berupa pemberian bibit sayuran, bibit cabe dan lain-lain
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	30	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan	



				Perikanan	
10.	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	-	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Bukan Tusi Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	-	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum dilaksanakannya kegiatan tersebut
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	-	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Bukan Tusi Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan
		4. Dokumen Izin membuka tanah	100	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum dilaksanakannya kegiatan tersebut



		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan	Belum dilaksanakannya kegiatan tersebut
11.	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan kabkota terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara c. Indeks Kualitas Tutupan Hutan (IKTH)	IKA = 58,33 IKU = 89,65 IKTH = 0	Dinas Lingkungan Hidup	
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	95,7%	Dinas Lingkungan Hidup	
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	13	Dinas Lingkungan Hidup	
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di	0,0013 %	Dinas Lingkungan	



		Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		Hidup	
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	-	Dinas Lingkungan Hidup	Belum ada pendataan MHA di Kota Singkawang
		6. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	-	Dinas Lingkungan Hidup	Belum ada pendataan dan ditetapkannya MHA di Kota Singkawang
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilakukan diklat terhadap lembaga kemasyarakatan namun baru sebatas sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan berbasis



					partisipasi masyarakat
		8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	11	Dinas Lingkungan Hidup	
12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	801	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2. Penerbitan akta perceraian	67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		3. Penerbitan akta kematian	1902	Dinas	



				Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		4. Penyajian data kependudukan	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	Dinas Sosial PPPA	Tidak ada wilayah yang berstatus desa di Kota Singkawang
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	Dinas Sosial PPPA	Tidak ada wilayah yang berstatus desa di Kota Singkawang
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang	-	Dinas Sosial PPPA	Tidak ada wilayah yang berstatus desa di Kota Singkawang



		terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-	Dinas Sosial PPPA	Tidak ada wilayah yang berstatus desa di Kota Singkawang
14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak ada	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	



		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	44%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19079%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang	0	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	



		efektif			
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	-	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	10,46	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	1148	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
15.	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	86%	Dinas Perhubungan	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	56%	Dinas Perhubungan	
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten,	0	Dinas Perhubungan	Bahwa data tersebut tidak ada dalam SK yang



		serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi			mengatur terkait tarif lintas penyeberangan
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	67%	Dinas Perhubungan	
16.	Komunikasi Dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang	3	Dinas Komunikasi dan	



		disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Informatika	
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	



		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	15,57%	Dinas Komunikasi dan Informatika	



		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	



		14. Persentase data yang dapat berbagi pakai	59,15%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang	83,33%	Dinas Komunikasi dan Informatika	



		menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi			
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
17.	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Dinas Perdagangkop dan UKM tidak menerbitkan izin dan untuk penerbitam izin telah dilimpahkan ke dinas penanaman modal dan



					tenaga kerja
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Dinas Perdaginkop dan UKM tidak menerbitkan izin dan untuk penerbitan izin telah dilimpahkan ke dinas penanaman modal dan tenaga kerja
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	



		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		8. Persentase koperasi yang	-	Dinas	



		diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	



		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam	0	Dinas Perdagangan,	



		sistem online data system (ODS)		Perindustrian dan Koperasi	
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	



		20. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
18.	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Dinas Penanaman	



				Modal dan Tenaga Kerja	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Tahun 2020 tidak ada kegiatan pameran Penanaman Modal
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	



		9. Laporan realisasi penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	-	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	0	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	0 data dan informasi	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
19.	Kepemudaan Dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas Pariwisata,	



				Pemuda dan Olahraga	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	37	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		5. Jumlah pelatih olah raga yang	1	Dinas	



		memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	42	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
20.	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Buku profil tersedia di BAPPEDA Kota Singkawang
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	66	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi	12	Dinas Komunikasi dan	Survey statistik sektoral yang dilakukan oleh OPD



		BPS		Informatika	belum ada yang mendapatkan rekomendasi dari BPS
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Survey kompilasi sektoral yang dilakukan oleh OPD belum ada yang mendapatkan rekomendasi dari BPS
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	59%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
21.	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum bisa diamankan secara maksimal karena belum tersedianya peralatan keamanan



		kegiatan strategis yang harus diamankan			persandian
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	80,3%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum ada peralatan kontra penginderaan
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh	100	Dinas Komunikasi dan	Pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) belum



		titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan		Informatika	dilaksanakan karena belum mempunyai alat komunikasi sandi
22.	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



		masyarakat)			
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	149	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak ada cagar budaya yang dibawa keluar daeah/provinsi
		8. Pengembangan cagar budaya	-	Dinas	



		Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		Pendidikan dan Kebudayaan	
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum ada museum di Kota Singkawang
		12. Pengelolaan, pengamanan,	-	Dinas	Belum ada museum di Kota



		pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Pendidikan dan Kebudayaan	Singkawang
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran daerah
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum ada museum di Kota Singkawang
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum ada museum di Kota Singkawang
		18. Penyediaan sarana dan	-	Dinas	Belum ada museum di Kota



		prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Pendidikan dan Kebudayaan	Singkawang
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum ada museum di Kota Singkawang
23.	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar	0	Dinas	



		membaca di masyarakat		Perpustakaan dan Kearsipan	
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24.	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	-	Dinas Perpustakaan	



				dan Kearsipan	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data arsip statis belum di upload dan diverifikasi oleh Arsip Nasional RI
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



		sesuai NSPK di provinsi			
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



		sesuai NSPK			
25.	Kelautan Dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	106 RTP	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tidak adanya tempat pelelangan ikan
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	79	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan	20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tidak ada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan



		pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	8708830 RTP	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
26.	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	59	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		3. Jumlah tanda daftar usaha	400	Dinas	



		pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10171	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam	5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan	



		negeri		Olahraga	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	86,66	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	6	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
27.	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	56	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan	



				Perikanan	
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tidak mengeluarkan izin, hanya menerbitkan rekomendasi
		4. Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tidak mengeluarkan izin, hanya menerbitkan rekomendasi
		6. Persentase fasilitasi penang	26,18%	Dinas Pertanian,	



		7. gulungan bencana		Ketahanan Pangan dan Perikanan	
28.	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	-	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang



				Perikanan	
29.	Energi Dan Sumber Daya Mineral	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang
30.	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Dinas Perdaginkop dan UKM tidak menerbitkan izin dan untuk penerbitan izin telah dilimpahkan ke dinas penanaman modal dan tenaga kerja
		2. Persentase penerbitan TDG	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Dinas Perdaginkop dan UKM tidak menerbitkan izin dan untuk penerbitan izin telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		3. Persentase Gudang yang tidak	-	Dinas Perdagangan,	



	mempunyai TDG		Perindustrian dan Koperasi	
	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	Dinas Perdaginkop dan UKM tidak menerbitkan izin dan untuk penerbitan izin telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
	6. Persentase penerbitan SKA yang	-	Dinas	Dinas Perdaginkop dan



		tepat waktu		Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	UKM tidak menerbitkan izin dan untuk penerbitan izin telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		10. Persentase alat-alat ukur,	-	Dinas	



		takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
31.	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian	



				dan Koperasi	
		a. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		b. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	
		c. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi	



		Kabupaten/Kota			
32.	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	-	Dinas Sosial PPPA	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	-	Dinas Sosial PPPA	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-	Dinas Sosial PPPA	Bukan Tusi Pemerintah Kota Singkawang

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

TABEL 2.4

INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Perencanaan Dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	31,288	Badan Keuangan Daerah	
		Rasio PAD	22,741	Badan Keuangan Daerah	



		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat Kota Singkawang	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat Kota Singkawang	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	77,575	Inspektorat Kota Singkawang	
		Opini Laporan Keuangan	4	Inspektorat Kota Singkawang	LKPD TA. 2021 : WTP
2.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak terdapat proyek konstruksi dengan nilai besar yang dibawa ke tahun berikutnya
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	1,231	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	



		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	74,279	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3.	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	175,385	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	74,232	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7,244	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4.	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5,8701	Badan Keuangan Daerah	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	14,941	Badan Keuangan Daerah	
		Assets Management	50	Badan Keuangan Daerah	



		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,297	Badan Keuangan Daerah	
5.	Transparansi Dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	109.192	Dinas Komunikasi dan Informasi	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	58,333	Dinas Komunikasi dan Informasi	



AKUNTABILITAS KINERJA

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian Tahun 2023 terhadap target Tahun 2023, terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya 107,61% dari target. Untuk mendukung capaian kinerja, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan reviu prioritas pembangunan, penekanan strategi maupun reviu terhadap target kinerja sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada akhir RPD 2023-2026.

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan perjanjian kinerja awal yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,255
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,27
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,93
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	83,15



Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	65,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	53,25
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	685
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	263.625.219.385
	Volume usaha UMKM	792.901.050.097
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,0
	Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,60
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,82
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86,1
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	9,8
	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	25
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,41
	Persentase Penduduk Miskin	4,67
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	84



Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	97,97
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	49,92
	Persentase penduduk berakses air minum	49,42
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	93,8
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	53,02
	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	3,73
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	75,45
	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	99,41

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	66,11
	Timbulan sampah terkelola	99
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	96,24
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
	Nilai Indeks RB	70,01
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	3,33
	Indeks Profesionalitas ASN	59,73
	Indeks SAKIP	63,00
	Persentase implementasi	25,00



	rencana kelitbangan	
	Indeks Inovasi Daerah	58,00
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Integritas	75
Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	6,60
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
	Indeks Risiko Bencana	120

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Singkawang. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut merupakan persentase capaian target yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Hasil atas pengukuran kinerja ini dievaluasi untuk mengetahui kegagalan/keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Pemerintah Kota Singkawang telah menetapkan 17 sasaran strategis dengan 42 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 42 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 19 indikator kinerja atau sebesar 45,24% memiliki capaian melebihi target, 5 indikator kinerja atau sebesar 11,90% sesuai target, 17 indikator kinerja atau sebesar 40,48% tidak mencapai target dan terdapat 1 indikator kinerja atau sebesar 2,38% yang belum dapat diketahui hasilnya karena dalam proses penilaian instansi terkait.



Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Pemerintah Kota Singkawang terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan perjanjian kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,252	72,81	99,40
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,27	8,21	99,27
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,93	12,94	100,08
3	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	83,15	91,82	110,43
4	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	65,00	71,00	109,23
5	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	53,25	66,6	125,07
		Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	685	701	102,34
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65	1,67	101,21



	perlindungan anak dalam pembangunan daerah				
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	263.625.219.385	234.504.378.303	88,95
		Volume usaha UMKM	792.901.050.097	924.086.680.097	116,55
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,0	4,77	119,25
		Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,60	4,25	92,39
7	Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,82	11,32	95,77
		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86,1	83,2	96,63
8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	9,8	9,89	100,92
		Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	25	25,63	102,52
9	Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,41	66,60	95,95
		Persentase Penduduk Miskin	4,67	4,7	99,36



	pekerjaan dan pengentasan kemiskinan				
10	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	84	88,98	105,93
11	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	97,97	99,2	101,26
		Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	49,92	49,92	100,00
		Persentase penduduk berakses air minum	49,42	50,25	101,68
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	93,80	94,34	100,58
12	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	53,02	53,02	100,00
		Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	3,73	3,72	99,73
		Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	75,45	78,98	104,68
		Persentase Kelancaran Lalu Lintas	99,41	99,40	99,99
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	66,11	66,69	100,88
		Timbulan sampah terkelola	99	95,7	96,67



	dikelola				
14	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	96,24	96,24	100,00
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	86,71	100,83
		Nilai Indeks RB	70,01	76,49	109,26
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	3,33	3,33	100,00
		Indeks Profesionalitas ASN	59,73	41,49	69,46
		Indeks SAKIP	63,00	62,29	98,87
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	25,00	100,00	400,00
		Indeks Inovasi Daerah	58,00	53,33	91,95
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	n/a	Masih penilaian
		Indeks Integritas	75	74,33	99,11
17	Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan	Indeks Toleransi	6,60	6,50	98,48



	bangsa dan politik				
18	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00
		Indeks Risiko Bencana	120	155,47	77,19

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan capaian tahun sebelumnya diperlukan untuk mengetahui peningkatan kinerja yang digambarkan sebagaimana berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,18	72,46	72,81
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,9	8,19	8,21
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,91	12,92	12,94
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	100	100	91,82
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	-	89	71,00
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	49,68	52,72	66,6
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	533,75	681,55	701
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,5	1,61	1,67



dalam pembangunan daerah			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	253.966.051.385	232.813.093.303	234.504.378.303
	Volume usaha UMKM	782.901.050.097	851.999.320.097	924.086.680.097
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	3,68	8,67	4,77
	Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,58	3,22	4,25
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,89	11,82	11,32
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	81,6	85,7	83,2
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	7,62	9,77	9,89
	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	5,39	17,8	25,63
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,31	68,86	66,60
	Persentase Penduduk Miskin	4,83	4,67	4,7



Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	51,764	70,93	88,98
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	91,42	97,91	99,2
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	82,38	64,98	49,92
	Persentase penduduk berakses air minum	40,09	49,08	50,25
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	94,02	94,22	94,34
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	58,67	60,24	53,02
	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	4,06	4,1	3,72
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	71,53	73,52	78,98
	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	98,81	99,4	99,40

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5



Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	63,85	66,05	66,69
	Timbulan sampah terkelola	51,32	95,68	95,7
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	-	34,23	96,24
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,04	85,62	86,71
	Nilai Indeks RB	60,16	63,37	76,49
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	2,6	2,6	3,33
	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	59,73	41,49
	Indeks SAKIP	61,86	62,88	62,29
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100,00
	Indeks Inovasi Daerah	70,63	57,18	53,33
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	Belum rilis
	Indeks Integritas	71,3	73,91	74,33
Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	6,48	6,583	6,50
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100
	Indeks Risiko Bencana	155,47	155,47	155,47



2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan target RPD tahun 2026 sebagaimana table berikut:

Tabel 2.3.4.1

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target RPD Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah 2026	Realiasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,63	72,81	97,56
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,51	8,21	96,47
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,96	12,94	99,92
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	84,54	91,82	108,61
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	75	71,00	115,05
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	54,86	66,6	121,40
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	699	701	100,29
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,56	1,67	93,41



pembangunan daerah				
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	293.625.219.385	234.504.378.303	79,87
	Volume usaha UMKM	822.901.050.097	924.086.680.097	112,30
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,15	4,77	114,94
	Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,65	4,25	91,40
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,97	11,32	94,57
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	87,4	83,2	95,19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah 2026	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	9,85	9,89	100,41
	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	28	25,63	91,54
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,06	66,60	93,72
	Persentase Penduduk Miskin	4,16	4,7	92,13



kemiskinan				
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	87	88,98	102,28
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	97,97	99,2	101,08
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	30,05	49,92	166,12
	Persentase penduduk berakses air minum	50,36	50,25	99,78
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	94,57	94,34	99,76
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	56,41	53,02	93,99
	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	3,64	3,72	102,20
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	81,61	78,98	96,78
	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	99,44	99,40	99,96
Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	66,41	66,69	100,42



hidup dan sampah yang dikelola	Timbulan sampah terkelola	100	95,7	95,70
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	99,2	96,24	97,02
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	86,71	98,53
	Nilai Indeks RB	70,3	76,49	108,81

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah 2026	Realiasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	86,71	98,53
	Nilai Indeks RB	70,3	76,49	108,81
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks SPBE	3,36	3,33	99,11
	Indeks Profesionalitas ASN	69,14	41,49	60,01

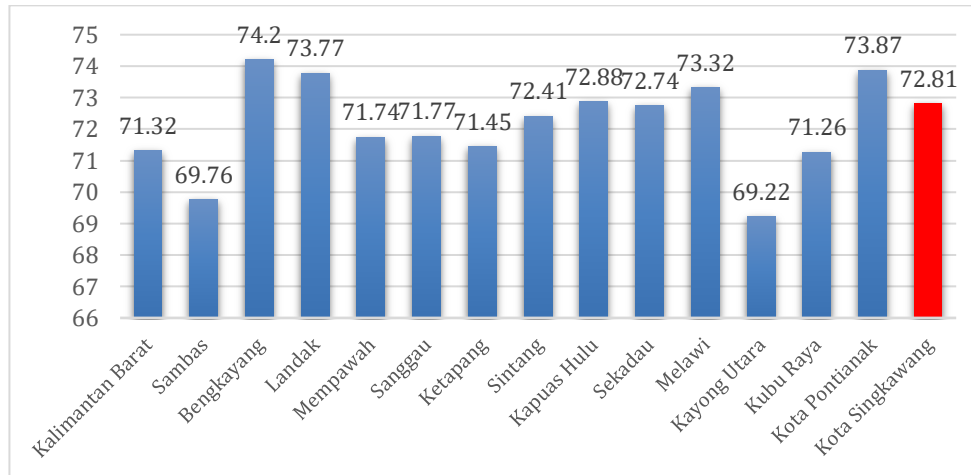


penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SAKIP	64,00	63,00	97,33
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100,00	100,00
	Indeks Inovasi Daerah	61	53,33	87,43
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	n/a	n/a
	Indeks Integritas	77,5	74,33	95,91
Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	6,7	6,50	97,01
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00
	Indeks Risiko Bencana	110	155,47	70,75

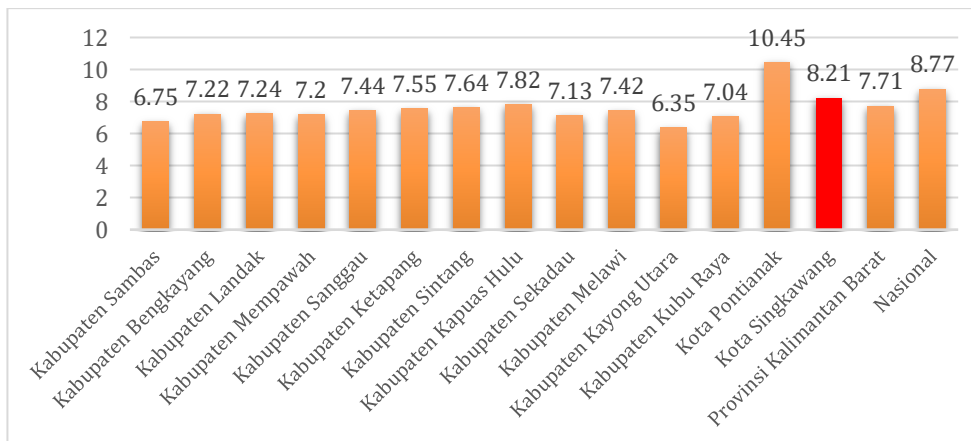


2.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional, Capaian Provinsi dan/atau Capaian Kabupaten/Kota Terdekat (Benchmark Kinerja)

Grafik 2.1 benchmark kinerja capaian AHH Tahun 2023

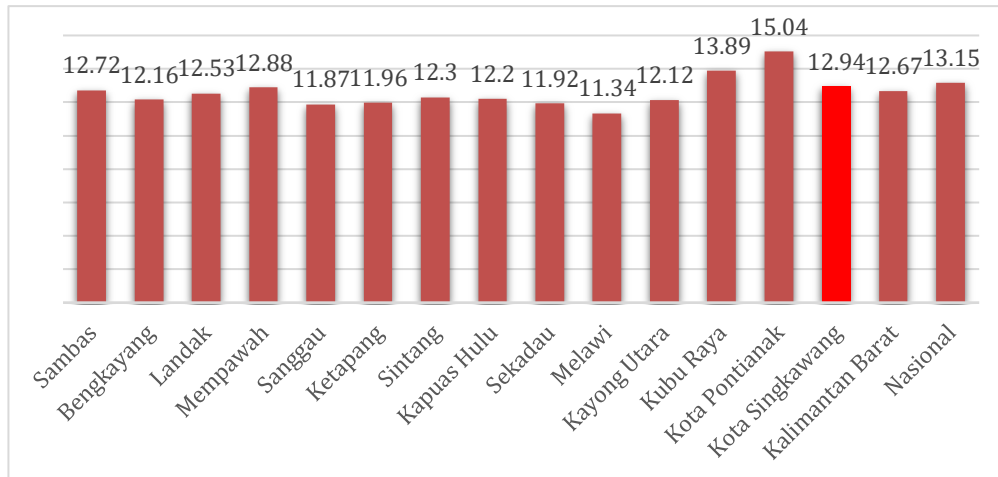


Grafik 2.2 benchmark kinerja capaian Rata2 Lama Sekolah Tahun 2023

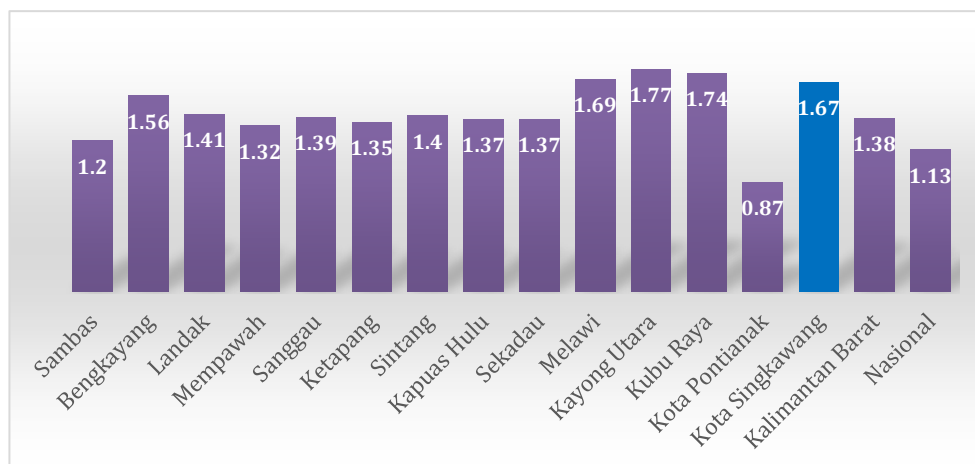




Grafik 2.3 benchmark kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023



Grafik 2.4 benchmark kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023

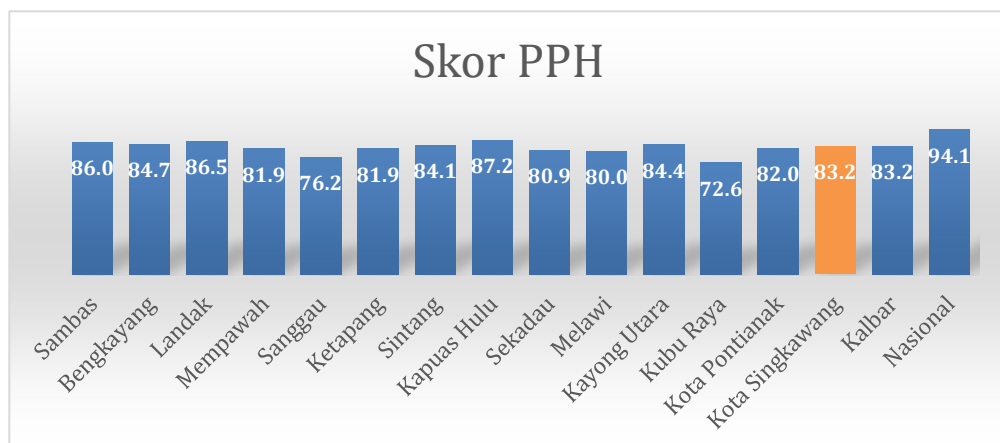




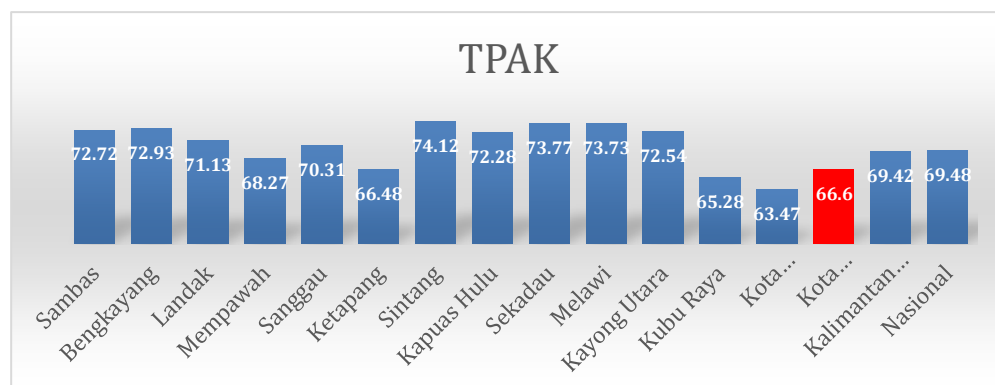
Grafik 2.5 benchmark kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2023



Grafik 2.6 benchmark kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2023



Grafik 2.7 benchmark kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023

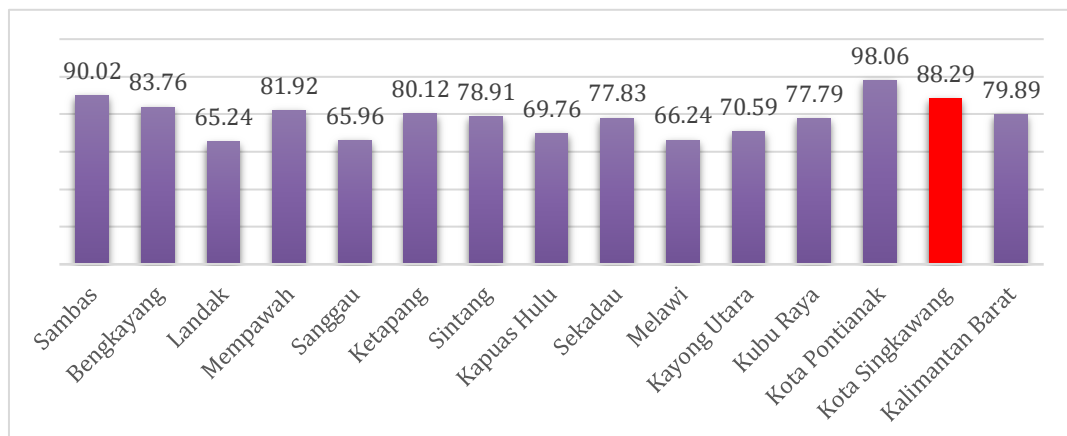




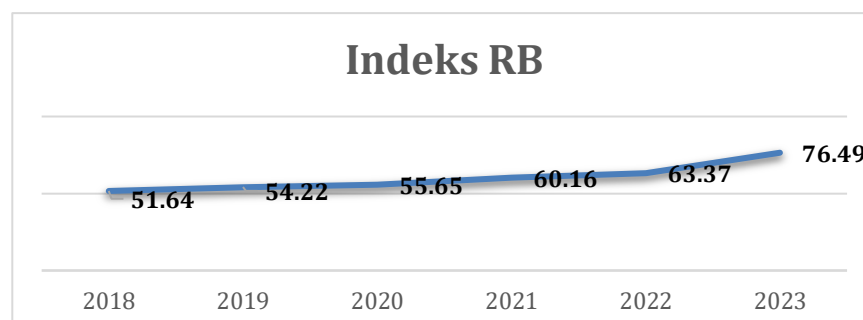
Grafik 2.8 benchmark kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023



Grafik 2.9 benchmark kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Layanan Sanitasi Layak Tahun 2023

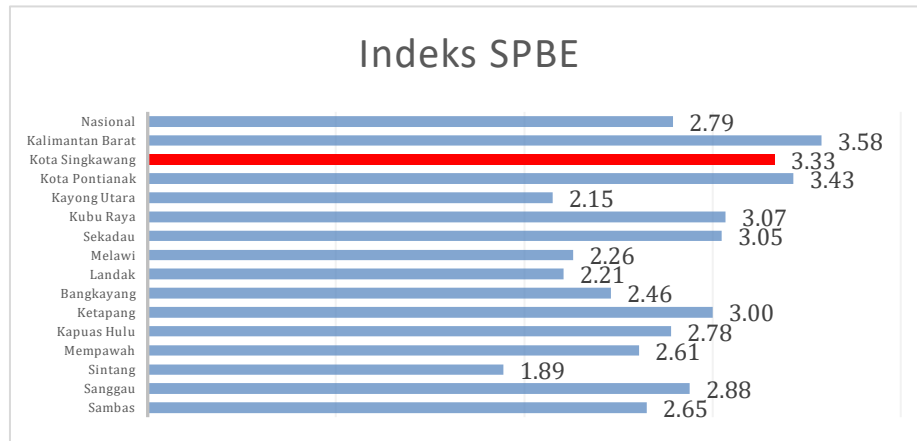


Grafik 2.11 Indeks Refomasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang

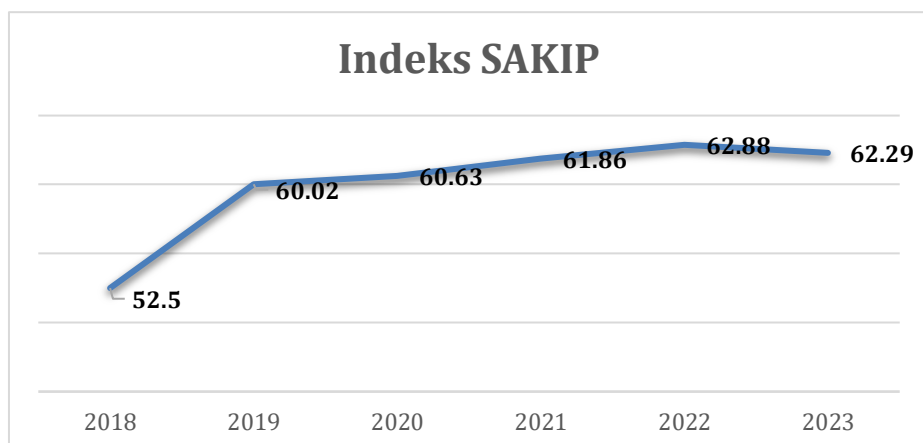




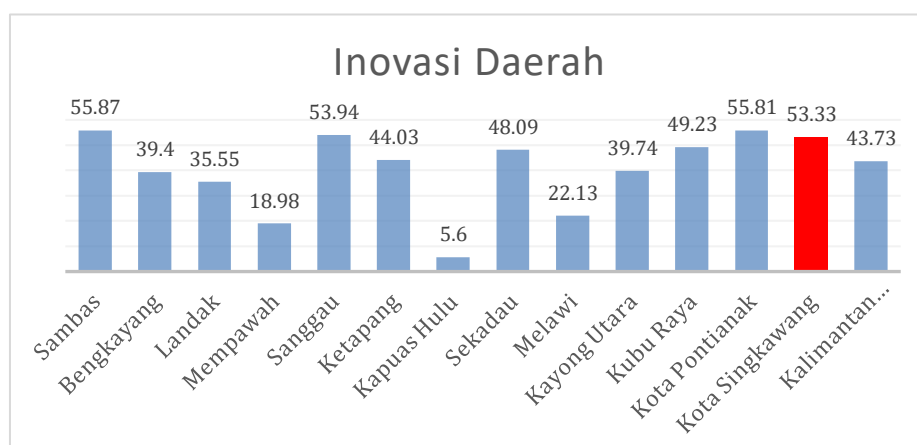
Grafik 2.12 benchmark kinerja Nilai SPBE Tahun 2023



Grafik 2.13 benchmark kinerja Indeks SAKIP

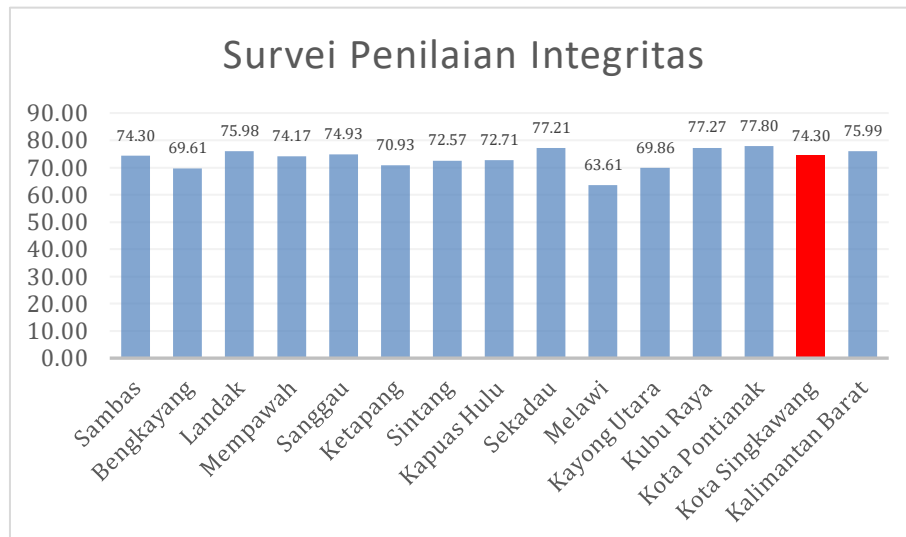


Grafik 2.14 benchmark kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023





Grafik 2.15 benchmark kinerja Indeks Integritas Tahun 2023



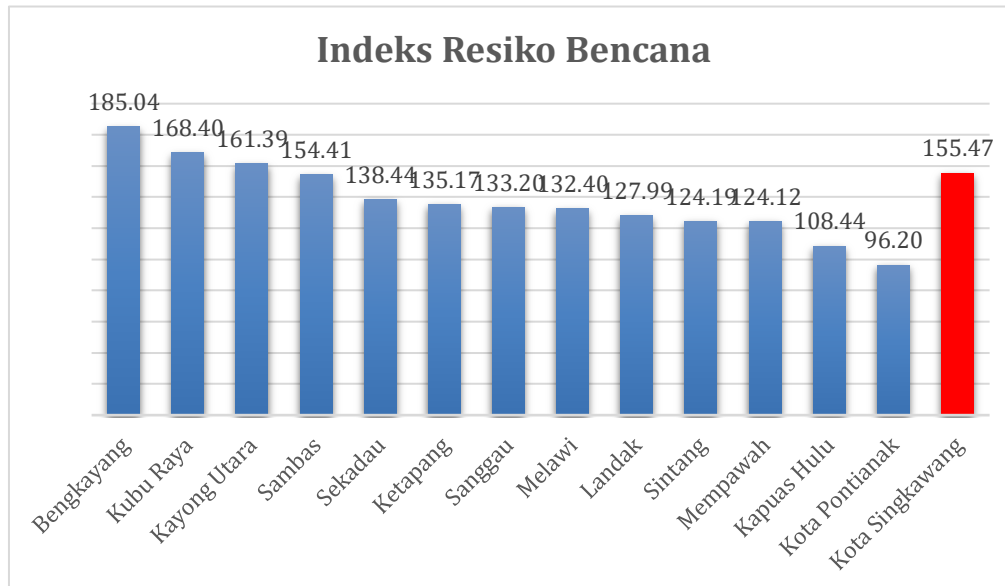
Grafik 2.16 benchmark kinerja Indeks Toleransi Tahun 2023



Sumber : Setara Institute



Grafik 2.17 benchmark kinerja Indeks Resiko Bencana Tahun 2023



2.3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.

1. Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup capaian 99,44%.

Untuk mengukur IPM dimensi umur panjang dan hidup sehat pada metode lama dilakukan dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. AHH setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana data yang disajikan pada tabel. Saat ini untuk perhitungan IPM dilakukan dengan menggunakan metode baru, yang mana pada dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Umur Hidup Sehat Lahir (UHH). UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,61 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota



Singkawang adalah 73,81 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 74,42 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,28 tahun (0,38 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,22 persen per tahun).

Adapun yang upaya yang dilakukan dalam pencapaian target dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana aksi yang kegiatan
- b. Peningkatan sarana prasarana kesehatan
- c. Sosialisasi kesadaran untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi baru lahir
- d. Sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

Selain itu terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelayanan pada upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - b. Masih kurangnya pemenuhan SDM Kesehatan
2. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator angka rata-rata lama sekolah (capaian 99,27%) dan angka harapan lama sekolah (capaian 100,08%).

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, selama periode 2020 hingga 2023, HLS Kota Singkawang rata-rata meningkat 0,10 persen per tahun. HLS 2023 meningkat 0,02 tahun (0,15 persen) dibandingkan 2022, meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,08 persen).

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Memberikan layanan yang optimal dan maksimal kepada warga sehingga tetap dapat mendapatkan pendidikan sekolah dasar sampai selesai, layanan tersebut



berupa fasilitas pendidikan yang memadai, biaya pendidikan gratis, serta menyediakan perlengkapan belajar berupa buku pembelajaran.

- Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada penduduk tentang pentingnya pendidikan usia dini, dan disertai dengan bantuan pendidikan dari pemerintah kepada setiap layanan pendidikan berupa BOP PAUD
- Evaluasi secara berkala terhadap lembaga pendidikan kesetaraan agar kualitas layanan semakin ditingkatkan sehingga lembaga dapat diakreditasi.
- Melakukan pemetaan terhadap guru sehingga mendapatkan data yang valid, sehingga pemerataan guru ke sekolah menjadi lebih baik dan memperkecil ketimpangan terhadap kekurangan guru di setiap sekolah.

Adapun yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yaitu :

- Validasi data masih belum bisa optimal 100% dikarenakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih belum diisi oleh operator sekolah karena terbatasnya sumber daya.
- Angka partisipasi kasar jenjang TK masih rendah (di bawah 50%) dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak pada usia dini, serta fasilitas pendukung pada TK Negeri masih minim sehingga masyarakat masih harus perlu mengeluarkan biaya untuk pendidikan di TK Swasta.

3. Sasaran strategis Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya, dengan indikator Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan, capaian 110,43%.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan, tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan situs.



Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Secara intensif melakukan bimbingan dan koordinasi kepada pegiat kebudayaan Kota Singkawang serta memberikan dukungan terhadap kegiatan kebudayaan dengan cara melaksanakan event kebudayaan Kota Singkawang secara rutin
- Melakukan kegiatan/event kesenian tradisional secara intensif di setiap sekolah serta pegiat kesenian di Kota Singkawang
- Melakukan identifikasi terhadap Objek Diduga Cagar Budaya Kota Singkawang secara intensif dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim ahli untuk menetapkan ODCB menjadi Cagar Budaya Kota Singkawang.

4. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga, dengan indikator Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda, capaian 109,23%.

Pada tahun 2023 event olahraga yang diikuti oleh kontingan Kota Singkawang adalah Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pada event ini terealisasi sebesar 71% dari target sebesar 65%. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi olahraga dan pemuda.
- Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga
- Pembinaan dan pelatihan kepada atlet, pelatih maupun juri atau wasit.
- Pelaksanaan kompetisi atau kejuaraan yang kompetitif.

5. Sasaran strategis Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu :

a. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan dengan capaian 125,07%.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang



aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. TPAK Perempuan pada Tahun 2023 sebesar 66,6 persen, naik 13,88 persen poin dibanding Tahun 2022. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Singkawang yaitu dengan memberdayakan perempuan melalui pelatihan khusus serta pelibatan dalam organisasi perempuan dalam usaha mengurangi diskriminasi terhadap gender. Pelatihan tersebut sangat diperlukan terutama bagi perempuan yang sudah berumah tangga agar tetap memiliki aktivitas lain yang dapat membantu perekonomian keluarga.

b. Skor Tingkat Capaian Kota Layanan Anak dengan capaian 125,18%.

Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak. Skor tingkat capaian KLA Pemerintah Kota Singkawang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Dukungan Pimpinan Daerah, OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat dalam melaporkan penerapan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan di Kota Singkawang terutama pada saat proses verifikasi lapangan hybrid yang dilakukan Tim dari Kementerian PPPA yang langsung dihadiri Oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang didampingi Tim Gugus Tugas KLA Kota Singkawang. Komitmen yang luar biasa dari tim GT KLA yang dapat dengan segera melengkapi data verifikasi lapangan yang masih kurang dan harus dilengkapi dalam tenggat waktu 2 hari. Selain itu implementasi partisipasi anak melalui forum anak yang telah didukung oleh OPD terkait dan sinkronisasi data informasi yang disampaikan oleh anak berdasarkan pemahaman dan pengalaman anak yang nyata. Forum Anak menjadi objek verifikasi lapangan tim penilai KLA yang terpisah dari Tim Gugus Tugas KLA sehingga pernyataan kelompok



anak benar-benar didasarkan pemahaman dan pengalaman anak, bebas dari intervensi orang dewasa.

- Salah satu kelompok sasaran dalam kegiatan ini yaitu Satuan Pendidikan mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini juga didukung dengan adanya program pemerintah pusat mengembangkan satuan tugas pencegahan kekerasan pada anak disekolah. OPD Pengampu urusan pendidikan dan satuan pendidikan berperan aktif mengangkat isu perlindungan anak di sekolah dengan melibatkan dinas PPPA. Pembinaan Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak ditunjang OPD Pengampu Urusan Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat Peduli Pendidikan di Kota Singkawang. Selain itu, OPD Pengampu Urusan Kesehatan juga telah melakukan pembinaan pada Puskesmas Ramah Anak terkait isu penanganan Kekerasan pada Anak dengan melibatkan Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini terus didorong pengembangan Rumah Ibadah Ramah Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang sudah dilakukan pertemuan dan terus dilakukan pembinaan berkesinambungan.
- Pemanfaatan layanan pengaduan secara online melalui SaPA dan pengaduan langsung yang terus disempurnakan dan disosialisasikan dalam setiap kesempatan penyuluhan. Pengembangan SaPA 008 untuk koordinasi penanganan kekerasan dengan OPD Pengampu Urusan pendidikan dan Satuan Pendidikan yang baru diinisiasi pada akhir tahun 2023 dalam kegiatan Seminar SRA dan terus dalam proses pengembangan. Sudah terjalin baiknya penanganan kasus secara berjejaring dengan pihak terkait, dan peningkatan koordinasi internal dalam penanganan dan rujukan kasus terutama dengan bidang RPJS.

c. Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian 101,21%.



Jumlah penduduk Kota Singkawang tahun 2023 adalah sekitar 246.112 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang pada tahun 2023 adalah sebesar 1,67 persen. Angka ini lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk pada 10 tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk di Kota Singkawang adalah sebesar 488 jiwa/km². Artinya, setiap satu kilometer persegi wilayah Kota Singkawang ditempati oleh penduduk sebanyak 488 jiwa. Dalam upaya menahan laju pertumbuhan penduduk di Kota Singkawang dilakukan strategi sebagai berikut ;

- Pelaksanaan Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Komitmen bersama dari Pimpinan dan Unit Pelaksana hingga dukungan Lintas Sektor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal.

6. Sasaran strategis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, yang terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu :

a. Volume Usaha Koperasi, dengan capaian 88,95%.

Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan sekitar 0,73% dibandingkan tahun 2022. Namun peningkatan tersebut masih belum mencapai nilai tahun 2021. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- Belum tersedianya regulasi yang mengatur pembagian sektor-sektor usaha koperasi
- Belum optimalnya kualitas SDM pengelola koperasi dalam penyusunan laporan koperasi

Dalam mengatasinya hambatan dan kendala tersebut dilakukan hal sebagai berikut :



- Bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pembuatan regulasi yang mengatur pembagian sector-sektor usaha koperasi.
 - Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi
 - Meningkatkan jumlah pendamping dalam pendidikan dan latihan perkoperasian.
- b. Volume usaha UMKM, dengan capaian 116,55%.
- Volume usaha UMKM pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,46% dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut berarti telah melewati dari target yang ditetapkan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam peningkatan kinerja tersebut yaitu sebagai berikut :
- Meningkatkan jiwa kewirausahaan pada kelompok UMKM
 - Pembinaan dan pengembangan kreatifitas kelompok UMKM dalam mengembangkan daya jual produk.
 - Pemberian bantuan sarana prasarana pendukung usaha UMKM
 - Fasilitasi dan sosialisasi pengurusan NPWP dan perizinan secara online.
- c. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, dengan capaian 119,25%.
- Pertumbuhan PDRB pada tahun 2023, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, nilai pertumbuhannya telah melampaui target. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :
- Memberikan kemudahan dalam penerbitan surat rekomendasi tanda daftar gudang.
 - Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
 - Meningkatkan pengawasan distribusi barang perdagangan dan memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga barang
 - Mendorong pelaku usaha perdagangan untuk berinovasi dalam memperoleh peluang pasar khususnya dalam hal pemasaran produk melalui media elektronik



-
- Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha perdagangan tentang manajemen usaha.
- d. Pertumbuhan PDRB sektor industri, dengan capaian 104.42%.
- Pertumbuhan PDRB sektor industri tahun 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,25%. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :
- Meningkatkan kualitas daya saing produk IKM melalui berbagai pelatihan untuk peningkatan kualitas produk yang dihasilkan
 - Melakukan sosialisasi dalam memperoleh perizinan IKM
 - Melaksanakan bimbingan kepala pelaku IKM
7. Sasaran Strategis Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan, yang terdiri 2 (dua) indikator yaitu :
- a. Distribusi PDRB sektor Pertanian dan Perikanan, dengan capaian 95,77% :
- Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :
- Adanya alih fungsi lahan dari lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan non produktif
 - Sebagian petani padi masih berdifat subsistem, berorientasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.
 - Minat generasi muda sebagai petani cenderung semakin berkurang karena alternative pekerjaan di sector lain.
 - Ketergantungan petani, peternak dan nelayan terhadap bantuan pemerintah
 - Munculnya penyakit hewan menular strategis / Zoonosis.
 - Pengawasan terhadap Pangan Asal Hewan (PAH) belum maksimal.
- Dalam mengatasi hambatan atau kendala dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- Optimalisasi lahan sawah melalui identifikasi lahan-lahan yang berpotensi, meningkatkan indek pertanaman serta penggunaan bibit unggul.



- Memberikan pelatihan agribisnis serta mengubah mindset agar tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah
- Peningkatan kapasitas kelompok melalui diklat-diklat agar poktan kuat, mandiri dan berkembang.
- Mengoptimalkan peran dari Puskesmas dalam rangka mencegah dan mengendalikan Penyakit Hewan Menular Strategis /Zoonosis.

b. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi, dengan capaian 96,63%

Dalam upaya peningkatan skor PPH Konsumsi dilakukan strategi sebagai berikut :

- Optimalisasi kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L) untuk dikembangkan semakin luas
- Pengujian terhadap keamanan pangan melalui rapid test kit
- Pembinaan rutin kepada kelompok wanita tani dalam pemanfaatan pangan lokal

8. Sasaran strategis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, dengan indikator PAD Sektor Pariwisata (capaian 100,92%) dan Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif (capaian 102,52%).

Pada sasaran ini hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Masih banyak objek destinasi pariwisata yang belum di kelola secara maksimal
- Promosi pariwisata tingkat nasional maupun internasional masih terbatas
- Pengemasan daya tarik wisata yang kurang menarik
- Kualitas pelayanan wisata yang belum baik
- Aksesibilitas pariwisata yang belum memadai.
- Keterbatasan sumber daya untuk dapat memfasilitasi seluruh pelaku ekonomi kreatif

Untuk mencapai target kinerja dilakukan beberapa upaya yaitu :

- Pelaksanaan event daerah
- Penyediaan sarana prasarana pada destinasi pariwisata



- Melakukan promosi pariwisata melalui media sosial, website dan media partner lainnya.
 - Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan dan prioritas.
9. Sasaran strategis Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan, dengan indikator sebagai berikut :
- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (capaian 95,95%)
- Adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :
- Masih terdapat beberapa perusahaan yang belum menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro sehingga Pemerintah Daerah minim informasi dalam penyusunan kebijakan Rencana Tenaga Kerja Kota Singkawang.
 - Hasil dari Perencanaan Tenaga Kerja sebagai bahan informasi pasar kerja belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan melainkan pada tahun berikutnya.
 - Kurangnya informasi lowongan kerja dari perusahaan, sehingga pelayanan antar kerja kurang maksimal
 - Minimnya pengetahuan pencari kerja dalam menggunakan aplikasi SIAP KERJA
 - Belum tersedianya data keanggotaan dari masing masing Asosiasi / Himpunan pengusaha yang ada sehingga belum dapat dilaksanakan sosialisasi regulasi tentang ketenagakerjaan.

Untuk mencapai target kinerja dilakukan beberapa upaya atau strategi yaitu sebagai berikut :

- Pembinaan dan pembuatan Rencana Tenaga Kerja (RTK) mikro di perusahaan dalam merencanakan kebutuhan pekerja dan pengembangan SDMnya kedepan untuk meningkatkan produktivitas di Perusahaan
- Melakukan program pelatihan pencari kerja
- Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk



kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri, yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Singkawang.

- Memberikan fasilitasi layanan ketenagakerjaan terkait pencegahan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial. Indikasi keberhasilan program ini adalah dilihat dari Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan.

b. Persentase Penduduk Miskin (capaian 99,36%).

Persentase penduduk miskin setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, adapun kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Belum terpadunya database intervensi dalam penanggulangan kemiskinan
- Belum terpadunya perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan
- Belum optimalnya kapasitas SDM dalam penanggulangan kemiskinan
- Masih lemahnya pengawasan pelaksanaan program dalam penanggulangan kemiskinan
- Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan

Dalam upaya mencapai target kinerja dilakukan upaya atau strategi sebagai berikut :

- Penyediaan data terpadu kesejahteraan sosial
- Melakukan pemetaan program penurunan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Penyaluran bantuan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat
- Pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola penanggulangan kemiskinan



- Meningkatkan kolaborasi dengan unsur pentahelix dan stakeholders lainnya dalam penanganan kemiskinan
- Pelaksanaan kerja sama penanggulangan kemiskinan yang kolaboratif

10. Sasaran strategis Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan indikator Persentase PPKS yang Tertangani, capaian 105,93%.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Dalam penanganan PPKS terdapat hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Jumlah PPKS yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial cenderung mengalami peningkatan
- Koordinasi antar dinas atau stakeholders terkait yang belum optimal
- Jumlah PPKS yang lebih banyak dibanding kemampuan pelayanan yang diberikan

Sebagai upaya peningkatan kinerja dilakukan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengaktifkan, membuka layanan jejaring sosial berkoordinasi dengan opd terkait baik vertikal maupun horisontal serta dinas provinsi
- Melibatkan dinas dan stakeholders terkait maupun dunia usaha dan masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan sosial
- Peningkatan kualitas PSKS agar penanganan dan pelayanan terhadap PSKS lebih optimal
- Melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat bantuan penerima makanan sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran
- Pemberian bantuan kepada kelompok rentan disesuaikan dengan hasil assement dilapangan
- Melakukan MOU dan melakukan pengawasan dalam rehab ODGJ di Rumah Sakit Jiwa



11. Sasaran strategis Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar, yang terdiri 4 (empat) indikator yaitu :

a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, dengan capaian 101,26%.

Dalam upaya pencapaian kinerja, masih terdapat hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Belum adanya regulasi daerah terkait petunjuk teknis Rumah Tidak Layak Huni
- Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki RTLH tidak memiliki bukti kepemilikan/alas hak yang sah/menumpang, sehingga tidak bisa diberikan bantuan perbaikan rumah.
- Masih kurangnya swadaya masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah layak dan sehat.

Dalam pencapaian kinerja dilakukan strategi atau kiat dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Mengupayakan dan meningkatkan kerja sama memberikan bantuan perbaikan RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN, dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS), Bagian Kesra, Dinas Sosial, yang bersumber dari APBD serta berkolaborasi dengan CSR/Swasta/BAZNAS.
- sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya
- Melakukan verifikasi dan pemilahan sesuai kewenangan untuk memudahkan membuat rencana penanganan dan target penuntasan
- Pendataan/updating jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat



b. Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan, dengan capaian 100%.

Dalam penanganan permukiman kumuh terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut :

- Terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha seluas 13,28 Ha, dengan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sampai akhir periode Rencana Pembangunan Daerah.
- Penanganan kawasan kumuh melibatkan banyak stakeholders terkait sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens

Dalam pencapaian kinerja dilakukan strategi atau kiat dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Kolaborasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan.
- Melakukan koordinasi dengan tim KOTAKU dan POKJA PKP dalam perencanaan kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Optimalisasi koordinasi kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP)
- Memfasilitasi pembentukan forum PKP
- Fasilitasi percepatan regulasi bidang sanitasi serta percepatan akses sanitasi
- Pendampingan penggunaan aplikasi SPKP

c. Persentase penduduk berakses air minum, dengan capaian 101,68%.

Meskipun capaian telah melebihi 100%, masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :



- Jumlah sumber mata air yang terbatas dibandingkan peningkatan jumlah penduduk di kota singkawang
- Pada area jalan/gang perumahan yang sempit terdapat saluran drainase, sehingga pemasangan pipa hanya dapat dilakukan di saluran drainase
- Tidak adanya akses untuk memasang pipa pada bahu jalan

Dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- Mencari sumber daya air baru sebagai sumber baku baru
 - Meningkatkan koordinasi dengan dinas dan stakeholders terkait khususnya dalam pembangunan jalan, pemasangan tiang listrik dan pagar rumah warga
 - Memaksimalkan program pemasangan pipa distribusi
- d. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, dengan capaian 100,58%.
- Capaian target melebihi 100%, hal tersebut dilakukan dengan upaya dan strategi sebagai berikut :
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang kepedulian hidup sehat dan bersih
 - Meningkatkan ketersediaan sanitasi individual dan sanitasi komunal
 - Pelaksanaan rehabilitasi sanitasi di lingkungan masyarakat

12. Sasaran strategis Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi, dengan indikator sebagai berikut :

a. Persentase Jalan Mantap, capaian 100%.

Dalam pencapaian kinerja, terdapat hambatan dan kendala yaitu :

- Terbitnya SK Walikota yang baru No. 600.1.7.2/113/PUPR.BMJK TAHUN 2023 dimana ada ruas jalan baru yang masuk sehingga mengakibatkan perubahan jumlah ruas dan perubahan kondisi jalan yang cukup signifikan menurunkan kondisi MANTAP secara keseluruhan
- Tumpang tindih dalam kepemilikan lahan untuk peruntukan jalan
- Ketidaktahuan keberadaan pemilik lahan
- Adanya pemilik lahan yang berada di luar KalBar



Guna mengatasi hambatan dan kendala tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- Refocusing anggaran dalam menangani ruas jalan dengan kondisi jalan yang lebih di prioritaskan
- Melakukan koordinasi dengan ATR BPN selaku ketua tim pelaksanaan pengadaan tanah
- Melakukan konsinyasi (penitipan uang ganti rugi) di Pengadilan Negeri.

b. Persentase Genangan/Banjir Kota Singkawang, capaian 99,73%

Dalam pencapaian kinerja ini terdapat hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang lama
- Berkurangnya daerah resapan air akibat dari alih fungsi lahan
- Terdapat bangunan ditepian sungai sehingga mempengaruhi proses pembangunan turap/tebing.

c. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik, capaian 104,68%.

Capaian target melebihi 100%, hal tersebut dilakukan dengan upaya dan strategi sebagai berikut :

- Proses pengerjaan drainase dengan kondisi yang tidak baik dilakukan lebih awal sebelum musim penghujan
- Normalisasi saluran drainase secara berkala
- Melakukan penertiban bangunan yang menutup saluran drainase
- Optimalisasi survey pendahuluan pekerjaan

d. Persentase Kelancaran Lalu Lintas, capaian 99,99%.

Dalam pencapaian kinerja, terdapat hambatan dan kendala yaitu :

- Belum optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan
- Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan di jalan masih belum optimal

Sebagai upaya pencapaian kinerja dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Peningkatan dan optimalisasi manajemen lalu lintas
- Pengendalian dan pengawasan lalu lintas secara berkala



- Pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir
- Pelaksanaan ANDALALIN yang berkualitas
- Penyediaan dan peremajaan perlengkapan jalan di jalan

13. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola, dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian 100,88%

Capaian target melebihi 100%, hal tersebut dilakukan dengan upaya dan strategi sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menindaklanjuti pencemaran air
- Adanya aksi pembersihan sungai dan selokan secara berkala dari sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat.
- Meningkatkan fungsi penegakan aturan dalam pengelolaan lingkungan terutama terkait usaha/ kegiatan yang akan memulai pelaksanaan pembangunan yang harus sesuai dengan tata ruang.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/ kegiatan dengan memperhatikan dokumen lingkungan yang sudah ditetapkan.
- Rehabilitasi lahan kritis ini mempunyai dampak kedepan dalam peningkatan kualitas lahan, hutan serta kualitas udara.

b. Timbulan Sampah Terkelola, capaian 96,67%.

Dalam pencapaian kinerja, terdapat hambatan dan kendala yaitu :

- Sarana dan prasarana yang belum memadai dan seimbang dengan kebutuhan pengelolaan sampah;
- Kegiatan pengurangan sampah belum optimal dilakukan;
- Terbatasnya SDM untuk kegiatan penanganan dan pengurangan sampah.
- Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah;



- Pemahaman tentang pengelolaan sampah yang masih lemah ditingkat masyarakat dan stakeholder terkait

Guna mencapai kinerja, dilakukan upaya dan strategi sebagaiberikut :

- Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain penambahan kontainer, kendaraan roda 3 untuk dibagikan kepada Kelurahan menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia
- Melakukan pembinaan pengelolaan sampah pada tingkat Kelurahan, pembentukan dan pembinaan Bank sampah unit (tingkat kelurahan, sekolah, unit kerja, Perusahaan), Kerjasama dengan pihak PLTU melakukan pengelolaan sampah untuk bahan bakar, membangun 1 unit depo sederhana untuk kegiatan pemilahan sampah;
- Melakukan evaluasi sistem angkutan dan pengelolan sampah termasuk pemberlakuan jasa angkutan khusus.
- Mengusulkan kebutuhan dan penambahan anggaran kepada TAPD dengan menampilkan kebutuhan dan realisasi anggaran, serta melakukan efesiensi untuk pemeliharaan kendaraan yang ada.
- Melakukan sosialisasi terkait kewajiban pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui penyebaran surat edaran terkait Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah, membuat spanduk tentang pembuangan sampah, meningkatkan informasi terkait pengelolaan sampah melalui media sosial.

14. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan, dengan indikator Ketaatan Terhadap RTRW (capaian 100%).

Dalam pencapaian kinerja ketaatan terhadap RTRW, dilakukan upaya dan strategi sebagai berikut :

- Penyusunan regulasi daerah berupa penetapan ruang terbuka hijau
- Dukungan kebijakan dan komitmen dalam proses penetapan rencana rinci tata ruang serta rencana detil tata ruang
- Melakukan sosialisasi dan kajian penertiban pemanfaatan ruang



- Optimalisasi, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan kebijakan pusat dan daerah

Namun dalam pencapaian kinerja juga ditemui hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Terjadinya konflik kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang
- Penyimpangan dalam pemanfaatan ruang

15. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian 100,83%

Sebagai upaya pencapaian kinerja dilakukan strategi atau kiat yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- Melakukan pendampingan / pembinaan kepada unit penyelenggara pelayanan publik.
- Melaksanakan pemantauan lapangan atas pelayanan publik
- Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan pelayanan publik
- Melakukan tindak lanjut dan evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.

b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, capaian 109,26%.

Sebagai upaya pencapaian kinerja dilakukan strategi atau kiat yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024 yang berpedoman pada Road Map RB Nasional
- Melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada unit kerja pengampu indikator/tematik dengan berpedoman pada modul RB yang disusun oleh KEMENPANRB
- Menyelaraskan rencana aksi RB General dan RB Tematik dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPD/RENSTRA) dan dokumen rencana jangka pendek (RKPD/RENJA)



- Memastikan seluruh indikator dalam RB General dan RB Tematik dilaksanakan oleh unit kerja pengampu.
- Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala pelaksanaan RB

Namun dalam pencapaian kinerja juga ditemui hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Terdapat rencana aksi yang belum berjalan sesuai target yang ditetapkan
- Pada komponen RB General yaitu indikator indeks kualitas kebijakan dan indeks reformasi hukum belum dilaksanakan penilaian
- Sebagian kecil unit kerja pengampu RB General dan RB Tematik masih dibimbing dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB

16. Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks SPBE, dengan capaian 100%.

Capaian indeks SPBE telah mencapai target, hal tersebut dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- Pemenuhan dan penerapan aspek Teknologi, Informasi dan Komunikasi dengan melakukan pengembangan aplikasi, layanan pusat data fisik maupun *cloud*, layanan jaringan intra dan penggunaan sistem penghubung layanan.
- Penyusunan *Master Plan Smart City* yang merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Smart City sebagai guiding dalam pembangunan Kota Singkawang berbasis teknokrasi dan kota cerdas.
- Penggunaan TTE sebagai pengamanan informasi perangkat daerah.

Selain itu terdapat hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja tersebut yaitu sebagai berikut :



- Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik (PPID) pada perangkat daerah masih belum berjalan secara optimal
- Bahasa pemrograman yang terus berkembang dengan berbagai versi
- Sering terjadi gangguan pada sistem informasi seperti *hacker* dan *bug* pada website.
- Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang masih belum dapat dipahami dan dipenuhi oleh perangkat daerah.
- Terbatasnya SDM pengelola TIK terutama dalam pengelolaan keamanan informasi.

b. Indeks Profesionalitas ASN, dengan capaian 69,46%.

Capaian indeks profesionalitas ASN masih belum mencapai target, adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Kesalahan dalam pengisian capaian dan target pada indikator pengembangan dan perencanaan kompetensi pegawai
- Pelaksanaan mutasi ASN harus melalui proses yang ditetapkan BKN sehingga terdapat proses yang memerlukan koordinasi ke BKN Kanreg V Jakarta.

Dalam pencapaian target dilakukan upaya yaitu sebagai berikut :

- Pemanfaatan digitalisasi dalam proses kepegawaian
- Pembinaan pegawai yang dilakukan melalui zoom meeting
- Pengisian jabatan fungsional melalui pembukaan formasi CPNS dan P3K yang disesuaikan kebutuhan
- Meningkatnya jumlah PNS yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan tinggi
- Pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat teknis/fungsional.

c. Indeks SAKIP, dengan capaian 98,87%.

Capaian indeks SAKIP masih belum mencapai target belum mencapai target, adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :



- Kualitas RPD yang menurun dibanding tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan penurunan nilai komponen perencanaan.
- Terdapat ketidakselarasan dokumen perencanaan baik level Pemda maupun level Perangkat Daerah
- Penjenjangan kinerja yang disusun belum sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 89 Tahun 2021
- Pengumpulan dan pengukuran kinerja masih dilakukan secara manual
- Crosscutting kinerja yang disusun belum efektif dalam pencapaian kinerja
- Pengukuran kinerja individu masih belum terlihat keterkaitan dalam mengawal capaian kinerja outcome
- Belum terdapat reward and punishment, penentuan mutasi dan rotasi pegawai serta penilaian talent pool yang digunakan dalam pengukuran kinerja
- Benchmark kinerja yang disajikan masih belum dilakukan di semua indikator yang bersifat makro
- Informasi dalam pelaporan kinerja masih belum sempurna
- Belum dilakukan pemantuan atas tindak lanjut PD atas hasil evaluasi internal secara berkala
- Evaluasi internal belum memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam pencapaian target dilakukan upaya yaitu sebagai berikut :

- Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP
- Melakukan perubahan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah
- Melakukan reviu dan perubahan pada Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
- Melakukan pemanfaatan aplikasi E-SAKIP Provinsi Kalimantan Barat melalui Perjanjian Kerja Sama antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang



- Menyajikan data benchmark kinerja dengan membandingkan realisasi nasional maupun se Kalbar atas indikator yang bersifat makro pada laporan kinerja.

d. Persentase implementasi rencana kelitbangan

Capaian kinerja dari implementasi rencana kelitbangan dapat tercapai 400%, adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Penguatan kerjasama antar pemerintahan daerah, perguruan tinggi & lembaga lainnya, baik dalam aspek substansi pelaksana kelitbangan, aspek penguatan SDM & pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.
- Pemantapan komitmen pimpinan dan para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan peran dan fungsi litbang dalam penyelenggaraan pembangunan.
- Memaksimalkan fungsi litbang sebagai "*Think-tank*" yang kritis dalam menjawab permasalahan yang berkembang di daerah.

e. Indeks Inovasi Daerah, dengan capaian 91,95%.

Dalam pencapaian kinerja indeks inovasi daerah, terdapat hambatan atau kendala yaitu sebagai berikut :

- Masih rendahnya tingkat invensi dan difusi inovasi dan teknologi di tingkat pemerintah maupun masyarakat
- Kurangnya kesadaran akan pentingnya inovasi sebagai sarana untuk memudahkan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi kinerja.

Sebagai upaya dalam mencapai kinerja dimaksud, dilakukan strategi atau kiat yang dilakukan yaitu :

- Memaksimalkan penerapan Inovasi Daerah
- Mendorong penciptaan dan penerapan inovasi di setiap Perangkat Daerah melalui pemberian reward dan insentif oleh Kepala Daerah.
- Menyelenggarakan kegiatan kompetisi penciptaan dan penerapan inovasi yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat.

f. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, dengan capaian belum diketahui.



Dalam upaya mencapai opini WTP pada laporan keuangan, dilakukan strategi atau kiat yaitu sebagai berikut :

- Penguatan komitmen dari seluruh perangkat daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- Penyusunan dan pengesahaan APBD yang selalu tepat waktu.
- Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan SKPD yang optimal.
- Penyajian laporan keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintah.
- Pendataan ulang kepada wajib pajak atau intensifikasi.

g. Indeks Integritas, dengan capaian 99,11%.

Dalam pencapaian kinerja indeks integritas, terdapat hambatan atau kendala yaitu sebagai berikut :

- Belum seluruh ASN memahami dan melaksanakan implementasi SPIP sebagai bagian dari pengendalian intern pada Perangkat Daerah
- Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan materil yang mengakibatkan kerugian daerah masih lambat dalam progres penyelesaiannya, dikarenakan ada yang sudah tidak diketahui keberadaannya, ASN yang sudah pensiun dan ada juga yang sudah meninggal dunia.
- Adanya tugas tambahan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang jadwalnya telah disusun dalam PKPT.

Sebagai upaya pencapaian kinerja dilakukan hal sebagai berikut :

- Konsistensi dan komitmen pimpinan terhadap penyelenggaraan SPIP;
- Konsistensi komitmen bersama dari seluruh ASN Inspektorat Kota Singkawang untuk mempertahankan Level Maturitas SPIP sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya
- Pelaksanaan sosialisasi secara terus menerus terkait penyelenggaraan SPIP kepada Perangkat Daerah;



- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Maturitas SPIP pada perangkat daerah yang dilakukan secara berkala;
- Menyusun rencana aksi atas tindak lanjut hasil evaluasi SPIP;
- Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3;
- Dalam pengendalian intern, salah satunya dengan mengimplementasikan strategi dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan Opini WTP;
- Menyusun perencanaan pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis prioritas dan risiko yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- Reviu dokumen perencanaan secara berkala melalui Sistem e-Sakip;
- Pendampingan dan konsultasi kepada Perangkat Daerah terkait manajemen risiko, pengendalian intern, tata kelola terhadap Perangkat Daerah serta yang beresiko/ menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti probity audit, klinik konsultasi baik Dana BOS maupun PBJ;
- Penguatan aplikasi Whistleblowing System (WBS) terkait pengaduan sebagai bentuk pengendalian terhadap risiko yang kemungkinan muncul;
- Peningkatan kompetensi Kapabilitas APIP baik secara luring maupun daring;
- Pro aktif dalam mencari diklat kompetensi yang dilaksanakan secara daring/online;
- Melaksanakan program pelatihan mandiri dikantor dengan narasumber dari para aparatur pemeriksa yang telah mengikuti diklat dan bimbingan teknis terkait materi pengawasan yang dilakukan setiap bulan;
- Menyusun rencana aksi atas tindak lanjut hasil evaluasi Kapabilitas APIP terhadap Area of Improvement (AoI);



- Menyusun Risk Register Fraud untuk meminimalisir terjadinya risiko fraud; dan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara berkala.

17. Sasaran strategis Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik, dengan indikator Indeks Toleransi (capaian 98,48%).

Kota toleran adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial. Sedangkan Indeks Kota Toleransi (IKT) adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Capaian indeks toleransi secara target belum mencapai target, akan tetapi secara peringkat Kota Singkawang masih kokoh di peringkat pertama sebagai kota paling toleran. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Menempatkan visi toleransi sebagai ruh dalam pemajuan toleransi dalam dokumen perencanaan daerah.
- Menempatkan generasi muda sebagai ujung tombak dalam menjaga kontinuitas tata kelola keberagaman yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.
- Keberadaan regulasi daerah yang secara nyata memberikan kontribusi dan akselerasi bagi pemajuan toleransi di Kota Singkawang.
- Melakukan berbagai inisiatif, terobosan, dan kolaborasi oleh elemen pemerintah kota dan masyarakat.



18. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator sebagai berikut :

a. Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum, capaian 100%

Persentase ketentraman dan ketertiban umum mencapai target kinerja, adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan melibatkan perangkat daerah terkait guna efektivitas penegakan PERDA ataupun PERKADA.
- Optimalisasi PPNS yang ada pada Satpol PP
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelanggaran PERDA
- Melakukan sosialisasi kebijakan

b. Indeks Risiko Bencana, capaian 77,19%

Capaian kinerja indeks resiko bencana belum mencapai target, adapun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Terbatasnya jumlah personel dalam pengelolaan bencana
- Minimnya diklat pengelolaan resiko bencana
- Evaluasi terhadap kebencanaan yang masih kurang
- Belum terbangunnya komunikasi kebencanaan yang efektif secara terpadu dan terintegrasi.



2.3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.7

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,25	72,81	99,40	48.526.507.162	45.692.285.050	94,16	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			99,40	% Capaian Anggaran		94,16	n/a
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,27	8,21	99,27	100.872.381.990	99.825.419.653	98,96	
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,93	12,94	100,08				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			99,68	% Capaian Anggaran		98,96	n/a
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang	83,15	91,82	110,43	2.125.278.800	2.104.805.071	99,04	



	dilestarikan							
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			110,43	% Capaian Anggaran		99,04	11,39
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	65,00	71,00	109,23	1.454.994.107	1.435.433.759	98,66	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			109,23	% Capaian Anggaran		98,66	10,58

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	53,25	66,6	125,07	4.240.474.550	3.921.443.020	92,48	
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	685	701	102,34				
	Laju Pertumbuhan	1,65	1,67	101,21				



pembangunan daerah	Penduduk							
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			109,54	% Capaian Anggaran		92,48	17,06
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	263.625.219.385	234.504.378.303	88,95	5.297.235.908	5.078.248.408	95,87	
	Volume usaha UMKM	792.901.050.097	924.086.680.097	116,55				
	Volume usaha perdagangan	1.458.240.576.000	1.839.732.800.000	126,16				
	Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,60	4,25	92,39				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			104,29	% Capaian Anggaran		95,87	8,42

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja	Anggaran	%



		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,82	11,32	95,77	7.872.600.490	7.739.002.603	98,30	
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86,1	83,2	96,63				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				96,20	% Capaian Anggaran		98,30
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	9,8	9,89	100,92	1.364.531.481	1.358.480.276	99,56	
	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	25	25,63	102,52				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				101,72	% Capaian Anggaran		99,56
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,41	66,60	95,95	2.791.151.544	2.580.885.821	92,47	
	Persentase Penduduk Miskin	4,67	4,7	99,36				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				97,66	% Capaian Anggaran		92,47



Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	84	88,98	105,93	928.173.056	883.143.447	95,15	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			105,93	% Capaian Anggaran		95,15	10,78

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	97,97	99,2	101,26	18.654.366.549	17.925.832.462	96,09	
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	49,92	49,92	100,00				
	Persentase penduduk berakses air minum	49,42	50,25	101,68				
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	93,80	94,34	100,58				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			100,88	% Capaian Anggaran		96,09	4,79



Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	53,02	53,02	100,00	112.013.585.354	109.261.479.393	97,54	
	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	3,73	3,72	99,73				
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	75,45	78,98	104,68				
	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	99,41	99,40	99,99				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				101,10	% Capaian Anggaran		97,54

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	66,11	66,69	100,88	7.318.470.270	7.219.676.026	98,65	
	Timbulan sampah terkelola	99	95,7	96,67				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				98,77	% Capaian Anggaran		98,65



Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	96,24	96,24	100,00	6.093.285.399	4.607.645.170	75,62	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			100,00	% Capaian Anggaran		75,62	24,38
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	86,71	100,83	66.301.368.248	61.988.876.832	93,50	
	Nilai Indeks RB	70,01	76,49	109,26				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			105,04	% Capaian Anggaran		93,50	11,55
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	3,33	3,33	100,00	16.365.496.132	13.883.591.573	84,83	
	Indeks Profesionalitas ASN	59,73	41,49	69,46				
	Indeks SAKIP	63,00	62,29	98,87				
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100,00	100,00	100,00				
	Indeks Inovasi Daerah	58,00	53,33	91,95				
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP						



	Indeks Integritas	75	74,33	99,11				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			93,42	% Capaian Anggaran		84,83	n/a

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	6,60	6,50	98,48	13.067.821.736	12.923.885.657	98,90	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			98,48	% Capaian Anggaran		98,90	n/a
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00	1.588.555.900	1.457.077.107	91,72	
	Indeks Risiko Bencana	120	155,47	77,19				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			88,59	% Capaian Anggaran		91,72	n/a
Rata-Rata Seluruh Capaian				107,61	416.876.278.676	399.887.211.328	94,53	
Tingkat Efisiensi								13,08



Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost per outcome* atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja *outcome* adalah sebesar **107,61%** dengan realisasi anggaran sebesar **94,53%**. Capaian kinerja tahun ini menunjukkan bahwa Kota Singkawang sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja daerah.



2.3.8 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Berhasil** dan **Sangat Berhasil** adalah pencapaian pada sasaran :

1. Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kebudayaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :



- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
 - Wirausaha muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
3. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Perlindungan perempuan, dengan capaian 83,33% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Rujukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota



- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan capaian 136,46% dilaksanakan dengan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - e. Perlindungan khusus anak, dengan capaian 85,71% dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Pengendalian penduduk, dengan capaian 95% dilaksanakan dengan kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - g. Pembinaan keluarga berencana (KB), dengan capaian 91,82% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - h. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan capaian 50% dilaksanakan dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan



Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- c. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- d. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), dengan capaian 97.22% dilaksanakan dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- e. Pengembangan UMKM, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- f. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- g. Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, dengan capaian 100%
- h. Standarisasi dan perlindungan konsumen, dengan capaian 95,25% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- i. Peningkatan sarana distribusi perdagangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
- j. Perencanaan dan pembangunan industri, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota



- k. Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b. Pemasaran pariwisata, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - d. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
6. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Sosial, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Rehabilitasi Sosial, dengan capaian 101,08% dilaksanakan dengan kegiatan :



- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
- c. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan, dengan capaian 15,38% dilaksanakan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- d. Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan capaian 101,85% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pemeliharaan Anak Anak Terlantar
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Penanganan Bencana, dengan capaian 117,75% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- 7. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan perumahan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - c. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan



- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan capaian 416,67% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- f. Kawasan permukiman, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)Ha
8. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan jalan, dengan capaian 117,23% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, capaian 487,26% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengembangan Permukiman, dengan capaian 161,12% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota



- e. Pengelolaan sumber daya air (SDA), dengan capaian 153,36% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam satu area Kabupaten / Kota
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- f. Penataan bangunan gedung, dengan capaian 130,28% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- g. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) , dengan capaian 99,81% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



- Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - h. Pengelolaan penerbangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
9. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan penataan ruang, dengan capaian 102,75% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penataan bangunan dan lingkungannya, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelesaian sengketa tanah garapan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.
 - d. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



- e. Program Pengelolaan Tanah Kosong, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - f. Pengelolaan izin membuka tanah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah
 - g. Penatagunaan tanah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
 - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - b. Perekonomian dan Pembangunan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - c. Pendaftaran Penduduk, dengan capaian 140,26% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk



- d. Pencatatan Sipil, dengan capaian 172,28% dilaksanakan dengan kegiatan:
- Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- e. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- f. Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyusunan Profil kependudukan
- g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan capaian 91,74% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan



- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
 - Pelaksanaan Reses
 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- h. Pembinaan perpustakaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- i. Pengelolaan arsip, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- j. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan
- k. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- l. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
- m. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah



- Pembinaan RT
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sedangkan pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPD dan Perjanjian Kinerja yang belum berhasil mencapai target adalah pada sasaran:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan capaian 87,51% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
 - b. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga



-
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan capaian 90,91% dilaksanakan dengan kegiatan
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan pendidikan, dengan capaian 100,06% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pengelolaan Pendidikan Non Formal
 - b. Pengembangan kurikulum, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penetapan Kurikulum Muata Lokal Pendidikan Dasar
 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 - c. Pendidik dan tenaga kependidikan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan



-
3. Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
 - b. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota



- Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
- e. Penyuluhan pertanian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- f. Pengelolaan perikanan tangkap, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- g. Pengelolaan perikanan budidaya, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- h. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- i. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi



- j. Penanganan kerawanan pangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- k. Pengawasan Keamanan Pangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan
 - a. Pengembangan iklim penanaman modal, dengan capaian 80% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - b. Promosi Penanaman Modal, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pelayanan Penanaman Modal, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Penempatan Tenaga Kerja, dengan capaian 50% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja



- Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hubungan Industrial, dengan capaian 50% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- g. Perencanaan Tenaga Kerja, dengan capaian 50% dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- h. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan capaian 50% dilaksanakan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
- 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota



- c. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan capaian 100%.
 - e. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan capaian 92,91% dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan capaian 157% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - g. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - h. Pengelolaan Persampahan, dengan capaian 179.14% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik, dengan capaian 41,09% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- b. Pengelolaan Aplikasi informatika, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- c. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- d. Penyelenggaraan statistik sektoral, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
- e. Kepegawaian daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Mutasi dan Promosi ASN
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- f. Pengembangan sumber daya manusia, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengembangan Kompetensi ASN
 - Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- g. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah



- h. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- i. Penelitian dan pengembangan daerah, dengan capaian 99,07% dilaksanakan dengan kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang serta kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- j. Pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkung Keuangan Daerah
- k. Pengelolaan barang milik daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan barang Milik Daerah
- l. Pengelolaan pendapatan daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- m. Penyelenggaraan pengawasan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- n. Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi



-
7. Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - b. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan capaian 37,44% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - c. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan capaian 92,59% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - e. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan capaian 98,68% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :



- a. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- b. Penanggulangan bencana, dengan capaian 99,41% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pelayanan Informasi rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- c. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

2.3.9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sebagai upaya perbaikan kedepan akan dilakukan dan dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai solusi bagi masalah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas kinerja dan sistem kerja agar dapat dilakukan upaya perbaikan kinerja yang masih belum optimal serta sebagai bahan pertimbangan perencanaan



- pembangunan di masa mendatang;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kinerja guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kota Singkawang terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan;
 4. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus pelayan publik; dan
 5. Melakukan inovasi sebagai upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Bappeda Nomor 000.7/15/BAPPEDA.PERENC-A tanggal 03 Januari 2024, pada Tahun 2023 Kota Singkawang tidak menerima pembiayaan Tugas Pembantuan dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan melalui Bagian, Jenis Pelayanan Dasar pasal 4 yang isinya adalah :

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Dasar; dan
 - c. Pendidikan Kesetaraan.
2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas:
 - a. Pendidikan Menengah; dan
 - b. Pendidikan Khusus.
3. Pendidikan Dasar terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama.
4. Pendidikan Menengah terdiri atas :
 - a. Sekolah Menengah Atas; dan
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan.



4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

TABEL 4.1

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	
			Jumlah penduduk usia sekolah	Target Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	41.659	36.626
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	799	269



3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	8.949	3.288

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun 2023

4.1.3 Realisasi

TABEL 4.2

REALISASI DAERAH PENCAPAIAN INDIKATOR PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Realisasi Tahun 2023			Keterangan
						(permasalahan)
			Jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Capaian (%)	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	41.659	36.626	87,91%	-



		(SD/Mi, SMP/MTs)				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	799	269	33,67%	Masih terdapat banyak penduduk usia 7-18 tahun yang dimungkinkan putus sekolah dan lanjut bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	8.949	3.288	36,74%	Masih sedikitnya layanan pendidikan untuk penduduk usia dini terutama Taman Kanak-Kanak lebih khususnya untuk status TK Negeri. Hal ini disebabkan masih minimnya anggaran untuk pendidikan



						jenjang PAUD yang lebih mengandalkan BOP PAUD.

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun 2023



Adapun Realisasi Pencapaian Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan Dasar Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

a. Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Kabupaten / Kota

Berdasarkan hasil perhitungan pelayanan Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) didapatkan angka capaian sebesar 87,91%, dimana perhitungan tersebut didapatkan dari jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan sebanyak 36.626 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-15 tahun) sebanyak 41.659 orang dikalikan 100.

b. Pencapaian Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Pada Tingkat Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil perhitungan pelayanan Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan didapat angka capaian sebesar 33,67%, dimana perhitungan tersebut didapatkan dari jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan kesetaraan sebanyak 269 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-18 tahun) sebanyak 799 orang dikalikan 100.

c. Pencapaian Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Pada Tingkat Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil perhitungan Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD didapat angka capaian sebesar 36,74%, dimana perhitungan tersebut didapatkan dari jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan Pendidikan Usia Dini 3.288 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah (5-6 tahun) sebanyak 8.949 orang dikalikan 100.



4.1.4 Alokasi Anggaran

Guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran dengan rincian dapat dilihat pada (Tabel 4.3) berikut :

TABEL 4.3
ALOKASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM
BIDANG PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1	Pendidikan Dasar	89.798.469.790	88.785.713.115	98.87 %
2	Pendidikan Anak Usia Dini	8.738.190.300	8.726.000.512	99.86 %
3	Pendidikan Kesenjangan	1.707.240.600	1.768.343.765	103.58 %

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun 2023

▪ Program dan Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kota Singkawang, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang dalam meningkatkan pencapaian SPM Pendidikan Dasar di tahun 2023, diantaranya adalah :

TABEL 4.4
PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	253.208.510.496	245.170.076.154	96,83%
	Program Pengelolaan Pendidikan	100.243.900.690	99.280.057.392	99,04%



No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	55.787.095.312	54.578.719.901	97,83%
2.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34.011.374.478	34.206.993.214	100,58%
3.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.738.190.300	8.726.000.512	99,86%
4.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.707.240.600	1.768.343.765	103,58%

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun 2023

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pengumpulan serta pengolahan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar ini tidak terlepas dari para personil yang telah membantu dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pencapaian juga proses pengumpulan data :

TABEL 4.5

DATA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Pegawai	Jumlah
1	Pejabat Eselon II	1
2	Pejabat Eselon III	5
3	Pejabat Eselon IV	7
4	Staff	34



5	Penilik	1
6	Pengawas SD	2
7	Pengawas SMP	2
8	PKT (Pegawai Kontrak Tahunan)	24
JUMLAH		75

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun 2023

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dari capaian Standar Pelayanan Dasar tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan secara umum, yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan standar pelayanan minimal terutama pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
- Masih terdapat anak yang belum terlayani dalam lembaga PAUD dikarenakan tempat pelayanan pendidikan PAUD masih kurang;
- Perlunya penambahan Unit Sekolah Baru untuk TK Negeri karena masih banyak anak usia 5-6 Tahun yang belum mendapatkan pendidikan TK dikarenakan biaya yang cukup besar untuk masuk ke TK Swasta;
- Kurangnya pemahaman tenaga pendidik terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran;
- Terdapat tenaga pendidik yang masih belum memenuhi standar kualifikasi DIV/S-1;
- Kurangnya tenaga pendidik PNS di jenjang SD dan SMP;
- Tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan masih sangat sedikit, sehingga tenaga pendidik di sekolah merangkap menjadi tenaga kependidikan, dan mengakibatkan tenaga pendidik tidak dapat fokus dalam prose pembelajaran di kelas.

Langkah-langkah penyelesaian masalah :

- Melakukan program kegiatan prioritas di Pelayanan Pendidikan PAUD dengan menggunakan anggaran yang telah ditentukan;



-
- b. Mengajukan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun fasilitas pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri agar pelayanan pendidikan anak usia dini tidak diperlukan pemungutan biasa dari masyarakat;
 - c. Mengadakan pelatihan terhadap tenaga pendidik (guru) mengenai penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah;
 - d. Menambah tenaga pendidik melalui proses perekrutan PPPK oleh Pemerintah Kota Singkawang;
 - e. Melakukan kajian terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan.

Dari capaian Standar Pelayanan Dasar tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan secara umum, yaitu :

Perlunya perhatian lebih dari Pemerintah Kota Singkawang untuk membenahi sistem pendidikan di Kota Singkawang, agar dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi pada lingkup pendidikan.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, ditetapkan 12 (Dua Belas) jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Urusan Kesehatan, yaitu :



TABEL 4.6
JENIS PELAYANAN DASAR URUSAN KESEHATAN KOTA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar



5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 Tahun	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 Tahun ke atas	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam se Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar



9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita diabetes melitus	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan terduga TB	Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga permasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV



				sesuai standar

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2023

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM bidang Kesehatan Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

TABEL 4.7

INDIKATOR TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

No	Indikator	Target Daerah	Hasil Capaian
1	Persentase pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) Sesuai standar	100 %	80.38 %
2	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di fasilitas kesehatan	100 %	81.90 %
3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir usia (0-28 hari) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	84.84 %
4	Cakupan balita (0-59 bln) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	33.25 %
5	Persentase anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100 %	73.73 %



6	Persentase Pelayanan skrining kesehatan usia produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	100 %	10.39 %
7	Cakupan Pelayanan skrining kesehatan usia lansia (60 Tahun) keatas sesuai standar minimal 1 kali seTahun	100 %	43.25 %
8	Persentase pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi Sesuai standar	100%	5.90 %
9	Persentase pelayanan kesehatan bagi penderita DM Sesuai standar	100 %	32.81 %
10	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	67.94%
11	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang terduga TB sesuai standar	100 %	83.24 %
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	85.09 %

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2023

4.2.3 Realisasi

Adapun realisasi SPM bidang Kesehatan Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

TABEL 4.8
REALISASI SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

No	Indikator	Target Jumlah Sasaran	Hasil Capaian	Persentase
1	Persentase pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) Sesuai standar	4527	3639	80.38
2	Persentase Pelayanan kesehatan ibu	4321	3539	81.90



	bersalin sesuai standar di fasilitas kesehatan			
3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir usia (0-28 hari) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4115	3491	84.84
4	Cakupan balita (0-59 bln) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	19792	6581	33.25
5	Persentase anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	35794	26390	73.73
6	Persentase Pelayanan skrining kesehatan usia produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	148497	15435	10.39
7	Cakupan Pelayanan skrining kesehatan usia lansia (60 Tahun) keatas sesuai standar minimal 1 kali se Tahun	28879	12490	43.25
8	Persentase pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi Sesuai standar	76165	4495	5.90
9	Persentase pelayanan kesehatan bagi penderita DM Sesuai standar	6297	2006	32.81
10	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	496	337	67.94
11	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang terduga TB sesuai standar	6025	5015	83.24
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	6117	5205	85.09



Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2023

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang pada Tahun 2023, bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik Bidang Kesehatan dan Dana alokasi Umum dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebesar Rp. 2.686.971.400,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Empat Ratus Rupiah), dengan rincian sebagaimana tertera dibawah ini :

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Pemerintah Kota Singkawang dapat dilihat pada (Tabel 4.9) berikut :

TABEL 4.9
ALOKASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG
KESEHATAN KOTA SINGKAWANG

No	Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator SPM	Jumlah Dana (Rp.)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	487.780.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	106.948.000
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	6.900.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	510.210.000
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	330.800.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	559.469.900
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	31.311.300
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	271.801.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	14.001.000
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	66.740.000



11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis (TB)	143.065.200
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	157.945.000
TOTAL ANGGARAN		2.686.971.400

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2023

4.2.5 Dukungan Personil

Adapun dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel (4.10) berikut :

TABEL 4.10
DUKUNGAN PERSONIL YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG
KESEHATAN KOTA SINGKAWANG

No	Indikator	SDM	Keterangan
1	Persentase pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) Sesuai standar	1317	Dokter/dokter spesialis kebidanan : 11 Bidan : 377 Perawat :1055
2	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di fasilitas kesehatan	1317	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan : 11 Bidan : 377 Perawat : 11
3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir usia (0-28 hari) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1384	Dokter/dokter spesialis Anak : 8 Bidan : 377 Perawat : 11
4	Cakupan balita (0-59 bln) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	2252	Dokter 159 Perawat 1055 Bidan 377 Ahli Gizi 77 Guru Paud 85 Kader Kesehatan 790



5	Persentase anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan Dasar	3394	Dokter / Dokter Gigi 38 Bidan 377 Perawat 1055 Ahli Gizi 77 Tenaga Kesehatan Masyarakat 35 Guru 40 Kader Kesehatan 1938
6	Persentase Pelayanan skrining kesehatan usia produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	417	Dokter 10 Bidan 20 Perawat 30 Ahli Gizi 10 Tenaga Kesehatan Masyarakat 10 Tenaga Non Kesehatan Terlatih 100
7	Persentase Pelayanan skrining kesehatan usia lansia (60 Tahun) keatas sesuai standar minimal 1 kali seTahun	1761	Dokter 10 Bidan 377 Perawat 1055 Ahli Gizi 77 Tenaga Kesehatan Masyarakat 35 Tenaga Non Kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu 366
8	Persentase pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi Sesuai standar	40	Dokter 10 Perawat 20 Bidan 20 Tenaga Kesehatan Masyarakat 10
9	Persentase pelayanan kesehatan bagi penderita DM Sesuai standar	50	Dokter 10 Perawat 20 Bidan 20 Ahli Gizi 10 Tenaga Kesehatan Masyarakat 10
10	Persentase pelayanan kesehatan bagi penderita ODGJ berat Sesuai standar	20	Dokter 10 Perawat terlatih jiwa 10 Tenaga Kesehatan lainnya 10



11	Persentase pelayanan kesehatan bagi terduga TB sesuai standar	59	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru 23 Perawat 15 ATLM 28 Penata Rontgen 4 Tenaga Kesehatan Masyarakat 10 Tenaga Non Kesehatan Terlatih 20
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini pemeriksaan HIV sesuai standar	88	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin 21 ATLM 15 Perawat 16 Bidan 15 Tenaga Kesehatan Masyarakat 10 Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu 25

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2023

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang timbul serta solusi dalam proses penerapaaan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80.38	1. kurangnya pemahaman ibu hamil tentang pelayanan kesehatan bumil sesuai standar. 2. belum semua ibu hamil yang periksa ke faskes mendapatkan pelayanan sesuai standart (kurangnya alat periksa	1. Promosi tentang pelayanan kesehatan bumil sesuai standar. 2. Pemenuhan peralatan Ante Natal Care di faskes dlm menunjang standar 10 T. 3. Penguatan sistim pencatatan dan



			HB terutama di pustu dan PMB). 3. sistim pencatataan yang masih belum optimal.	pelaporan dengan cara pembinaan dan monev secara rutin dan berjenjang serta regulasi terkait pencatatan dan pelaporan.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	81.90	1. Masih adanya pertolongan persalinan oleh non tenaga kesehatan (dukun bayi) 2. sistim pencatatan dan pelaporan yang yang belum optimal.	1. Promosi tentang persalinan yang aman. 2. Penguatan kemitraan bidan dan dukun bayi. 3. Penguatan sistim pencatatan dan pelaporan serta regulasi terkait pencatatan dan pelaporan. 4. Peningkatan kapasitas petugas dalam pertolongan persalinan termasuk kegawatdaruratan obstetri.
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	84.84	1. sarana dan prasarana (untuk pelayanan luar gedung/posyandu belum semua memiliki tempat yang permanen dan kurangnya alat pemantauan tumbuh kembang bayi). 2. partisipasi keluarga untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan	1. Pemenuhan alat pemantauan tumbuh kembang bayi di setiap posyandu. 2. Promosi tentang pelayanan kesehatan bayi sesuai standart. 3. Penguatan sistim pencatatan dan pelaporan dengan melakukan pembinaan dan monev ke faskes



			kesehatan minimal 8x dalam se tahun masih kurang. 3. sistim pencatatan dan pelaporan terutama dari faskes swasta masih belum lengkap terutama alamat dan nik bayi. 4. Pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pelayanan kesehatan bayi belum optimal.	yang melayani kesehatan bayi serta regulasi terkait pencatatan dan pelaporan. 4. Peningkatan kapasitas petugas (berupa pelatihan atau orientasi) dalam pelayanan kesehatan bayi.
4	Pelayanan Kesehatan balita	33.25	1. sarana dan prasarana (tempat posyandu masih menumpang di rumah warga dan kurangnya alat pemantauan tumbuh kembang balita). 2. partisipasi keluarga untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8x dalam se tahun masih kurang. 3. sistim pencatatan dan pelaporan terutama dari faskes swasta masih belum lengkap terutama alamat dan NIK balita.	1. Pemenuhan alat pemantauan tumbuh kembang balita di setiap posyandu. 2. Promosi tentang pelayanan kesehatan balita sesuai standart. 3. Penguatan sistim pencatatan dan pelaporan dengan melakukan pembinaan dan monev ke faskes yang melayani kesehatan balita serta pembuatan regulasi terkait pencatatan dan pelaporan.
5	Pelayanan kesehatan	73.73	1. Data yang diperoleh hanya dari pelayanan di	1. Promosi pelayanan kesehatan anak usia



	pada usia pendidikan dasar		sekolah dan di puskesmas. 2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pelayanan kesehatan anak sekolah. 3. Tim skrining UKS terbatas. 4. sistim pencatatan dan pelaporan terutama dari faskes swasta belum optimal.	pendidikan dasar. 2. Peningkatan kapasitas petugas (berupa pelatihan maupun orientasi). 3. Pengaturan jadwal pelaksanaan skrining anak usia pendidikan dasar dapat dimulai dari awal tahun. 4. Penguatan sistim pencatatan dan pelaporan dengan cara pembinaan dan monev secara berjenjang.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	10.39	1. Data yang di peroleh hanya bersumber dari layanan luar gedung (Posbindu Masyarakat dan Instansi). 2. kurangnya peran serta masyarakat untuk secara aktif melakukan skrining kesehatan di faskes.	1. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis data per by name by adres dengan menggunakan kohort yang telah disiapkan. 2. pelayanan usia produktif di lakukan di luar gedung maupun dalam gedung. 3. meningkatkan upaya edukasi ke masyarakat untuk pro aktif melakukan skrining kesehatan di faskes.
7	Pelayanan kesehatan	43.25	1. alat pemeriksaan kesehatan lansia di	1. Pemenuhan alat lansia Kit di setiap posyandu.



	pada usia lanjut		posyandu masih kurang. 2. partisipasi masyarakat terutama keluarga lansia untuk membawa lansia ke faskes atau posyandu masih rendah. 3. sistim pencatatan dan pelaporan yang belum optimal. 4. SDM yang terlatih tentang pelayanan kesehatan lansia masih sedikit.	2. Promosi tentang pelayanan Lansia sesuai standar. 3. Penguatan sistim pencatatan dan pelaporan program lansia secara rutin dan berjenjang. 4. Peningkatan kapasitas petugas (pelatihan maupun orientasi) dalam pelayanan lansia.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	5.90	1. data penderita hanya bersumber dari layanan di UPT. Puskesmas. 2. Belum semua penderita secara rutin memeriksakan diri tiap bulan ke puskesmas / FKTP lainnya	1. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis data by name by adres dengan menggunakan kohort yang telah di siapkan. 2. melibatkan seluruh sarana fasilitas kesehatan dalam pengumpulan data penderita. 3. meningkatkan upaya edukasi ke masyarakat agar penderita secara aktif dan rutin memeriksakan diri ke faskes sesuai standar yang di tetapkan.
9	Pelayanan	32.81	1. data penderita hanya	1. Penguatan sistem



	kesehatan penderita diabetes melitus		bersumber dari layanan di UPT. Puskesmas. 2. Belum semua penderita secara rutin memeriksakan diri tiap bulan ke puskesmas / FKTP lainnya	pencatatan dan pelaporan berbasis data by name by adres dengan menggunakan kohort yang telah di siapkan. 2. melibatkan seluruh sarana fasilitas kesehatan dalam pengumpulan data penderita. 3. meningkatkan upaya edukasi ke masyarakat agar penderita secara aktif dan rutin memeriksakan diri ke faskes sesuai standar yang di tetapkan.
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	67.94	1. Masih belum maksimalnya penemuan penderita ODGJ di masyarakat sehingga tingkat penanganan / pelayanan kesehatannya juga kurang. 2. masih kurangnya peran keluarga dalam melakukan pengobatan penderita ODGJ secara rutin ke UPT. Puskesmas.	1. penguatan fungsi Tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM) Kota singkawang sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam penanganan ODGJ. 2. Pernguatan fungsi kader kesehatan jiwa di masyarakat sehingga lebih banyak ODGJ yang diketahui / terdeteksi secara dini.



				3. peningkatan upaya edukasi ke masyarakat sehingga pelaporan kasus berbasis masyarakat meningkat dan upaya pelayanan kesehatan jiwa meningkat.
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.	83.24	1. Mesin Tes Cepat Melekuler (TCM) terbatas dari baru tersedia 3 unit TCM sehingga memerlukan waktu tunggu untuk pemeriksaan. 2. data yg diminta di Januari belum Final dikarenakan overload server, Kemenkes menutup SITB tahun 2022 sampai 28 Februari 2023.	1. Penambahan mesin TCM di setiap puskesmas., 2. pengelompokan server pelaporan STIB (Regional Kalimantan).
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	85.09	1. Cakupan pemeriksaan HIV pada ibu hamil dan pasien TB masih belum optimal sehingga mempengaruhi secara keseluruhan capaian SPM program HIV.	1. Melakukan koordinasi lintas Program terutama program KIA. 2. Meningkatkan kualitas pencatatan pelaporan pemeriksaan HIV pada bumil, terutama pada klinik-klinik swasta yang banyak melakukan pemeriksaan kehamilan. 3. Berkoordinasi dengan program TB untuk



	ency Virus)			mengingatkan kembali petugas layanan dalam melaksanakan program TB-HIV.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 29 Tahun 2018, Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup 2 (dua) pelayanan dasar.

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota; dan
2. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan/Permen PUPR Nomor 29/PRT/2018 seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :



Indikator	Sub Indikator
Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain : a. Keruh : air minum keruh, tidak jernih/tidak bening. b. Berwarna : air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa : air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur, rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air. d. Berbusa : air minum mengeluarkan busa biak saat diaduk maupun tidak. e. Berbau : air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023

Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak



termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya.

Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang BAB II - 10 dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara.

Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pelayanan air limbah domestik regional dilaksanakan dengan merujuk pada Pedoman Penyiapan Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).



Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan rincian sebagai berikut :

Indikator	Sub Indikator
Kuantitas	Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik
Kualitas	1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM untuk pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah sebesar 100% di Tahun 2023.

Target pencapaian SPM untuk pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :



TABEL 4.11
TARGET SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Tahun Pencapaian	Target (%)
		Indikator		
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Penduduk berakses air minum	2023	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang bersanitasi baik	2023	100%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023

4.3.3 Realisasi

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2021 adalah 83,6% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.12
REALISASI SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		Indikator			
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh pokok air minum	100%	100%	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		Indikator			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	94,33%	94,33%
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang (%) = 97,16%					

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Indikator pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari memadai diindikasikan dengan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersumber dari PDAM dengan target 100 persen pada tahun 2023 sebanyak 243.335 jiwa yang terlayani dan Pelayanan SPAM bukan Jaringan Perpipaan sebanyak 242.146 jiwa total menjadi 242.146 jiwa dari jumlah penduduk kota Singkawang yang berjumlah 242.146 jiwa (sumber data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang keadaan Desember 2023). Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sehingga untuk persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 100,00% yang bersumber dari PDAM (yang tercatat sebagai pelanggan PDAM) dan Pelayanan SPAM bukan Jaringan Perpipaan.



b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik

Indikator Data yang digunakan pada Tahun 2023 menggunakan data Jumlah Penduduk Akhir Tahun Per Desember 2023 (Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keadaan Desember tahun 2023, karena BPS belum mengeluarkan data resmi pada Tahun berjalan (Th.2022) Jumlah rumah tangga yang bersanitasi baik 45.689 rumah tangga dari 48.429 rumah tangga di Kota Singkawang sehingga persentase rumah tangga yang bersanitasi baik sebesar 94,33 persen, dengan capaian kinerja sebesar 94,33% di tahun 2023 hal tersebut mengandung makna bahwa capaian tersebut termasuk dalam kategori berhasil.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Pemerintah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

TABEL 4.13

**ALOKASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG**

No	Jenis Layanan	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.274.276.199
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.274.276.199
		Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.274.276.199



2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.280.550.150
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.280.550.150
		Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2.280.550.150

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. PNS = 65 orang
- b. P3K = 6 orang
- c. Non-PNS = 68 orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang timbul serta solusi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

Permasalahan 1 :

- 1. Jumlah Sumber mata air yang terbatas dibandingkan peningkatan jumlah penduduk di kota singkawang;
- 2. Pada area jalan/gang perumahan yang sempit terdapat saluran drainase, sehingga pemasangan pipa hanya dapat dilakukan di saluran drainase;
- 3. Tidak adanya akses untuk memasang pipa pada bahu jalan;

Permasalahan 2 :

- 1. Penyedia sanitasi; Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, berupa tangki septik bak kedap air untuk mengolah air



limbah berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan. (Lampiran Permen PUPR No 29/PRT/2018);

2. Sulit untuk mendata penduduk Kota Singkawang yang tidak memiliki sanitasi;
3. Kesulitan dalam proses pekerjaan dikarenakan lokasi berada pada bukit/gunung.

Solusi 1 :

1. Memberikan sosialisasi penggunaan air bersih yang bersumber PDAM kepada masyarakat yang masih terbiasa menggunakan air selain dari PDAM;
2. Pemerintah kota Singkawang khususnya Perumda/PDAM kota Singkawang hendaknya menyusun kembali program untuk melaksanakan program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) seperti yang pernah dilaksanakan tahun sebelumnya;
3. Pemerintah Kota Singkawang hendaknya memaksimalkan program pemasangan pipa distribusi agar pelayanan dapat lebih maksimal;
4. Pemerintah harus menyediakan lahan untuk pemasangan Pipa;
5. Kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber air baku;
6. Dalam pembangunan jalan, drainase jalan, tiang listrik dan pagar rumah warga harus saling koordinasi;
7. Perlu penambahan kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA);
8. Memperluas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Pipa;
9. Pelestarian Sumber Air Baku.

Solusi 2 :

1. Upaya pencapaian penyedia sanitasi yang sesuai dengan standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah Kota Singkawang harus melakukan :



- a. Sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat, sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - b. Sosialisasi pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja yang benar kepada seluruh stakeholder, sesuai standar teknis yang berlaku;
 - c. Sosialisasi penyambungan Sambungan Rumah ke sistem jaringan air limbah.
2. Agar dianggarkan untuk pendataan;
 3. Pelaksanaan pekerjaan diusahakan dilaksanakan pada awal tahun;
 4. Pemerintah mengusahakan pembebasan lahan masyarakat;
 5. Mengoperasikan IPLT yang ada.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan didasarkan pada pelayanan dasar seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

TABEL 4.14

JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	100%	Setiap Tahun



	Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni		

Sumber Data : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian yang telah ditetapkan Daerah dengan batas waktu pencapaian pada (Tabel 4.15) berikut :

TABEL 4.15

**TARGET DAERAH PENCAPAIAN INDIKATOR SPM BIDANG URUSAN
PERUMAHAN RAKYAT**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

Sumber Data : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023

4.4.3 Realisasi

Adapun Realisasi Capaian SPM Daerah Tahun 2023 terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada SPM bidang Perumahan Rakyat seperti disajikan pada (Tabel 4.16). Realisasi capaian masing-masing jenis pelayanan SPM dan indikatornya dengan penjelasan sebagai berikut :



TABEL 4.16
REALISASI CAPAIAN DAERAH TERHADAP TARGET NASIONAL SPM
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator	Target Daerah Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2021
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100 %	100 %	0 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota.	100 %	100 %	0 %

Sumber Data : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023

Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 (Tabel 4.15) :

- Pada Tahun 2023 Triwulan I Bulan Maret, terdapat 6 unit rumah warga yang rusak akibat kejadian bencana angin puting beliung dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan social pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut dengan realisasi fisik 100% sejumlah 6 unit rumah/Kepala Keluarga. Namun tidak termasuk dalam perhitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat, karena kebakaran rumah akibat bencana angin puting beliung merupakan kejadian alam. Realisasi terhadap target daerah seperti disajikan pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16 untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota untuk Kota Singkawang pada Tahun 2023 tercapai (100%).
- Realisasi terhadap target daerah seperti disajikan pada (Tabel 4.15 dan Tabel 4.16) untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota dapat terealisasi (100%).



4.4.4 Alokasi Anggaran

Dalam mendukung SPM Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 di anggarakan melalui APBD-P Tahun 2023 serta pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DISPERKIMTA sebesar Rp. 254.908.800. dengan 1 program, 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Namun realisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan ini dapat dihitung kedalam kategori Capaian SPM sebagaimana penjelasan diatas karena peristiwa kejadian alam sehingga termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat, maka dengan demikian untuk Capaian SPM realisasi anggaran Rp.100% dan fisik 100%.

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam melaksanakan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat, khususnya pada bidang perumahan sebanyak 8 (delapan) orang PNS dan 4 (empat) orang Non PNS (dari sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang PNS dan 15 (lima belas) orang Non PNS pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan wajib perumahan antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota hanya sampai pada tahap Pendataan inventarisasi/identifikasi rumah di lokasi rawan bencana atau yang berpotensi terdampak bencana.
2. Pada tahun 2023 penanganan rumah bagi korban bencana melalui partisipasi aktif warga/swadaya masyarakat, dan Pagu Anggaran terkait Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana yang dialokasikan pada APBD dalam DPA DISPERKIMTA tidak dapat



direalisasikan. Disamping itu, sub sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana merupakan antisipasi/siaga terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara rutin. Bencana yang tidak bisa diprediksi mengakibatkan persiapan untuk administrasi Korban Bencana tidak dapat disiapkan dari awal. Sedangkan pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak korban bencana memakan waktu cukup lama disebabkan proses administrasi harus dipenuhi karena sudah tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada saat bersamaan masyarakat yang terdampak bencana harus ditangani secepatnya.

3. Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu dan sulit diprediksi, potensi kejadian bencana alam antara lain; angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan. Dan dari aspek pencegahan maupun penanggulangan belumlah maksimal dalam mengantisipasi/mengatasi potensi bencana dan penanggulangan Bencana tersebut, Disamping upaya dari Pemerintah Daerah melalui anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah dan juga diperlukan upaya bersama melibatkan Peran serta masyarakat/Dunia Usaha akan perihal tanggap/kesiapsiagaan bencana.

b. Solusi yang ditempuh sebagai berikut :

1. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang muncul agar relokasi dan penyediaan rumah layak huni dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang terkena dampak. Memeriksa kelengkapan berkas dan kesiapan penerima bantuan dalam menerima



bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar administrasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan.

2. Mengidentifikasi SOP agar tidak memakan waktu yang lama dalam pelaksanaan pemberian bantuan kemudian mengusulkan perbaikan SOP pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
3. Sosialisasi Kepada Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak dan sehat secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya. Tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya banjir dan angin puting beliung.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada SPM Trantibumlinmas :



TABEL 4.17
JENIS PELAYANAN DASAR URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Sesuai standar pelayanan	Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada	Setiap Warga Negara yang merasa terganggu dengan K3 (ketenteraman, keindahan dan keamanan) mendapatkan pelayanan sesuai standar
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Sesuai standar pelayanan	korban kebakaran lahan dan bangunan	Warga korban kebakaran lahan dan bangunan mendapatkan pelayanan sesuai standar

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota Singkawang Tahun 2023

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian pelayanan dasar pada bidang Trantibumlinmas pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



TABEL 4.18
TARGET PENCAPAIAN SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG
TRANTIBUMLINMAS

No	Indikator	Target Daerah	Formula	Sasaran	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dibagi jumlah warga yang terkena dampak akibat penegakan PERDA dan PERKADA	Masyarakat Kota Singkawang	$= \frac{629}{629} \times 100\%$ 629 $= 100\%$	100%
2	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Korban kebakaran bangunan yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dibagi dengan jumlah korban kebakaran dan bangunan dikali 100%	Masyarakat Kota Singkawang	$= \frac{50}{50} \times 100\%$ 50 $= 100\%$	100%

Sumber Data : Satpol PP Kota Singkawang Tahun 2023



TABEL 4.19
TARGET PENCAPAIAN SPM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.	Setiap Tahun
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota	Setiap Tahun
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Warga Negara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota	Setiap Tahun

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023

4.5.3 Realisasi

Adapun realisasi pencapaian pelayanan dasar pada bidang Trantibumlinmas tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



TABEL 4.20
REALISASI SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG
TRANTIBUMLINMAS

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM (TUNTAS MUDA)				95.00 %
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				95.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80,00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		692	692	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15,00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	75,00 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit	857	857	100 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	7	7	100 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
	Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)				
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	84	84	100 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	0	0	0 %
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN (TUNTAS MUDA)				96.67 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				95.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		81	81	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	75.00 %
	1 . Pemetaan	dokumen	1	0	0 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
	terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)				
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	240327	240327	100 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	125	125	100 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	10	10	100 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	108	108	100 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-	Orang	125	125	100%



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
	urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)				
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3	1,27	42.33 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				95.00%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	100 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang	Orang	81	81	100 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
	terkena/menjadi korban bencana				
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	0	0	0 %
	4. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	81	81	100 %
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR (TUNTAS MUDA)				96.67 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		50	50	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.67 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	83.33 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	9	9	100%
	2 . prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	2	2	100%



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
	(seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)				
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	unit	26	0	0 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM	Orang	3	3	100%



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output		Total Pencapaian
	damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)				
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	13	13	100%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	13	13	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2023



TABEL 4.21
REALISASI SPM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian (Jumlah Warga)	Indikator Pencapaian (Jumlah Warga)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang terdampak bencana	Jumlah warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	-	-	100%	100%	100
	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga Negara dikawasan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0



	rawan bencana					
	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	-	-	125 Orang	125 Orang	100
	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	-	-	0 Unit	0 Unit	0
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah warga Negara terdampak bencana	Jumlah warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	81 Orang	81 Orang	100
	Sarana Prasarana	-	-	108 Unit	108 Unit	100



	Penanggulan gan Bencana					
	Peningkatan kapasitas personil/Sumb er Daya Manusia (SDM)	-	-	125 Orang	125 Orang	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara terdampak bencana	Jumlah warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan penyelamata n dan evakuasi korban bencana	81 Orang	81 Orang	100
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	-	-	100%	100%	100
	Pendataan terhadap warga yang terkena/menja di korban bencana	-	-	81 Orang	81 Orang	100



Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	-	-	100%	100%	100
Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	-	-	100%	100%	100
Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	-	-	100%	100%	100

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023

4.5.4 Alokasi Anggaran

Guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang TRANTIBUMLINMAS, Pemerintah Kota Singkawang melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran sebagai berikut :



TABEL 4.22
ALOKASI ANGGARAN SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BIDANG TRANTIBUMLINMAS TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	192.092.507
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.777.200
		Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	99.698.400
		Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	36.078.800
		Kegiatan Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	125.263.600
		Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	125.263.600



2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 76.709.985
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.881.800
		Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	36.881.800
		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.098.600
		Sub Kegiatan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	9.098.600
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	49.534.100
		Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	49.534.100

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2023



TABEL 4.23
ALOKASI ANGGARAN SPM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG TRANTIBUMLINMAS TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Anggaran (RP)
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Rp 47.246.400
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp 105.563.900
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp 53.614.350

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam pengumpulan serta pengolahan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) TRANTIBUMLINMAS ini tidak terlepas dari para personil yang telah membantu dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pencapaian juga progres pengumpulan data :

TABEL 4.24
DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS

NO	INDIKATOR	PNS	KETERANGAN
1	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	84	Pejabat struktural, anggota jabatan fungsional satpol pp, dan staf fungsional umum. Catatan: 66 anggota satuan polisi pamong praja 18 pejabat struktural dan staf fungsional umum
2	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang tidak memiliki personil pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang hanya dapat melakukan fungsi koordinasi dalam bentuk pengamanan saat dan pasca kejadian.



	kebakaran		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dilakukan oleh Badan Pemadam Kebakaran Swasta.

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2023

TABEL 2.25
DUKUNGAN PERSONIL APM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

NO	PERSONIL BPBD	JUMLAH (ORANG)
1	Struktural (PNS)	12
2	Non PNS	6
JUMLAH PEGAWAI 2023		18

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang timbul serta solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang TRANTIBUMLINMAS Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

- Permasalahan dan solusi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang :

Permasalahan	Solusi
Masih kurangnya personil yang ada	Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)



Masih kurang fahamnya dan masih minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi PERDA dan PERKADA, khususnya pelanggaran mengenai tatanan new normal sehingga banyak masyarakat, individu serta pelaku usaha yang belum mematuhi protokol kesehatan dan masih banyaknya PKL diruas jalan yang dilarang untuk berjualan	Memberikan himbauan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui media pamflet, spanduk dan patroli monitoring keliling.
Belum optimalnya fungsi satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA	Melakukan usulan penambahan PNS serta regulasi yang sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan dan permasalahan konkuren yang dihadapi oleh pelaksana penegakan PERDA
Tidak adanya aparatur pemadam kebakaran	Membuat rumah jabatan untuk personil aparatur pemadam kebakaran
Pencatatan yang kurang lengkap dan belum sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor
Sistem pelaporan yang belum optimal	Melakukan pembinaan kepada yang menangani laporan
Tidak adanya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Memanfaatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada yakni milik swasta

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2023



b. Permasalahan dan Solusi SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Trantibumlinmas Kota Singkawang :

Permasalahan	Solusi
Minimnya Personil dalam penanggulangan bencana dan administrasi penanggulangan bencana	Perlunya penambahan personil lapangan dan administrasi penanggulangan bencana akan menunjang kinerja BPBD Kota Singkawang agar lebih baik dan administrasi terorganisasi dengan baik
Kebutuhan pemenuhan anggaran	Peningkatan/penambahan anggaran
Belum terealisasinya dokumen pengurangan risiko bencana dalam rencana tata ruang dan dokumen kajian risiko bencana tahun 2023-2027	Belum adanya ketersediaan dokumen pengurangan risiko bencana dan dokumen kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan, sehingga BPBD Kota Singkawang masih menggunakan dokumen tahun sebelumnya
Adanya proses perubahan anggaran	Percepatan pada tahapan proses pembahasan APBD
Jumlah SDM BPBD yang memiliki sertifikat barang/jasa masih sedikit sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa pejabat pembuat komitmen dan panitia/pejabat pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa	Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/karyawati BPBD untuk mengikuti pelatihan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa
Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana	Perlu peningkatan dalam optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana



Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD	Penambahan jumlah personil PNS/ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Struktural maupun Diklat fungsional/bimtek
Kemampuan personil dalam kualitas dan kualitatif masih kurang	Perlu peningkatan dalam kemampuan personil baik kualitas maupun kualitatif
Kurangnya personil dalam bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan	Perlu melakukan penambahan personil dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam kegiatan di lapangan maupun administrasi
Kebutuhan pemenuhan anggaran	Peningkatan/penambahan anggaran
Rendahnya kesadaran masyarakat, dunia usaha untuk berperan serta aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana	Peningkatan kesadaran masyarakat, dunia usaha untuk berperan serta aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana
Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana	Perlu peningkatan dalam optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD	Penambahan jumlah personil PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilingkungan melalui diklat struktur maupun diklat fungsional/bimtek
Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat	Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
Kurangnya personil yang berkompeten dalam bidang KL dan RR BPBD Kota Singkawang	Perlu adanya penambahan personil dalam bidang yang bersangkutan baik



	pesonil lapangan maupun dalam administrasi
Belum optimalnya sistem manajemen penanganan tanggap darurat bencana	Belum peningkatan dalam optimalnya system manajemen penanganan tanggap darurat bencana
Sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai dalam pelayanan evakuasi	Perlu peningkatan dalam sarana dan prasarana

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota;
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;



-
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004;
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
 11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM;
 15. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 17. Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.



18. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

TABEL 4.26
TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja	Formulasi	Data Formulasi	Target	Realisasi
			(%)	(%)	(%)
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti $\times 100\%$ Populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehailitasi Sosial dasar di luar panti	$= \frac{137}{169} \times 100\%$	100	81,07
2.	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan	Jumlah Penyandang Anak Telantar yang terpenuhi	$= \frac{77}{95} \times 100\%$	100	81,05



	Dasarnya di Luar Panti	kebutuhan dasarnya di luar panti $\times 100\%$ Populasi Penyandang Anak Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti			
3.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti $\times 100\%$ Populasi Penyandang Lanjut Usia Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	$= \frac{123}{154} \times 100\%$	100	79,87



4.	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti $\times 100\%$ Populasi Penyandang Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	$= \frac{10}{10} \times 100\%$	100	100
5.	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/ kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya $\times 100\%$ Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan	$= \frac{441}{441} \times 100\%$	100	100



		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			

Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023

4.6.3 Realisasi

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Singkawang Tahun 2021 adalah 59,55 %, dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel (4.27) dibawah ini :

TABEL 4.27
REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Tahun Pencapaian	Capaian Kota			Penjelasan Terhadap Realisasi Penerapan SPM (Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Realisasi Capaian Terhadap Target)
				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang	2023	100,00	81,07	81,07	Banyaknya penyandang disabilitas yang masih



	Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota	Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti					belum menerima program perlindungan kebutuhan dasar. Hal ini dikarenakan terbatasnya pendanaan dan SDM yang berdampak pada pelayanan bagi disabilitas. Dengan keterbatasan ini maka perangkat daerah memilah dan memilih disabilitas yang membutuhkan pertolongan.
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2023	100,00	81,05	81,05	Alokasi anggaran bagi anak terlantar melalui APBD sangat minim



							sehingga tidak dapat mengcover penanganan terhadap anak terlantar karena jumlah anak terlantar cukup besar.
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar panti skala Kab/Kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar panti	2023	100,00	79,87	79,87	Alokasi anggaran bagi lansia terlantar melalui APBD sangat minim sehingga tidak dapat mengcover penanganan terhadap lansia terlantar karena jumlah lansia terlantar cukup besar
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kab/Kot	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2023	100,00	100,00	100,00	Ketersediaan anggaran yang mencukupi dan peran serta PSKS (Potensi



							Sumber Kesejahteraan Sosial) yang optimal.
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	2023	100,00	100,00	100,00	Ketersediaan anggaran yang mencukupi dan peran serta PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang optimal.

Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut:



TABEL 4.28
ALOKASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM
BIDANG URUSAN SOSIAL KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	605.681.556
2	APBN / APBD Provinsi	-
	- Kebencanaan Alam	Barang
	- Kebencanaan Sosial	Barang
	- ASLUT	Barang
	- ASPDB	-
3	Sumbangan Pihak Donatur Bagi PMKS	-
	- Baznas	Barang
	- Masing-masing Yayasan	Barang
Jumlah		605.681.556

Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, sebagai berikut :

a. ASN dan PTT dengan jumlah 9 orang, terdiri dari :

- ASN Kepala Dinas = 1 Orang
- ASN Sekretaris = 1 Orang
- ASN Kasubag PEKK = 1 Orang
- ASN Peksos Bidang RPJS = 5 Orang
- PTT Bidang RPJS = 1 orang



Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

a) PNS = 8 orang

b) Non-PNS = 45 orang

Jumlah = 53 orang

b. Non PNS 86 orang, terdiri dari :

1. Selter = 3 orang

2. PKH = 25 orang

3. Tagana = 28 orang

4. PSM = 30 orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS dapat tertangani dikarenakan jumlahnya yang sangat besar serta beragamnya jenis PMKS;
- b. Keterbatasan anggaran/pendanaan;
- c. Kurangnya SDM yang professional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu;
- d. Pembaharuan pendataan untuk verifikasi/validasi data yang sudah ada;
- e. Tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan diawal tahun akibat adanya reconfusing anggaran;
- f. Minimnya fasilitasi pendukung prasarana seperti selter/rumah singgah;
- g. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor untuk penanganan PPKS lebih lanjut;
- b. Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas



- pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Melakukan MoU dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terkait dengan penanganan PPKS Disabilitas Mental;
 - d. Peningkatan kualitas PSKS yang ada agar pelayanan dan penanganan terhadap PPKS lebih optimal;
 - e. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.
 - f. Mengevaluasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan SPM bidang sosial baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
 - g. Bekerja sama dengan yayasan/pihak-pihak swasta yang bergerak di bidang sosial dalam penanganan PPKS.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Bidang Urusan Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kota Singkawang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang telah melakukan perencanaan dan penganggaran program melalui kegiatan pendukung dalam meningkatkan pencapaian SPM Pendidikan Dasar di tahun 2023, diantaranya adalah :

TABEL 4.28

**PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG**

No	Program Kegiatan	Anggaran Realisasi	Realisasi	(%)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	253.208.510.496	245.170.076.154	96,83%
	Program Pengelolaan Pendidikan	100.243.900.690	99.280.057.392	99,04%
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	55.787.095.312	54.578.719.901	97,83%



No	Program Kegiatan	Anggaran Realisasi	Realisasi	(%)
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.436.075.965	8.396.401.966	99,53%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.626.517.235	1.622.076.800	99,73%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	766.966.500	764.332.214	99,66%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.548.403.500	1.541.942.000	99,58%
	Pengadaan Mebel Sekolah	812.428.200	809.124.000	99,59%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	12.863.582.400	12.844.235.460	99,85%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	155.604.700	154.857.800	99,52%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	379.105.500	267.602.250	70,59%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	43.851.000	43.558.150	99,33%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	68.711.100	68.536.300	99,75%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	99.266.900	98.187.300	98,91%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	76.179.400	75.592.200	99,23%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	27.536.410.027	26.543.788.696	96,40%
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	670.959.985	660.709.200	98,47%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	53.027.700	52.587.800	99,17%



No	Program Kegiatan	Anggaran Realisasi	Realisasi	(%)
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	650.005.200	635.187.764	97,72%
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34.011.374.478	34.206.993.214	100,58%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	282.532.890	274.913.150	97,30%
	Pembangunan Laboratorium	1.216.685.280	991.148.900	81,46%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.339.018.635	3.320.857.341	99,46%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	383.974.000	382.795.800	99,69%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	354.724.000	353.822.758	99,75%
	Pengadaan Mebel Sekolah	251.949.000	248.804.400	98,75%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	9.730.822.100	9.724.766.620	99,94%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	133.665.700	133.037.550	99,53%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.660.000	35.431.635	99,36%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.518.156.500	4.518.016.500	100,00%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	88.619.700	88.176.850	99,50%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	61.976.700	61.873.400	99,83%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.613.589.973	14.073.348.311	103,38%



No	Program Kegiatan	Anggaran Realisasi	Realisasi	(%)
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.738.190.300	8.726.000.512	99,86%
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	131.884.000	131.355.000	99,60%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.317.768.500	2.312.424.500	99,77%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	770.111.000	768.919.500	99,85%
	Pengadaan Mebel PAUD	699.998.300	698.534.050	99,79%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	2.072.982.400	2.069.137.366	99,81%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	49.817.300	49.781.400	99,93%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	26.975.000	24.121.250	89,42%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	353.084.600	331.727.100	93,95%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.193.120.000	2.227.698.001	101,58%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	35.695.800	34.345.500	96,22%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	36.615.700	32.687.695	89,27%
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50.137.700	45.269.150	90,29%
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.707.240.600	1.768.343.765	103,58%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	839.962.000	837.172.365	99,67%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	78.521.200	76.289.400	97,16%



No	Program Kegiatan	Anggaran Realisasi	Realisasi	(%)
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	731.220.000	800.190.000	109,43%
	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	57.537.400	54.692.000	95,05%

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang Tahun 2023

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

TABEL 4.29

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KESEHATAN

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (KB) KOTA SINGKAWANG

No	Program/Kegiatan Yang Mendukung Indikator SPM	JUMLAH DANA (Rp.)
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	487.780.000
	- Pendataan Ibu Hamil (Pendataan, Transport, Pengadaan Formulir ibu hamil)	
	- Pemeriksaan ibu hamil (Pelayanan, Laboratorium, Obat KIA, Vaksin, Transport, Alat)	
	- Pemanfaatan dan pengisian buku KIA (Pengadaan buku KIA, Pengisian)	
	- Pengisian kartu ibu dan kohort (Pengadaan register, Kohort KIA , Kartu Ibu , ATK, Form pelaporan)	
	- Pertemuan supervisi fasilitatif	
	- Pertemuan Kelas ibu	
	- Verifikasi data KIA	
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	106.948.000
	- Pendataan ibu bersalin (Pendataan, Transport, Pengadaan formulir)	



	- Pelayanan ibu bersalin (Pengadaan set persalinan, Pengadaan set registrasi bayi, Pengadaan perawatan paska persalinan, obat BHP (bahan habis pakai)untuk persalinan,formulir)	
	- Pemanfaatan dan pengisian buku KIA (Pengadaan Buku KIA, Pengisian)	
	- Pengisian kartu ibu dan kohort (Pengadaan register,Kohort KIA, Kartu Ibu, ATK, Form pelaporan	
	- Rujukan pertolongan persalinan (Pelayanan keperawatan maternal, Transport, Pengadaan set kegawatdaruratan maternal, biaya sewa / operasional rumah tunggu)	
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	6.900.000
	- Pendataan bayi baru lahir (Pendataan, Transport, Pengadaan formulir)	
	- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
	Pelayanan dalam gedung	
	Pengadaan formulir bayi baru lahir, Formulir MTBM, Set kegawatdaruratan, Set pelayanan bayi baru lahir, Pengadaan Vit K 1 injeksi, salep mata antibiotik pedoman pelayanan kesehatan neonatal esensial)	
	Pelayanan luar gedung	
	- Transport, Pengadaan formulir MTBM, Set Pelayanan bayi baru lahir 0 - 6 jam, Pengadaan vit K1 injeksi, Salep/tetes mata antibiotik	
	- Pengisian dan pemanfaatan buku KIA (Buku KIA)	
	- Pencatatan dan pelaporan (Pengadaan register kohort bayi, formulir, ATK)	
	- Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (Pelayanan kegawatdaruratan neonatal, Set kegawatdaruratan, transport)	
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	510.210.000
	- Pendataan balita 0 - 59 bulan (Pendataan, Transport,	



	Pengadaan formulir)	
	- Pelayanan kesehatan balita.	
	Pelayanan dalam gedung	
	Pengadaan set pemeriksaan anak, set imunisasi, Formulir DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang) Pengadaan SDIDTK (Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) Kit, Pengadaan formulir kuesioner pra skrining perkembangan	
	Pelayanan luar gedung	
	- Pelayanan kesehatan anak Balita, Transport Pengadaan kit Posyandu, Imunisasi kid	
	Pengadaan Formulir DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)	
	Pengadaan SDIDTK (Stimulasi, Deteksi dan ntervensi Dini Tumbuh Kembang) Kit	
	Pengadaan formulir kuesioner pra skrining perkembangan	
	- Pengisian dan pemanfaatan buku KIA (pengadaan buku KIA)	
	- Pencatatan dan pelaporan (Data jumlah Balita, Pengadaan formulir, ATK)	
	Pengadaan register kohort Balita dan Apras (anak pra sekolah)	
	- Pelayanan rujukan secara tepat	
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	330.800.000
	- Koordinasi dan pendataan sasaran (Transport, Pengadaan formulir)	
	- Pelaksanaan skrining kesehatan (Transport, UKS Kid, pengadaan buku pencatatan, formulir rekapitulasi di Sekolah / luar dan di Puskesmas	
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA	559.469.900



	PRODUKTIF	
	- Melakukan deteksi kemungkinan obesitas dengan melakukan pemeriksaan tinggi badan / berat badan serta lingkar perut	
	- Melakukan deteksi kemungkinan hipertensi dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah	
	- Melakukan deteksi kemungkinan DM (Diabetes Melitus) dengan melakukan pemeriksaan gula darah	
	- Melakukan pemeriksaan dini Deteksi dini kangker leher rahim melalui pemeriksaan SADANIS dan pemeriksaan IVA khusus usia 30 th s/d 50 th	
	- Pengisian buku lansia dan kohort (Pengadaan Kohort Lansia, Buku Lansia, ATK)	
	- Pertemuan petugas Lansia	
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	31.311.300
	- Pendataan sasaran Lansia (Transport, Pengadaan formulir)	
	- Pelaksanaan skrining kesehatan Lansia (Pengadaan Lansia Kid, strip uji pemeriksaan kadar gula darah) dan kolesterol, instrumen GDS/Geriatrik Depresion Skale, AMT/ Abreviated Mental Test	
	dalam paket P3G / Pengkajian Paripurna Pasien geriatri	
	- Pencatatan dan pelaporan (Pengadaan buku kesehatan Lansia, formulir, ATK/Alat Tulis Kantor, transport)	
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	271.801.000
	- Melakukan skrining faktor resiko hipertensi untuk seluruh pasien baik di FKTP maupun di POSBINDU	
	- Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi edukasi tentang diet makanan, aktifitas fisik serta terafi farmakologis jika ditemukan di FKTP/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	



9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM)	14.001.000
	- Melakukan skrining faktor resiko DM /Diabetes melitus untuk seluruh pasien baik di FKTP maupun di POSBINDU	
	- Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi edukasi tentang diet makanan, aktifitas fisik serta terafi farmakologis jika ditemukan di FKTP/ Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	66.740.000
	- Melakukan pelayanan promotif dan preventif mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan.	
	- Melakukan edukasi dan evaluasi kepada keluarga pasien tentang kepatuhan minum obat, kebersihan diri.	
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKOLOSIS (TB)	143.065.200
	1. Penemuan kasus TB	
	- Penemuan secara aktif masif	
	- Penyuluhan kepada masyarakat	
	- Skrining TB orang dengan HIV	
	- Skrining TB orang dengan DM (Diabetes Melitus)	
	- Skrining TB pada populasi khusus (Lapas, Pasantren, Tempat kerja, Asrama)	
	- Investigasi kontak (Kontak serumah dan kontak erat)	
	2. Pengobatan kasus TB	
	- Pengobatan pada semua kasus TB (TB Paru baru, Klinis, Kambuh, Anak ekstra paru dan TB kebal obat MDR) berupa Buffer Provinsi	
	- Cetak format / Media KIE TB	
	TB kebal obat/MDR)	
	- Kontak mangkir	



	3. Peningkatan Kapasitas SDM	
	- Tim TBC Puskesmas/Rumah Sakit/Klinik	
	- Kader TBC	
	4. Monitoring dan evaluasi	
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	157.945.000
	- Pertemuan Klinik methadon	
	- Skrining HIV pada kelompok resiko WPS (Wanita Penjaja Sek)	
	- Skrining HIV pada kelompok resiko LSL (Lelaki Suka Lelaki) dan waria	
	- Skrining HIV pada kelompok resiko Penasun (Pengguna Narkoba Suntik)	
	- Skrining HIV pada kelompok resiko Ibu hamil	
	- Skrining HIV pada kelompok resiko pasien TB	
	- Skrining HIV pada kelompok resiko pasien IMS (Infeksi Menular Seksual)	
	- Skrining HIV pada kelompok resiko di Lapas.	
	- Supervisi Dinas ke Puskesmas	
	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	-
	- Biaya ATK	
	- Insentif pengelola administrasi non ASN , BPJS, Asuransi	
	- Sero Survey (semua populasi kunci)	
	- Transport kader HIV	
	- Menev program HIV	
	- Pengadaan reagen HIV	
	- Pengadaan reagen Sipilis	
	TOTAL ANGGARAN	2.686.971.400

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2023



C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

TABEL 4.30

**PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SERTA REALISASINYA
TAHUN 2023**

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.723.000.000	3.713.119.456	99,73%
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.737.000.000	2.730.388.297	99,76%
	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.257.280.000	1.254.429.589	99,77 %
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	1.479.720.000	1.475.958.708	99,75 %



	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	986.000.000	982.731.159	99,67 %
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	131.400.000	130.272.559	99,14%
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	161.900.000	1.766.075.750	99,30%
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	692.700.000	691.697.200	99,86%
2	Program Pengelolaan Program Dan Pengembangan Sistem Drainase	12.045.700.600	12.013.923.584	99,74%
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.045.700.600	12.013.923.584	99,74%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7.094.600.000	7.075.224.024	99,73 %



	Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2.074.438.200	2.069.440.275	99,76%
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.876.662.400	2.869.259.285	99,74%
3	Program Penyelenggara Jalan	47,214.018.278	45,390.486.348	96,14%
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	47,214.018.278	45,390.486.348	96,14%
	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	11.158.288.337	10.284.080.295	92,17%
	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	456.481.000	451.237.700	98,85%
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	11.440.349.103	11.330.658.062	99,04%
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	21.583.023.188	20.868.782.620	96,69%
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	1.386.234.800	1.309.802.121	94,49%



	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	1.139.642.300	1.099.424.700	96,47%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	50.000.000	46.500.850	93,00%
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	58.567.800	28.905.700	49,35%
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	18.008.000	10.544.200	58,55%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	18.008.000	10.544.200	58,55%
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	40.559.800	18.361.500	45,27%
	Sub Kegiatan Pengawasan dan	40.559.800	18.361.500	45,27%



	Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.274.276.199	5.788.637.419	92,26 %
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.274.276.199	5.788.637.419	92,26 %
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.274.276.199	5.788.637.419	92,26%
	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.280.550.150	2.276.453.931	99,82%
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	2.280.550.150	2.276.453.931	99,82%



	Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penye- diaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	2.280.550.150	2.276.453.931	99,82%
6	Program Pengembangan Permukiman	28.190.140.115	28.107.351.583	99,71%
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	28.190.140.115	28.107.351.583	99,71%
	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	28.087.123.475	28.021.380.843	99,77%
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian	103.016.640	85.970.740	83,45%



	Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
7	Program Penataan Bangunan Gedung	15.919.084.041	15.216.181.768	95,58 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	15.919.084.041	15.216.181.768	95,58 %
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	207.840.000	186.320.500	89,65%
	Sub Kegiatan Perencanaan,	15.711.244.041	15.029.861.268	95,66%



	Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1.142.080.000	1.117.334.011	97,83%
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.142.080.000	1.117.334.011	97,83%
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	675.080.000	658.359.631	97,52%
	Sub Kegiatan Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	46.425.000	44.815.928	96,53%
	Sub Kegiatan Penataan Bangunan	55.235.000	53.795.860	97,39%



	dan Lingkungannya			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	365.340.000	360.362.592	98,64%
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.959.666.100	1.932.923.575	98,64%
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.219.518.100	1.215.441.508	99,67%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.199.915.500	1.195.895.838	99,67%
	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	19.602.600	19.545.670	99,71
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	10.375.000	5.749.945	55,42



	Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	10.375.000	5.749.945	55,42
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	29.460.000	29.209.650	99,15
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Investasi dan Pembangunan Daerah	29.460.000	29.209.650	99,15
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	700.313.000	682.522.472	97,46
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum	371.892.900	369.864.018	99,45



	Bidang Penataan Ruang			
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	328.420.100	312.658.454	95,20

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Kota Singkawang Tahun 2023 yaitu;

Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Capaian Anggaran SPM rinciannya sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan pagu dana sebesar Rp. 254.908.800 dan realisasi sebesar Rp. 162.544.400 (63.77%) dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota pagu dana sebesar Rp. 57.498.900 dan realisasi anggaran Rp. 56.251.600 (97.83%)

a. Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus.

Tahun 2023 pada DPPA-DISPERKIMTA pagu dana Sebesar Rp. 57.498.900 dengan realisasi anggaran Rp. 56.251.600 (97.83%)

- Output : Jumlah dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah khusus dengan target 1 Dokumen dan Realisasi 1 Dokumen.

2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota



Pagu dana sebesar Rp. 197.409.900 dan realisasi anggaran Rp. 106.292.800 (53.84%)

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

Tahun 2023 pada DPPA-DISPERKIMTA pagu dana Sebesar Rp. 89.915.300 dengan realisasi anggaran Rp. 0,- (0%). Hal ini disebabkan adanya partisipasi aktif warga / swadaya masyarakat, sehingga dapat terealisasi secara fisik 6 unit Rumah.

- Output : Jumlah rumah korban bencana yang terehabilitasi dengan target 6 Unit/KK dan Realisasi 6 Unit/KK.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Tahun 2023 pada DPPA-DISPERKIMTA dianggarkan sebesar Rp. 107.494.600 dengan realisasi anggaran Rp. 106.292.800 (98.88%).

- Output : Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1 Dokumen dan Realisasi 1 Dokumen.

c. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Tahun 2023 pada DPA Induk DISPERKIMTA dianggarkan sebesar Rp. 154.779.100, dikarenakan masih pada tahapan verifikasi calon penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga kegiatan ini diusulkan untuk dilakukan Pergeseran pada Perubahan Anggaran TA 2023.

- Output : Jumlah Rumah khusus beserta PSU Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun dengan target 1 Unit Rumah dan Realisasi 1 Unit Rumah.



E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada (Tabel 4.31) berikut :

TABEL 4.31
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MEDUKUNG PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2023

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Satpol PP Kota Singkawang	9.634.416.403	9.376.594.056	97,32
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	261.040.800	254.434.628	97,47
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.777.200	131.716.617	97,01
	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	99.698.400	97.095.661	97,39
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	36.078.800	34.620.956	95,96
2	Kegiatan Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	125.263.600	122.718.011	97,97
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	125.263.600	122.718.011	97,97



	Bupati/Wali Kota			
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	95.514.500	91.563.979	95,86
3	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.881.800	33.878.730	91,86
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	36.881.800	33.878.730	91,86
4	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.098.600	8.657.975	95,16
	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	9.098.600	8.657.975	95,16
5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	49.534.100	49.027.274	98,98
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	49.534.100	49.027.274	98,98

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Tahun 2023



TABEL 4.32
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MEDUKUNG PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Program Penanggulangan Bencana			
1	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	47.246.400	46.691.900	98,83
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	47.246.400	46.691.900	98,83
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	973.217.850	902.871.600	92,77
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	105.563.900	104.538.300	99,03
	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	558.177.450	489.170.600	87,64
	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	37.500.000	37.420.000	99,79
	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	271.976.500	271.742.700	99,91
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	53.614.350	39.292.000	73,29
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	53.614.350	39.292.000	73,29

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2023



F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada (Tabel 4.30) berikut :

TABEL 4.33

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL KOTA SINGKAWANG SERTA REALISASINYA TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	Program Rehabilitasi Sosial	451.684.956	441.335.342	97,71	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pegemis di Luar Panti Sosial	451.684.956	441.335.342	97,71	-
	Penyediaan Permakanan	183.138.556	177.089.200	96,66	Pemberian Makanan berupa sembako
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	21.783.600	21.198.140	97,31	Paket Makanan berupa sembako Home Visit Lansia



	Pemberian Layanan Rujukan	236.598.000	232.897.052	98,44	Layanan rujukan untuk ODGJ
	Penyediaan Alat Bantu	10.164.800	10.150.950	99,86	Kursi dorong 4 unit, tongkat 12 buah
2	Program Penanganan Bencana	57.154.800	45.432.300	79,49	
	Kegiatan Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	57.154.800	45.432.300	79,49	-
	Penyediaan Makanan	50.434.800	42.523.400	84,31	Pemberian Makanan berupa sembako, bersifat situasional
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	6.720.000	2.908.900	43,29	Pemberian Makanan berupa sembako bersifat situasional
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya yang Mendukung SPM				
3	Program Penanganan Bencana	42.265.800	29.134.000	68,93	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	42.265.800	29.134.000	68,93	-



	Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	42.265.800	29.134.000	68,93	Honor untuk tagana 25 orang, bersifat situasional
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	54.576.000	53.550.955	98,12	
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	54.576.000	53.550.955	98,12	-
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	54.576.000	53.550.955	98,12	Pemberian paket untuk ABH, penanganan permasalahan anak, dan pengiriman anak untuk rehailitasi ke Jawa tengah
	JUMLAH	605.681.556	569.452.597	94,01	

Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023



BAB V

PENUTUP

Penyusunan dan Penyampaian LPPD Kota Singkawang Tahun 2023 berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Singkawang selama 1 (satu) Tahun Anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang. Laporan ini adalah sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Secara substantif, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang diharapkan dapat mencapai Visi untuk mewujudkan masyarakat Singkawang yang lebih sejahtera melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Secara normatif, terdapat 24 urusan wajib, 8 urusan pilihan, 5 urusan fungsi penunjang pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Singkawang belum sepenuhnya mengacu kepada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Namun demikian, seoptimal mungkin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang telah disepakati bersama dengan DPRD.



Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Singkawang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di Kota Singkawang.



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Aliyang Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 631767 Faks. (0562) 631767

Laman: www.singkawangkota.go.id Pos-el : inspektorat@singkawangkota.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Singkawang untuk Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Kota Singkawang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi dan hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Singkawang, 26 Maret 2024